2019

BNPB

LAPORAN KINERJA

KITA JAGA **ALAM**

ALAM *JAGA KITA*

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KATA PENGANTAR

Selama tahun 2019, telah terjadi 3.814 kejadian bencana. Dengan semakin banyaknya kejadian bencana yang terjadi merupakan pembelajaran bagi kita semua agar selalu siaga menghadapi bencana. Upaya mitigasi risiko bencana perlu dilakukan secara menyeluruh, baik mitigasi struktural maupun non struktural. Salah satu mitigasi non struktural yang berpotensi cukup baik adalah mitigasi vegetasi, yaitu dengan membudidayakan vegetasi atau tumbuhan yang tepat pada wilayah yang tepat dalam rangka menjaga keseimbangan alam. Jika kita mampu menjaga keseimbangan alam dengan baik, diharapkan kita mampu hidup harmonis dengan alam sehingga dampak bencana dapat diminimalisir.

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2019 ini mengungkapkan upaya-upaya penanggulangan bencana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2019. Implementasi kebijakan, program dan kegiatan tahun 2019 merupakan upaya pencapaian sasaran dalam RPJMN 2015-2019 yaitu **"Menurunnya Indeks Risiko Bencana Pada Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Memiliki Indeks Risiko Tinggi Bencana"**.

Pencapaian keberhasilan yang dicapai BNPB diperoleh dengan dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran BNPB dan pemangku kepentingan terkait. Ke depan perlu terus dilakukan upaya-upaya perbaikan sebagai upaya bagi peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja untuk mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana melalui hidup harmoni dengan alam. **"Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita"**.

Jakarta, 25 Februari 2020
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana

Doni Monardo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis BNPB tahun 2015-2019, pencapaian visi dan misi BNPB diukur dari ketercapaian 4 (empat) sasaran strategis yang diuraikan menjadi 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU). Pada tahun 2019, secara umum pencapaian kinerja BNPB menunjukkan adanya peningkatan. Dari 6 (enam) IKU, 2 (dua) IKU telah melebihi target yang di tetapkan, 1 (satu) IKU mencapai target yang telah ditetapkan dan 3 (tiga) IKU yang belum mencapai target yaitu kabupaten/kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah, persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan persentase kabupaten/kota rawan bencana yang memiliki ketersediaan logistik dan peralatan serta kemampuan teknis untuk kesiapsiagaan dan kedaruratan.

Dari bidang penanganan darurat, capaian kinerja telah mencapai 100% untuk kejadian bencana yang direspon, bidang logistik dan peralatan meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018 menjadi 98.86% di tahun 2019. Untuk bidang rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat capaian kinerja mencapai 138.57% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 115.67%, sedangkan untuk penyebaran informasi kejadian bencana persentase capaian kinerja mencapai 159% di tahun 2019. Untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagaan perlu adanya peningkatan integrasi kajian risiko bencana ke dalam pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Ke depan perlu menumbuhkan komitmen kepala daerah melalui diseminasi dan koordinasi intensif mengenai pentingnya mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah serta mendorong pemerintah daerah untuk melegalisasi dokumen RPB menjadi peraturan daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota, yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

Berbagai inovasi dan penghargaan menunjukkan keberhasilan BNPB di tahun 2019 diantaranya Peta Bencana menerima penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA), BNPB menerima penghargaan dari Government Social Media Summit 2019 (GSM Award 2019) sebagai pemenang untuk Kategori Best Collaboration dengan tema kolaborasi Perubahan Iklim. Penghargaan tersebut tentu mendorong BNPB untuk lebih meningkatkan penanggulangan bencana menjadi lebih optimal.

Dari sisi akuntabilitas kinerja anggaran, dalam rangka mencapai tujuan dari progam dan kegiatan, pada tahun 2019 BNPB mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.178.834.974.000,- dengan rincian pagu rutin sebesar Rp. 614.425.671.000,- dana siap pakai (DSP) sebesar Rp. 7.326.662.053.000,- serta hibah luar negeri sebesar Rp. 237.747.250.000,. Capaian realisasi anggaran BNPB adalah sebesar 98,95% atau sebesar Rp. 8.092.673.659.192,-. Disamping dana yang terdapat dalam DIPA BNPB, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan dana hibah Rehabilitasi Rekonstruksi pasca bencana atas dasar pengajuan dari BNPB sebesar Rp.3.160.228.546.000,- untuk 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.1.972.459.800.000,- untuk bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di provinsi Sulawesi Tengah dan tahap kedua untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di berbagai daerah di Indonesia sebesar Rp.1.187.768.746.000,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
A. Maksud dan Tujuan 2
B. Tugas dan Fungsi BNPB 2
C. Sumber Daya Manusia BNPB 7
1.2. Isu Strategis 9
1.3. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 15
BAB II PERENCANAAN KINERJA **16**
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **20**
3.1. Capaian Kinerja 20
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama 24
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana 24
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kemampuan BNPB dalam merespon kejadian bencana 59
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat pascabencana 101
Sasaran Strategis 4. Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana 136
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2019 181
BAB IV PENUTUP **184**

LAMPIRAN 186
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 187
Lampiran 2. Pernyataan Telah Direviu 190
Lampiran 3. Perbandingan capaian kinerja periode 2015-2017 191
Lampiran 4. Rekapitulasi RPB Tahun 2012 - 2019 192
Lampiran 5. Rekapitulasi Destana Tahun 2012-2019 198
Lampiran 6. Perkembangan Desa Tangguh Bencana 220
Lampiran 7. Rekapitulasi Kejadian Bencana Yang Di Respon 221
Lampiran 8. Distribusi Peralatan Tahun 2015 – 2019 di 136 Kab/Kota Prioritas 236
Lampiran 9. Distribusi Logistik di 136 Kab/Kota Prioritas 241

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BNPB 6
Gambar 2. Data Pegawai BNPB 8
Gambar 3. Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia 9
Gambar 4. Sebaran Kejadian Bencana Tahun 2019 10
Gambar 5. Kejadian Bencana Tahun 2019 per jenis bencana 10
Gambar 6. Jumlah Korban Meninggal per Jenis Bencana Tahun 2019 11
Gambar 7. Posisi Megatrust dan sesar gempa bumi dan tsunami di Indonesia 12
Gambar 8. 6 Arahan Presiden Jokowidodo dalam Rakornas PB 2019 13
Gambar 9. Perbandingan Capaian BNPB Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan IKU 21
Gambar 10. Capaian IKU BNPB 2015 - 2017 22
Gambar 11. Indeks Risiko Bencana Rata2 Prioritas Nasional 2015-2019 23
Gambar 12. Proses Penyusunan dan Analisis Rencana Penanggulangan Bencana ... 26
Gambar 13. Sebaran Lokasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 30
Gambar 14. Dokumentasi kegiatan pendampingan dan bimtek RPB 32
Gambar 15. Sebaran Lokasi Penyusunan Rencana Kontijensi Tahun 2019 33
Gambar 16. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi di beberapa Kab/Kota 35
Gambar 17. Penilaian Ketangguhan Daerah di Kabupaten Lumajang 38
Gambar 18. Rute Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tahun 2019 43
Gambar 19. Penilaian ketangguhan desa dan sosialisasi relawan ke pesantren 46
Gambar 20. Pemasangan papan informasi dan pesta rakyat ekspedisi destana 47
Gambar 21. Perkembangan dan Capaian Kinerja Desa Tangguh Bencana 48
Gambar 22. Kegiatan Temu Relawan 50

Gambar 23. Rapat Koordinasi Nasional Forum PRB se-Indonesia 53
Gambar 24. Implemantasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 56
Gambar 25. Diagram Hasil penilaian bangunan di 8 kabupaten/kota 59
Gambar 26. Grafik 294 Kejadian Bencana Yang Direspon Tahun 2019..... 61
Gambar 27. Persentase Penggunaan DSP berdasarkan Jenis Bencana..... 67
Gambar 28. Realisasi DSP Tahun 2019 68
Gambar 29. Gambar Pemadaman Kebakaran Hutan dan lahan melalui water bombing 71
Gambar 30. Jumlah titik panas per bulan sepanjang Tahun 2019..... 71
Gambar 31. Grafik Jumlah Titik Hotspot per provinsi selama tahun 2019 72
Gambar 32. Upaya BNPB/BPPT/TNI dalam menangani bencana karhutla melalui TMC..... 73
Gambar 33. Peta Sebaran Dukungan Udara Penanganan Asap Akibat Karthutla di Wilayah Sumatera dan Kalimantan tahun 2019 73
Gambar 34. Upaya BNPB dalam menangani Bencana Kebakaran hutan dan lahan melalui operasi darat..... 74
Gambar 35. Orang utan yang dievakuasi pada saat bencana kabut asap di wilayah Prov. Kalimantan Tengah..... 75
Gambar 36. Infografis progress perbaikan rumah pasca gempa bumi NTB tahun 2018..... 78
Gambar 37. Progress Pembangunan Huntara 81
Gambar 38. Penyerahan Dana Tunggu Hunian 82
Gambar 39. Peta Sebaran Lokasi Tim Pendataan Sasaran Bencana Gempabumi Kab. Halmahaera Selatan 87
Gambar 40. Rencana Penanganan Stimulan Rumah..... 89

Gambar 41. Distribusi Logistik & Peralatan ke 136 kab/kota berisiko tinggi Tahun 2015 s/d 2019 92

Gambar 42. Distribusi Logistik dan Peralatan dalam rangka Penguatan Kelembagaan BPBD Prioritas dan Non Prioritas RPJMN Periode tahun 2015 s/d 2019 . 93

Gambar 43. Kegiatan pemanfaatan dan distribusi bantuan logistik dan peralatan 99

Gambar 44. Struktur Indikator pengukuran peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi 104

Gambar 45. Keterkaitan Pemulihan Pascabencana berdasarkan UU, Perka BNPB dengan Indikator Pembangunan Manusia 104

Gambar 46. Nilai Kerusakan dan Kerugian akibat bencana massif pada tahun 2019 108

Gambar 47. Proses Pelaksana Pendampingan Ekonomi Tahun Anggaran..... 111

Gambar 48. Skema Pendampingan Sosial 112

Gambar 49. Kegiatan Pendampingan RR Bidang Fisik di Provinsi Sulawesi Tengah. 114

Gambar 50. Progres Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bantuan Stimulan Rumah Insitu Rusak Berat Tahap 1 di Provinsi Sulawesi Tengah 115

Gambar 51. Lokasi dan Produk Pendampingan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah..... 118

Gambar 52. Bantuan Stimulan Kegiatan Pendampingan Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah..... 121

Gambar 53. Kegiatan Pendampingan RR Bidang Fisik di Provinsi NTB..... 122

Gambar 54. Kegiatan Survey penentuan komoditas dan pemberian bantuan stimulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 123

Gambar 55. Lokasi dan Produk Pendampingan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat 124

Gambar 56. Hasil Pendampingan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat..... 125

Gambar 57. Kegiatan Pendampingan RR Bidang Fisik di Kabupaten Karo..... 128

Gambar 58. Progress Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 129
Gambar 59. Kegiatan Rapat Monitoring Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Fisik. 131
Gambar 60. Kegiatan Gelar Budaya di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB 132
Gambar 61. Kegiatan gelar budaya di Kabupaten Donggala..... 133
Gambar 62. Pelaksanaan Pameran Dukungan Pemasaran Kelompok Terdampak ... 135
Gambar 63. Pelaksanaan Pameran PRB di Kota Pangkal Pinang 136
Gambar 64. *WhatsApp Group* Media Komunikasi Bencana 141
Gambar 65.*WhatsappGroup* Wartawan (Medkom Bencana-1) 148
Gambar 66. Website resmi BNPB www.bnpb.go.id..... 149
Gambar 67. Fanpage Facebook resmi BNPB @InfoBencanaBNPB 150
Gambar 68. Instagram resmi BNPB @bnpb_indonesia 151
Gambar 69. *YouTube* resmi BNPB Indonesia..... 151
Gambar 70. InAWARE (http://inaware.bnpb.go.id/inaware/)..... 152
Gambar 71. Geospasial (http://geospasial.bnpb.go.id/)..... 152
Gambar 72. Peta Bencana (http://petabencana.id/) 153
Gambar 73. Data Informasi Bencana Indonesia/DIBI (http://bnpb.cloud/dibi/)..... 153
Gambar 74. Aplikasi BNPB TV dan Diorama BNPB dapat diakses di Google Playstore..... 154
Gambar 75. Live melalui TV, Konferensi Pers Kepala BNPB, Deputi bidang Sistem dan Strategi, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas 160
Gambar 76. Media Monitoring berita bencana 165
Gambar 77. Tren Berita BNPB Tahun 2019..... 166
Gambar 78.Kunjungan Diorama Edukasi Bencana 170

Gambar 79. Edukasi Bencana melalui buku 172

Gambar 80. Jurnal Dialog PB dan Majalah Gema BNPB 173

Gambar 81. Kepala BNPB Doni Monardo menerima penghargaan *"Trend Setter for Green Environment*" 181

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035 (Ribuan) 14

Tabel 2. Penetapan Kinerja BNPB Tahun 2019 18

Tabel 3. Capaian Kinerja BNPB Tahun 2019 20

Tabel 4. Perbandingan Capaian IKU BNPB Tahun 2018 dan 2019..... 21

Tabel 5. Kab/Kota yang melakukan penyusunan rencana kontijensi tahun 2019 34

Tabel 6. Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam penilaian ketangguhan daerah pada tahun 2019 37

Tabel 7. Lokasi Kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana Tahun 2019 55

Tabel 8. Pelaksanaan Penilaian Bangunan 2019 57

Tabel 9. Hasil Penilaian Bangunan di 8 Kabupaten/Kota 58

Tabel 10. Penyaluran DSP berdasarkan jenis bencana tahun 2019..... 68

Tabel 11. Personil Satgas Darat Penanganan Asap Akibat Karthutla di Wilayah Sumatera dan Kalimantan tahun 2019 74

Tabel 12. Data Penyaluran Dana Siap Pakai Agustus 2019 s.d Desember Tahun 2019 78

Tabel 13. *Action Plan* penanganan darurat bencana banjir bandang Sentani 82

Tabel 14. Prores Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang Sentani, Kab Jayapura 83

Tabel 15. Penyaluran DSP di Provinsi Maluku 86

Tabel 16. *Action Plan* penyaluran Bantuan *Cash for Work* dan Dana Tunggu Hunian kepada BPBD Kab/Kota terdampak di Provinsi Maluku 87

Tabel 17. Pemenuhan bantuan Logistik wilayah Prioritas RPJMN (136 BPBD Kab/Kota) 92

Tabel 18. Jumlah Penerima Bantuan Logistik dan Peralatan 93

Tabel 19. Hasil Perhitungan Indeks Pemulihan Pascabencana pada Tahun 2019..... 107

Tabel 20. Daftar Penerima Hibah RR 2019 Tahap I 109

Tabel 21. Hasil Pendampingan sosial di Kabupaten Sigi 119

Tabel 22. Hasil Pendampingan sosial di Kota Palu 119

Tabel 23. Hasil Pendampingan sosial di Kabupaten Donggala 120

Tabel 24. Hasil Pendampingan sosial di Kabupaten Parigi Moutong..... 120

Tabel 25. Hasil Laporan per Triwulan Daerah Penerima Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2018 130

Tabel 26. Hasil Laporan per Triwulan Daerah Penerima Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2017 Tahap 1 Perpanjangan. 130

Tabel 27. Hasil Laporan per Triwulan Daerah Penerima Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2017 Tahap 2 Perpanjangan 130

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 s/d 2019 137

Tabel 29. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana untuk kejadian bencana *slow on set*..... 143

Tabel 30. Perbandingan jumlah follower media sosial resmi BNPB dari tahun ke tahun 150

Tabel 31. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana untuk kejadian bencana *sudden on set* 155

Tabel 32. Pemberitaan Berdasarkan Topik Berita..... 169

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana telah menjadi suatu perhatian khusus, baik di mata dunia pada umumnya maupun di Indonesia pada khususnya. Hal ini disebabkan karena dampak bencana yang dirasakan di berbagai sektor dan oleh karena itu, dalam perspektif yang lebih luas, bencana harus dapat dikelola dengan baik agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan hingga seminimal mungkin. Arah kebijakan umum penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dilaksanakan melalui strategi:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Dalam rencana kerja Pemerintah 2019, penanggulangan bencana masuk dalam prioritas nasional ke 2 yaitu Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman dengan Sasaran RPJMN Bidang Penanggulangan Bencana:

- Menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional menjadi 109.4 (2019)
- Menurunkan Indeks Risiko Bencana di 136 Kab/Kota Prioritas menjadi 118.6 (2019)

Upaya pencapaian sasaran RPJMN bidang penanggulangan bencana tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan prioritas diantaranya penguatan kapasitas penanggulangan bencana, peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan,

penanganan darurat dan pemulihan pascabencana, serta penguatan manajemen kebencanaan.

A. Maksud dan Tujuan

Sebagai Lembaga Pemerintah yang anggarannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka BNPB wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pemangku Kepentingan. Laporan Kinerja disusun mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud penyusunanLaporan kinerja tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala BNPB kepada Presiden atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BNPB selama tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan, akan dibuat rumusan kesimpulan yang akan dijadikan salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

B. Tugas dan Fungsi BNPB

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dipimpin oleh Kepala setingkat menteri yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden. Dalam hal ini BNPB mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Bencana, yaitu meliputi:

1. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, BNPB mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdiri atas:

a. Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPB

b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BNPB dan 19 (Sembilan belas) anggota yang terdiri dari 10 (sepuluh) Pejabat Pemerintah Eselon I atau yang setingkat, yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah, dan 9 (sembilan) anggota yang berasal dari unsur masyarakat profesional. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional; 2) Pemantauan, dan 3) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi: 1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2) Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan 3) Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Di dalam unsur pelaksana terdapat 6 (enam) Unit Eselon I sebagai berikut:

1) Sekretariat Utama (Settama) yaitu unsur Pendukung yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama dan bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNPB. Susunan organisasi Settama terdiri dari: Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Kerjasama, Biro Keuangan, Biro Umum, Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.

2) Inspektorat Utama (Ittama), yaitu unsur pengawasan fungsional dalam melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan badan. Ittama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama. Susunan organisasi Ittama terdiri dari: Inspektorat I dan Inspektorat II.

3) Kedeputian bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Mitigasi Bencana. Kedeputian bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Susunan organisasi terdiri dari: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, dan Direktorat Kesiapsiagaan.

4) Kedeputian bidang Penanganan Darurat, yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Penanganan darurat saat tanggap darurat. Kedeputian bidang Penanganan Darurat dipimpin oleh seorang Deputi Penanganan Darurat. Susunan organisasi terdiri dari: Direktorat Tanggap Darurat, Direktorat Bantuan Darurat, Direktorat Perbaikan Darurat, dan Direktorat Pengungsi.

5) Kedeputian bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan standarisasi teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kedeputian bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Susunan organisasi terdiri dari: Direktorat Penilaian Kerusakan, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik.

6) Kedeputian bidang Logistik dan Peralatan, yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Logistik dan Peralatan. Susunan organisasi terdiri dari: Direktorat Logistik dan Direktorat Peralatan.

Susunan Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada gambar berikut: (Sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013).

Gambar 1. Struktur Organisasi BNPB

Tahun 2019 terdapat perubahan struktur organisasi BNPB dengan bertambahnya satu kedeputian yaitu Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan telah diatur turunannya melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Perubahan struktur organisasi baru berjalan efektif setelah diisi pejabat yang berwenang pada 2 Januari 2020.

C. Sumber Daya Manusia BNPB

Jumlah Pegawai BNPB sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mencapai 605 orang ASN dan 353 orang Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai menurut jabatan: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebanyak 6 orang, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 15 orang, jabatan Administrator sebanyak 52 orang, jabatan Pengawas sebanyak 100 orang, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 101 orang, dan pelaksana sebanyak 331 orang.

b. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 6 orang, S-2 sebanyak 100 orang, S-1 sebanyak 352 orang, D-3 sebanyak 93 orang, SMA sebanyak 54 orang.

c. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: Laki-laki sebanyak 611 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 347 orang.

Jika dilihat pada data E-Formasi tahun 2019 kebutuhan ASN BNPB adalah sebanyak 1.378 ASN namun sampai dengan akhir tahun 2019 baru terisi sebanyak 605 ASN.

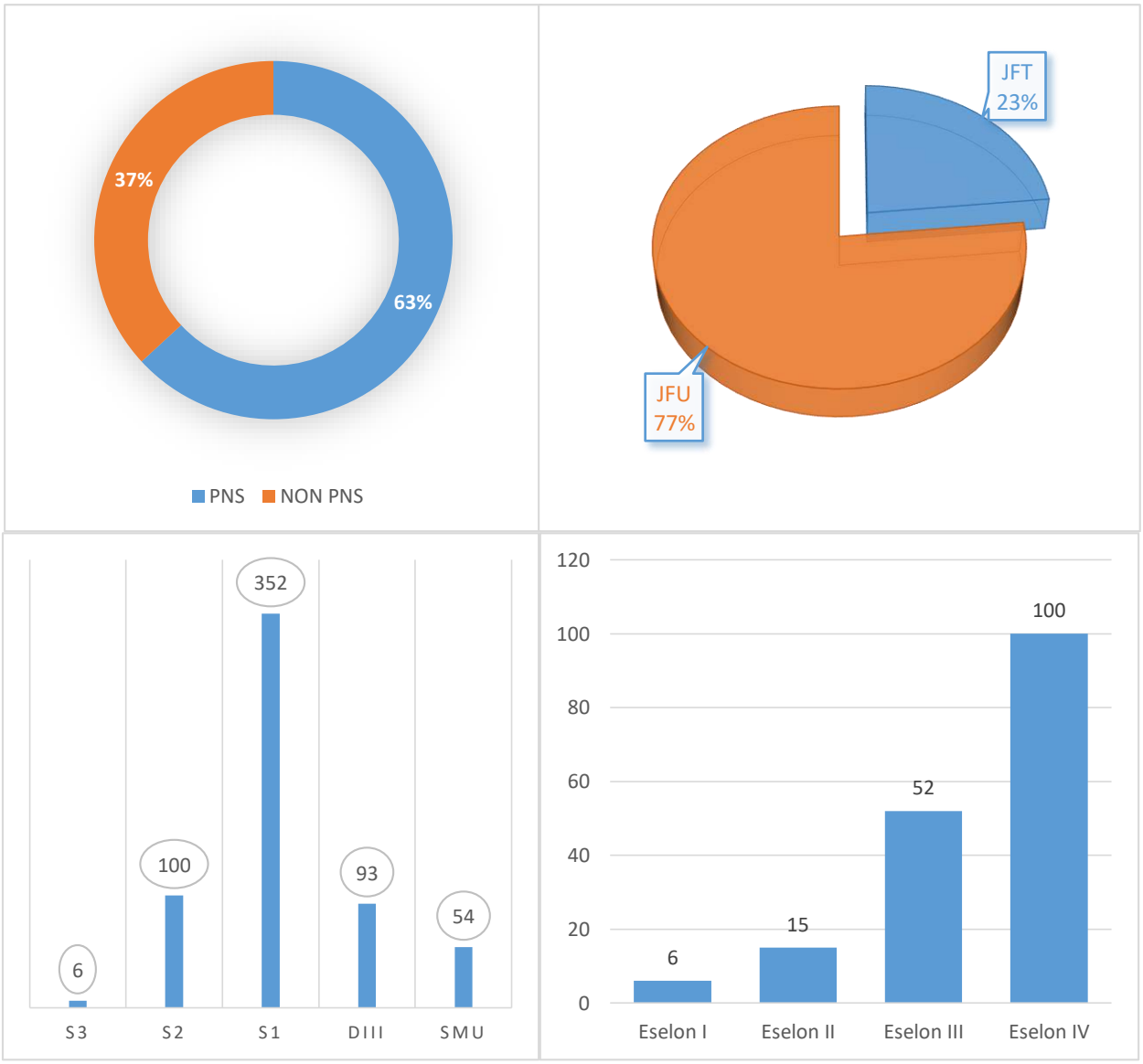

Gambar 2. Data Pegawai BNPB

1.2. Isu Strategis

Secara geologis dan geografis Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi karena berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina dan Pasifik menjadikan Indonesia rawan bencana gempabumi, tsunami, dan letusan gunung api. Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana Tahun 2018 menunjukkan 16 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 18 provinsi berada pada risiko bencana sedang.

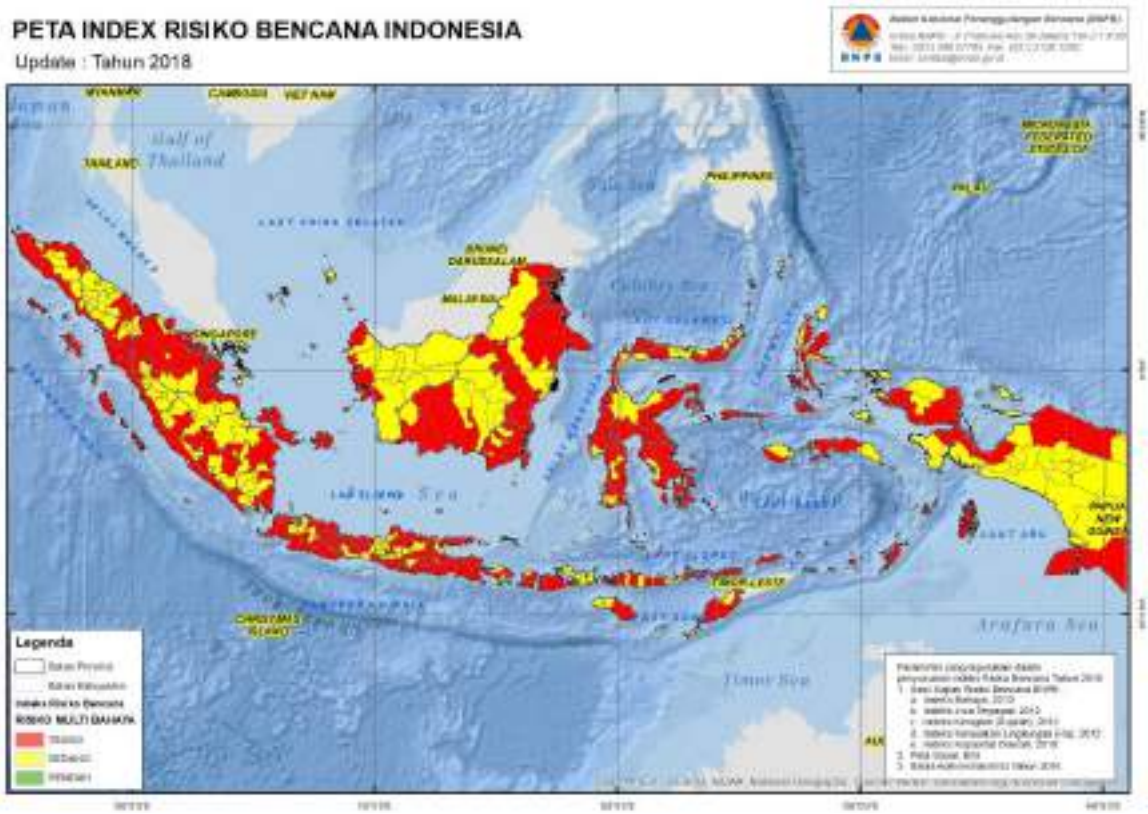

Gambar 3. Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia

Tahun 2019 terdapat 3.814 kejadian bencana. Dari 3.814 bencana tersebut didominasi oleh bencana hidrometeorologi antara lain puting beliung, banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Bencana menimbulkan 6,1 juta jiwa menderita dan mengungsi, 478 jiwa meninggal dunia, serta 3.422 jiwa luka-luka.

Gambar 4. Sebaran Kejadian Bencana Tahun 2019

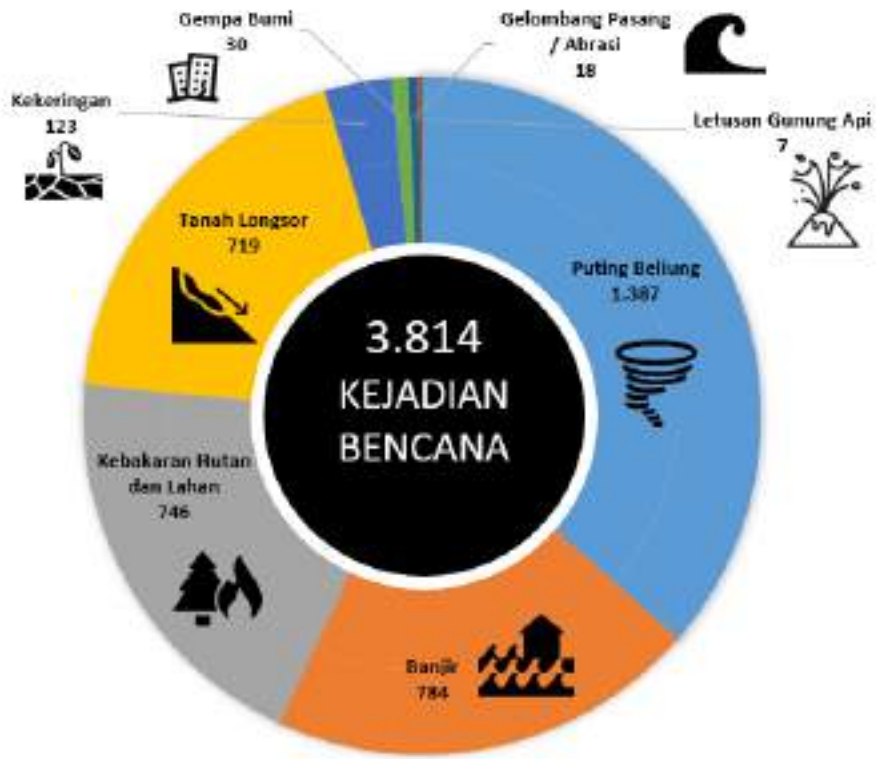

Gambar 5. Kejadian Bencana Tahun 2019 per jenis bencana

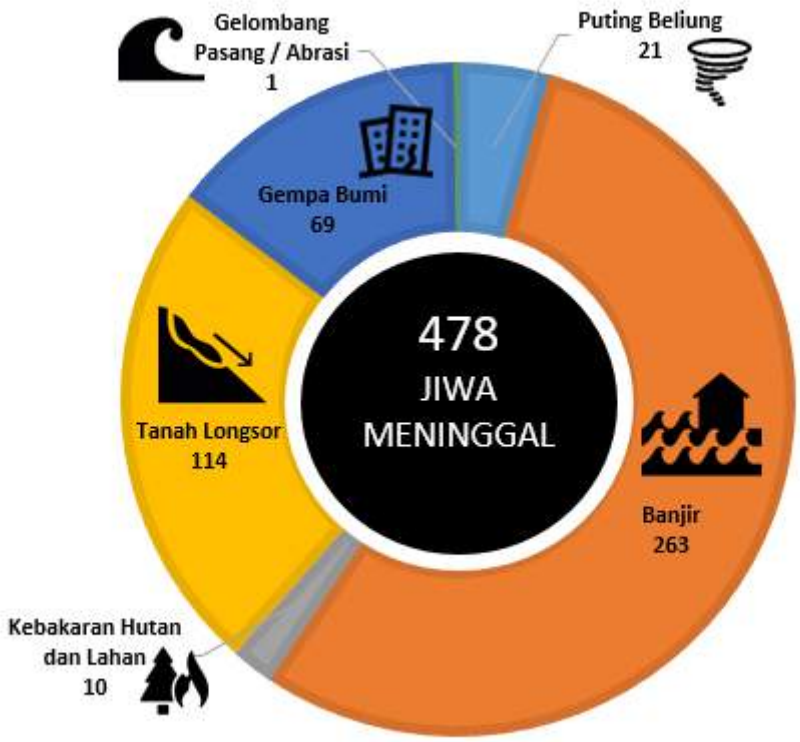

Gambar 6. Jumlah Korban Meninggal per Jenis Bencana Tahun 2019

Dominasi bencana hidrometeorologi dapat disebabkan karena kepedulian masyarakat atas lingkungan sekitar yang semakin menurun. Dari data Kementerian LHK, jumlah lahan kritis di tahun 2018 telah mencapai 14 juta Ha, peningkatan jumlah DAS yang kritis, serta sumber air pulau jawa yang sudah pada tahap kritis dan sangat kritis menjadi salah satu faktor peningkatan bencana hidrometeorologi.

Selain hal tersebut, belajar dari pengalaman bencana Indonesia, beberapa kejadian bencana merupakan kejadian yang berulang. Sebagai contoh kejadian bencana gempa bumi dan tsunami yang menunjukkan suatu periode pengulangan karena adanya megathrust dan sesar yang terletak disepanjang pesisir barat pulauSumatera hingga Bali dan Nusa Tenggara, serta di utara pulau Sulawesi hingga Papua.

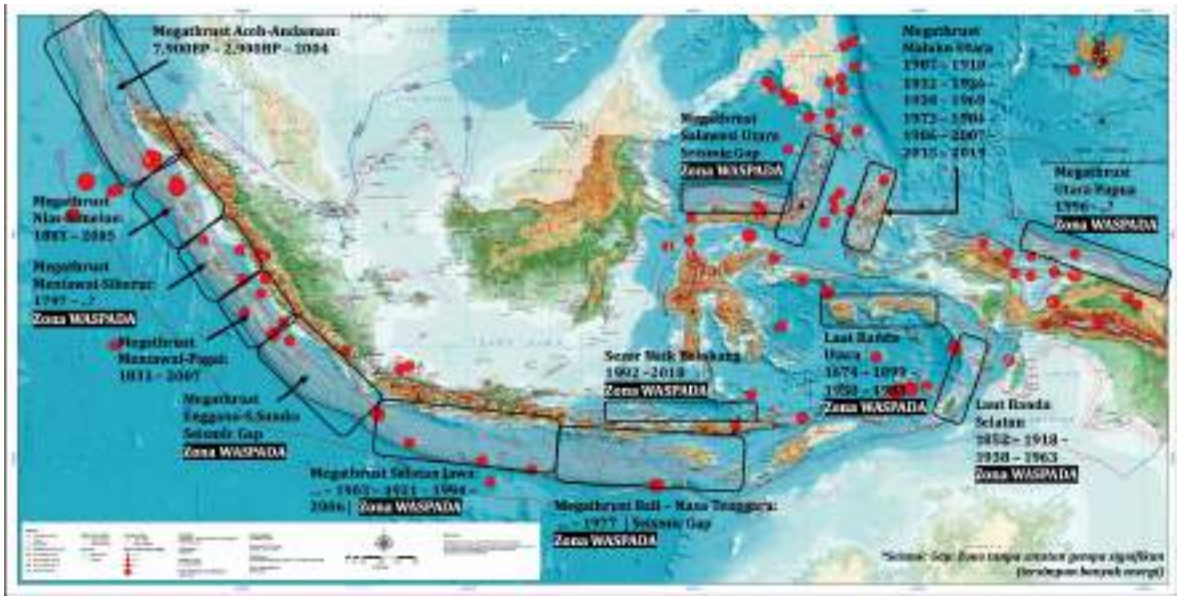

Gambar 7. Posisi Megatrust dan sesar gempa bumi dan tsunami di Indonesia

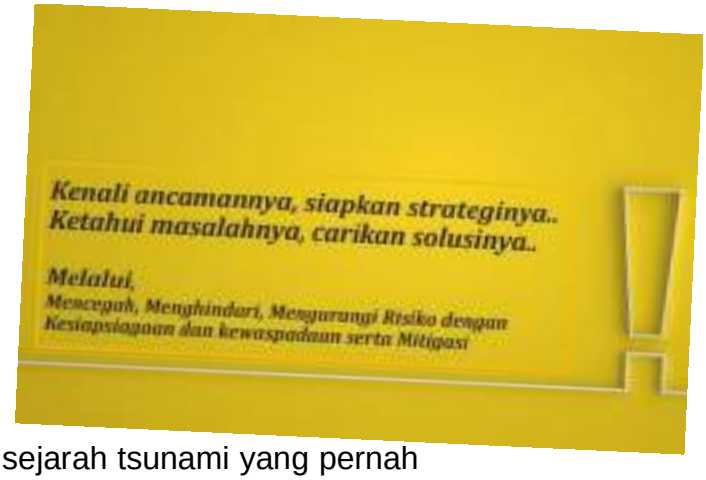

Sebagai upaya pengurangan resiko bencana, belajar dari data sejarah kebencanaan Indonesia tersebut, dapat dilakukan langkah siaga menghadapi bencana yang dapat diprediksi periode pengulangan bencananya. Misalnya periode ulang erupsi gunung berapi atau sejarah tsunami yang pernah terjadi di wilayah- wilayah di Indonesia. Disamping itu perlu diadakan kerjasama dengan para ahli dalam meneliti mengenai kejadian- kejadian bencana yang pernah terjadi di Indonesia serta kearifan lokal yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia terdahulu dalam beradaptasi dengan bencana yang terjadi di wilayahnya. Upaya mitigasi non struktur menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana di Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia meliputi pengetahuan mengenai potensi bencana yang ada di wilayahnya, cara untuk mengurangi resikonya serta peningkatan kapasitas individu yang tangguh menghadapi bencana. Disamping itu

seluruh unsur tokoh masyarakat seperti guru, ulama, tokoh agama, tokoh desa harus mengedukasi masyarakatnya agar sadar bencana. Hal ini sebagaimana 6 (enam) arahan Presiden saat Rakornas PB 2019 di Surabaya, 2 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Perencanaan, Rancangan dan Pembangunan Tata Ruang Harus Memperhatikan Peta Rawan Bencana.
2. Pelibatan Akademisi, Pakar-Pakar Kebencanaan untuk Meneliti, Melihat, Mengkaji, Titik Mana yang Sangat Rawan Bencana Harus Dilakukan Secara Masif.
3. Jika Terjadi Bencana, Maka Otomatis Gubernur akan Menjadi Komandan Satgas Darurat Bersama Pangdam dan Kapolda menjadi Wakil Komandan Satgas.
4. Pembangunan Sistem Peringatan Dini yang Terpadu Berbasiskan Rekomendasi dari Pakar Harus Dipakai, Termasuk Hingga ke Level Daerah.
5. Lakukan Edukasi Bencana.
6. Lakukan Simulasi Latihan Penanganan Bencana secara Berkala dan Teratur untuk Mengingatkan Masyarakat Agar Siap Menghadapi Bencana.

Gambar 8. 6 Arahan Presiden Jokowidodo dalam Rakornas PB 2019

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Indonesia tahun 2020 diprediksi mencapai 271.066.400.000 jiwa. Lebih dari separuh penduduk Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa (57%). Seiring pembangunan yang semakin meningkat, pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian

rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, namun meningkatnya proses pembangunan tetap akanmenimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan mayarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana

Tabel 1. Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035 (Ribuan)

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Pulau Sumatera	50860.30	55272.90	59337.10	62898.60	65938.30	68500.00
Pulau Jawa	137033.30	145143.60	152449.90	158738.00	163754.80	167325.60
Bali dan Kep. Nusa Tenggara	13129.70	14108.50	15047.80	15932.40	16751.40	17495.70
Pulau Kalimantan	13850.90	15343.00	16769.70	18082.60	19264.00	20318.10
Pulau Sulawesi	17437.10	18724.00	19934.00	21019.80	21953.50	22732.00
Kep. Maluku	2585.20	2848.80	3110.70	3363.70	3603.60	3831.40
Pulau Papua	3622.30	4020.90	4417.20	4793.90	5139.50	5449.60
INDONESIA	238518.80	255461.70	271066.40	284829.00	296405.10	305652.40

Dengan semakin tingginya intensitas kejadian bencana dari tahun ke tahun dan kondisi jutaan masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah rawan bencana dengan tingkat mitigasi bencana yang rendah, menuntut upaya penanganan bencana yang terintegrasi melalui peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana baik pada pemerintah daerah, masyarakat, dan Pemerintah pusat dalam tata kelola penanganan bencana sebagai urusan bersama.

1.3. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja BNPB Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, isu strategis dan sistematika penyajian;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan Rencana Strategis BNPB selama tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja tahun 2019;

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BNPB selama tahun 2019 dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BNPB selama tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam upaya mencapai agenda pembangunan yang telah disusun RPJMN 2015-2019. BNPB turut berkontribusi pada fokus prioritas "**Untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana"** melalui strategi:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah;
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Visi yang disusun dalam Renstra BNPB 2015-2019 untuk mewujudkan kontribusi tersebut adalah:

Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana

Komitmen BNPB dalam pencapaian sasaran tersebut, harus didorong dengan peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana sehingga risiko bencana dapat diminimalisir. Peningkatan kapasitas mutlak diperlukan sebagai upaya penurunan risiko bencana. Untuk itu sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan RPJMN periode 2015-2019 adalah:

"Menurunnya Indeks Risiko Bencana Pada Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Memiliki Indeks Risiko Tinggi Bencana"

Indeks Risiko Bencana Indonesia merupakan gambaran tingkat risiko bencana diwilayah administrasi pemerintahan (Provinsi/Kabupaten/Kota) sesuai denganjenis bahaya (*hazard*) serta gabungan beberapa bahaya (*multi hazard*). Indeks Risiko Bencana juga menggambarkan perbandingan tingkat risiko antar wilayah. Sehingga bisa dikatakan bahwa Indeks Risiko Bencana merupakan gambaranperbandingan penilaian seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dari risiko bencana yang ada.

Penurunan Indeks Risiko Bencana dilaksanakan dengan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah (Kabupaten dan Kota) oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat serta lembaga usaha. Pemerintah pusat bertugas untuk menetapkan NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria), membangun fasilitator di pusat dan daerah, melakukan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dan melakukan monitoring dan evaluasi. Pemerintah provinsi bertugas membangun fasilitator di daerah bersama pemerintah pusat, melakukan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dan melaporkan kegiatannya kepada pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten/kota bertugas untuk membangun fasilitator di daerah bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, melakukan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dan melaporkan kegiatannya kepada pemerintah pusat.

Target penurunan indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah (Kabupaten dan Kota) oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat serta lembaga usaha

Penetapan Kinerja BNPB Tahun 2019

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BNPB Tahun 2015-2019, maka ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana penetapan kinerja BNPB tahun 2019, secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. Penetapan Kinerja BNPB Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Waktu Penyelesaian
1	Meningkatnya ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase kabupaten/kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah	50 %	Setahun
		Persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	10 %	Setahun
2	Meningkatnya kemampuan BNPB dalam merespon kejadian bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani (direspon)	100 %	Setahun
		Persentase kabupaten/kota rawan bencana yang memiliki ketersediaan logistik dan peralatan serta kemampuan teknis untuk kesiapsiagaan dan kedaruratan	90 %	Setahun
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat pascabencana	Rata-rata peningkatan indeks pemulihan pascabencana	3.5 %	Setahun
4	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana	3 Jam	1 kali 24 Jam

Perbandingan pagu awal dan pagu akhir anggaran BNPB Tahun 2019

No	Program	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Program Penanggulangan Bencana	400.450.000.000	7.955.802.737.000
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	12.000.000.000	10.800.000.000
3	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	206.975.671.000	212.232.237.000
	Total	**619.425.671.000**	**8.178.834.974.000**

Pembagian Pagu APBN Rutin, Pagu DSP dan Pagu Hibah Luar Negeri Anggaran BNPB Tahun 2019

No	Jenis Pagu Anggaran	Jumlah
1	APBN Rutin	614.425.671.000
2	Dana Siap Pakai	7.326.662.053.000
3	Hibah LN	237.747.250.000
	Total	**8.178.834.974.000**

Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2019

No	Jenis Anggaran	Jumlah
1	Dana Hibah RR Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah	1,972,459,800,000
2	Dana Hibah RR Bencana Sektoral	1,187,768,746,000
Total		**3,160,228,546,000**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja BNPB Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BNPB Tahun 2019.

Tabel 3. Capaian Kinerja BNPB Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase kabupaten/kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah	50 %	35.21%	70.42%
		Persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	10 %	9.65%	96.50%
2	Meningkatnya kemampuan BNPB dalam merespon kejadian bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani (direspon)	100 %	100%	100%
		Persentase kabupaten/kota rawan bencana yang memiliki ketersediaan logistik dan peralatan serta kemampuan teknis untuk kesiapsiagaan dan kedaruratan	90 %	88.97%	98.86%
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat pascabencana	Rata-rata peningkatan indeks pemulihan pascabencana	3.5%	4.85%	138.57%
4	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana	3 Jam	1 Jam 13 menit	159%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2018, terdapat peningkatan kinerja pada beberapa indikator. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

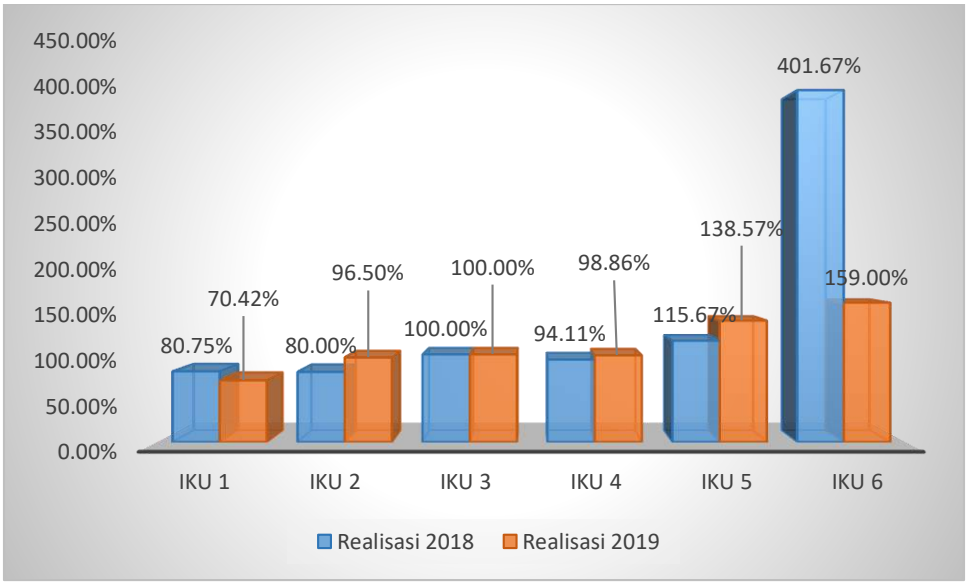

Gambar 9. Perbandingan Capaian BNPB Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan IKU

Tabel 4. Perbandingan Capaian IKU BNPB Tahun 2018 dan 2019

No	Uraian	2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase kabupaten/kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah	40%	32.30%	50%	35.21%
2	Persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	10%	8%	10%	9.65%
3	Persentase kejadian bencana yang ditangani (direspon)	100%	100%	100%	100%
4	Persentase kabupaten/kota rawan bencana yang memiliki ketersediaan logistik dan peralatan serta kemampuan teknis untuk kesiapsiagaan dan kedaruratan	55%	51.76%	90%	88.97%
5	Rata-rata peningkatan indeks pemulihan pascabencana	3%	3.47%	3.50%	4.85%
6	Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana	4 Jam	59 menit 45 detik	3 jam	1 Jam 13 menit

Selama periode renstra tahun 2015-2019, terdapat 2 periode IKU yaitu tahun 2015-2017 dan tahun 2018-2019. Rincian capaian kinerja 2015 - 2017 dapat dilihat pada lampiran. Untuk persentase perbandingan capaian IKU periode tahun 2015-2017 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

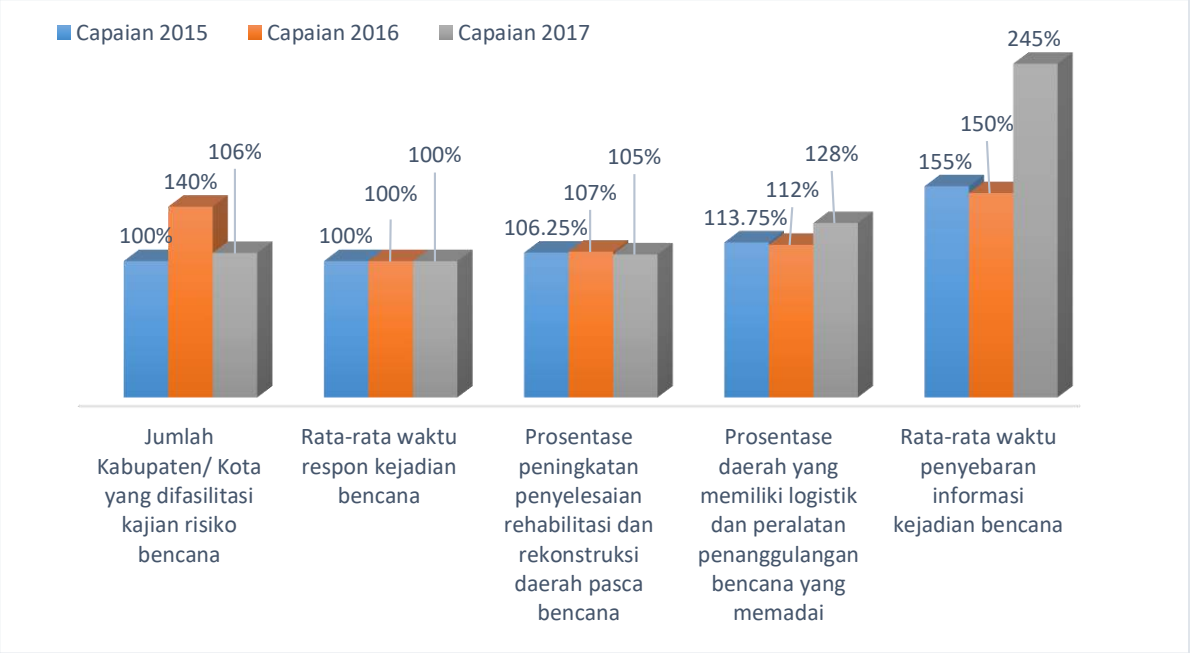

Gambar 10. Capaian IKU BNPB 2015 - 2017

Dalam periode RPJMN Tahun 2015-2019, BNPB mempunyai sasaran yang harus dicapai yaitu adalah **"Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang Berisiko Tinggi"**. Untuk mencapai hal tersebut, dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah (kabupaten dan kota) melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPB selama periode 2015 hingga 2019 dengan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat serta lembaga usaha. Untuk mengetahui penurunan indeks risiko bencana, dilakukan pengukuran indeks risiko bencana pada 136 kabupaten/kota sesuai dengan prioritas tahun 2015-2019 dengan menggunakan perangkat penilaian indeks kapasitas daerah melalui mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan perwakilan Kabupaten/Kota terkait. Pada tahun 2019, hasil pengukuran capaian penurunan Indeks Risiko Bencana di wilayah prioritas Nasional

adalah **132.69**. Secara lengkap, rekapitulasi hasil pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana periode tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam gambar dibawah ini

Gambar 11. Indeks Risiko Bencana Rata2 Prioritas Nasional 2015-2019

Berdasarkan hasil pengukuran yang tersaji dalam gambar diatas, *baseline* nilai indeks risiko pada 136 kabupaten/kota adalah tahun 2015 sebesar 169,5. Nilai tersebut turun pada tahun 2016 sebesar 149,4, tahun 2017 sebesar 143,5, tahun 2018 sebesar 135,8, dan tahun 2019 sebesar 132.69. Secara total penurunan indeks risiko bencana selama periode tahun 2015-2019 adalah sebesar 21.74%.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Selama tahun 2019, dari 6 IKU BNPB, 3 (tiga) IKU telah tercapai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan, 3 (tiga) IKU belum mencapai target. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat tahun 2019 dicapai melalui pelaksanaan program sebagai berikut:

Persentase Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah

Salah satu upaya BNPB untuk meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, adalah memfasilitasi Kabupaten/kota dalam mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah. Pembangunan disini adalah dengan menggunakan hasil kajian risiko bencana pada perencanaan program pembangunan di daerah baik dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah, maupun rencana tata ruang di tingkat kabupaten/kota.

Kajian risiko bencana dapat dilakukan dengan melihat sejarah kejadian bencana, maupun dengan kajian yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan beberapa aspek fisik dan sosial. Kajian risiko bencana melalui pendekatan sejarah kejadian bencana, dapat dilakukan dengan evaluasi catatan kejadian masa lalu seperti yang dihimpun dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) maupun catatan kejadian di daerah. Sedangkan kajian risiko bencana yang lebih komprehensif dilakukan dengan acuan pedoman yang diatur dalam Perka BNPB No. 2/2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Pemanfaatan kajian risiko bencana di Perencanaan pembangunan di daerah merupakan salah satu indikator BNPB tahun 2019. Untuk mendorong hal tersebut, pemanfaatan hasil kajian tersebut didorong dapat dilaksanakan dalam menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut berupa kegiatan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penilaian kapasitas daerah, dan penyusunan rencana kontinjensi. Kegiatan tersebut selain menghasilkan dokumen terkait perencanaan penanggulangan bencana didaerah, juga memberikan rumusan rekomendasi yang menjadi acuan perencanaan pembangunan didaerah yang tentunya telah mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana dimasa mendatang sebagai *outcome* kegiatan.

Dokumen RPB merupakan sebuah rencana induk daerah yang mampu menjawab persoalan setiap fase penanggulangan bencana serta merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Dokumen RPB ini menjadi kerangka efektif yang mampu menjamin pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rentang waktu 5 tahun. Sehingga dokumen RPB ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang menentukan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana didaerah.

Disamping sebagai sebuah dokumen perencanaan daerah, dokumen RPB juga diperuntukkan sebagai dasar penyusunan program pembangunan untuk penanggulangan bencana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merujuk pada perencanaan lainnya baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang bersangkutan. Alhasil, struktur perencanaan dalam dokumen RPB pun harus mengikuti aturan metode perencanaan daerah. Visi, misi, kebijakan, program dan fokus prioritas daerah dalam penanggulangan bencana yang ditetapkan bersama oleh berbagai SKPD sehingga menjadi suatu komitmen daerah juga tertuang di dalam dokumen RPB ini agar dapat saling bersinergi.

Selain dokumen RPB, upaya untuk memberikan acuan dalam perencanaan pembangunan, BNPB pada tahun 2019 juga mendorong strategi lain melalui program/kegiatan yang lebih sederhana, yaitu penyusunan rencana kontigensi dan penilaian kapasitas daerah (penilaian Indeks Kapasitas Daerah dan penilaian Ketangguhan Kota/*ScoreCard*). Program/Kegiatan ini juga mengacu pada hasil kajian risiko bencana untuk menyusun rekomendasi program/kegiatan penanggulangan bencana yang perlu dilakukan setiap Kabupaten/Kota terkait.

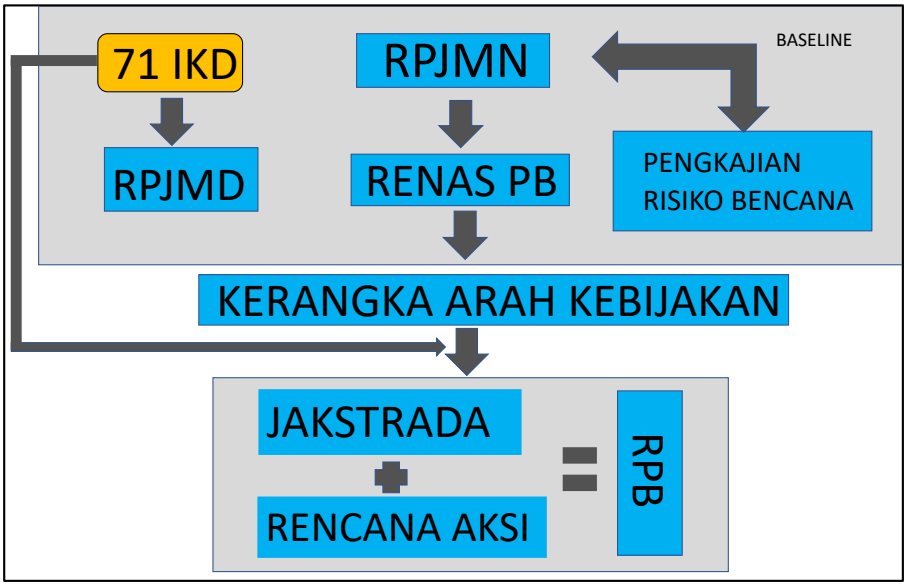

Gambar 12. Proses Penyusunan dan Analisis Rencana Penanggulangan Bencana

Berdasarkan IKU yang menjadi dasar pengukuran kinerja, maka jumlah kabupaten/kota yang memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana menjadi dasar pelaksanaan rencana kerja BNPB dengan mengacu pada lokasi kegiatan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Indikator penurunan indeks risiko bencana, serta program dan kegiatan yang mendukung peningkatan tingkat kapasitas sebagai upaya penurunan indeks risiko bencana.

Penetapan lokasi kegiatan sesuai dengan indikator kinerja utama "**Persentase Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah**" tahun 2019 memberikan prioritas pada 136 kabupaten/kota yang merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang mempunyai indeks risiko bencana tinggi dan sedang serta beberapa kabupaten/kota lain yang memiliki indeks risiko bencana tinggi. Adapun rincian kegiatan dan realisasi kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditentukan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya kapasitas ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah	50%	35,21%

Penetapan target jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah, adalah melalui dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang ditetapkan sebesar 50 % di tahun 2019. Persentase kinerja didapatkan melalui formula sebagai berikut:

$$Persentase\ daerah\ yang\ mengintegrasikan\ kajian\ risiko = \frac{181\ \text{kab/kota}}{514\ \text{kab/kota}} x100\%$$

Berdasarkan tabel tersebut, capaian realisasi kinerja jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah tahun 2019 sebesar 35.21% dari target 50% atau Kabupaten/Kota yang telah memiliki dokumen RPB dari tahun 2012 hingga tahun 2019 sebanyak 181 Kab/Kota dari total 514 Kab/Kota. Dokumen RPB ini tidak hanya dapat terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) namun juga dapat tersinkronisasi dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana ditingkat Pusat. Proses sinkronisasi diharapkan dapat memberikan keterpaduan upaya penanggulangan bencana di Indonesia.

Gambaran peningkatan nilai IKU dari tahun 2018 ke tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Utama	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah	40 %	32,30%	50%	35.21%

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target tersebut diantaranya:

a. Belum semua Kepala Daerah mempunyai komitmen untuk mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah
b. Pemerintah Daerah menyusun dokumen RPB dan Kajian Risiko Bencana (KRB) dalam waktu yang bersamaan atau lebih dahulu
c. Dokumen KRB dan Peta Risiko yang belum dipahami secara mendalam oleh Pemerintah Daerah
d. Minimnya ketersediaan data dan informasi serta efektifitas koordinasi dengan pemerintah daerah

Untuk itu ke depan beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam upaya percepatan pencapaian target adalah:

a. Menumbuhkan komitmen kepala daerah melalui diseminasi dan koordinasi intensif mengenai pentingnya mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah

b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan KRB kepada Pemerintah Daerah

c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah melalui pendampingan dalam pembuatan dokumen RPB bagi daerah yang telah memiliki KRB

d. Mendorong pemerintah daerah untuk melegalisasi dokumen RPB menjadi peraturan daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota, yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Adapun rincian Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah Tahun 2019, dapat dilihat pada lampiran.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BNPB dalam rangka memfasilitasi Kab/Kota untuk mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah selama tahun 2019 yaitu :

a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah suatu kerja bersama yang melibatkan banyak pihak. Bahkan UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa Penanggulangan Bencana menjadi urusan wajib terkait pelayanan dasar. Sejalan dengan itu, pada tahun 2018 diterbitkan PP No 2 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian disusul dengan ditetapkannya Permendagri No. 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan minimal tersebut adalah penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang merupakan bagian dari Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sangat penting untuk dilaksanakan oleh daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. SPM berkaitan dengan 2

(dua) dimensi yaitu layanan dan *costing*. Sebagai contoh dimensi layanan ialah mendapatkan informasi risiko bencana di tempat masyarakat tinggal. Sedangkan dimensi costing adalah standar dalam memenuhi layanan tersebut.

Penyusunan RPB juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, menyelaraskan peraturan, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan serta mencipatakan perdamaian. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan penyusunan RPB di daerah perlu juga ditanamkan mindset bahwa daerah perlu menyusun RPB sebagai salah satu upaya Pengurangan Risiko Bencana di daerah sehingga daerah tidak selalu berpikir *emergency response* dalam menghadapi bencana dan daerah menjadi tangguh dalam menghadapi bencana. Selain itu, RPB merupakan masterplan perencanaan pembangunan di bidang kebencanaan. Oleh karena itu, RPB perlu disusun oleh daerah agar daerah tangguh dalam menghadapi bencana. Penyusunan RPB dapat dilakukan secara mandiri ataupun dengan pihak ketiga baik rekanan maupun perguruan tinggi. Pada tahun 2019, kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana dilaksanakan di 7 kabupaten/kota prioritas RPJMN. Adapun rincian provinsi/kabupaten/ kota yang telah terfasilitasi penyusunan penanggulangan bencana dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar 13. Sebaran Lokasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Penyusunan dokumen RPB tahun 2019 merupakan lanjutan proses penyusunan Kajian Risiko Bencana tahun 2018. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada di suatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak risiko bencana. Tak hanya dalam bentuk spasial, hasil penyusunan kajian risiko juga disajikan dalam benntuk non spasial atau dokumen infomasi yang memperlihatkan tingkat risiko bencana suatu daerah. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam menyusun Pengkajian Risiko Bencana ini telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dengan sedikit penyesuaian dalam pengkajian kapasitas.

Kegiatan penyusunan RPB dilakukan dengan beberapa kegiatan salah satunya dengan pembekalan tim pelaksana, Penyusun dan Fasilitator RPB serta berbagi pengalaman dengan kabupaten/kota yang sudah melakukan penyusunan RPB secara mandiri salah satunya adalah Kabupaten Manggarai Barat. Fasilitator memberikan penjelasan bagaimana bukittinggi dapat menganggarkan program atau kegiatan penyusunan RPB tersebut dan bagaimana mekanisme integrasi RPB ke dalam RPJMD sehingga bukittinggi dapat menganggarkan program/kegiatan terkait dengan penanggulangan bencana baik di BPBD maupun di OPD lainnya. Pada proses penyusunan RPB di bukittinggi pihak yang terlibat antara lain pihak rekanan dan sektor OPD lainnya serta NGO/LSM lainnya terkait dengan kebencanaan. Selain itu, dalam pembekalan ini juga memberikan penjelasan bagaimana proses penyusunan RPB untuk tahun 2019 dan tahun yang akan datang. Pada tahun 2020, BNPB tidak akan menganggarkan untuk penyusunan RPB di Kab/Kota dikarenakan Kab/Kota diwajibkan untuk menyusun RPB sesuai dengan mandat SPM Kemendagri terkait kebencanaan.

Gambar 14. Dokumentasi kegiatan pendampingan dan bimtek RPB

Beberapa manfaat lanjutan kegiatan ini (outcome) adalah tersedianya dokumen acuan dalam penyusunan beberapa kegiatan strategis lainnya, diantaranya:

- Dokumen acuan penyusunan prioritas program pembangunan daerah sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang aman bencana di Kabupaten/Kota serta Provinsi terkait.
- Dokumen acuan Pemerintah dalam identifikasi kebutuhan program Nasional dalam upaya pengurangan risiko bencana.
- Rekomendasi dan masukan dalam penyempurnaan penyusunan NSPK pelaksanaan salah satu layanan yang dimandatkan PP No 2/2018 dan Permendagri 101 tahun 2018 terkait Standar Layanan Minimum

b. Rencana Kontijensi

Salah satu aspek dalam perencanaan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana adalah perencanaan kontinjensi. Perencanaan kontinjensi dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan yang menghasilkan dokumen rencana kontinjensi. Apabila bencana terjadi, maka rencana kontinjensi dapat dijadikan rencana operasi tanggap darurat setelah terlebih dahulu melalui kaji cepat. Perencanaan kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan dalam keadaan yang tidak menentu dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Rencana

kontinjensi ini diharapkan dapat membantu operasi penanganan bencana secara terpadu dan terkoordinasi antar sektor dan lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah terutama pada fase siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat,

Pada tahun 2019, kegiatan penyusunan rencana kontinjensi dilaksanakan di 28 kabupaten/kota prioritas RPJMN. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yaitu swakelola (7 lokasi) dan penguatan kelembagaan (21 lokasi). Penentuan lokasi kegiatan penyusunan rencana kontinjensi didasarkan pada hasil kesepakatan Musyarawah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Adapun rincian provinsi/kabupaten/ kota yang telah terfasilitasi penyusunan rencana kontinjensi dengan metode swakelola dan penguatan kelembagaan oleh BNPB tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 15. Sebaran Lokasi Penyusunan Rencana Kontijensi Tahun 2019

Tabel 5. Kab/Kota yang melakukan penyusunan rencana kontijensi tahun 2019

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jenis Ancaman pada Dokumen Renkon
1	Sumatera Utara	Simalungun	Longsor
2	Sumatera Utara	Deli Serdang	Banjir Genangan
3	Lampung	Kota Bandar Lampung	Gempabumi dan Tsunami
4	Jawa Barat	Cirebon	Banjir
5	Banten	Kota Tangerang	Banjir
6	Sumatera Utara	Langkat	Banjir
7	Bali	Badung	Longsor
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Longsor
9	Nusa Tenggara Timur	Belu	Banjir
10	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Banjir
11	Kalimantan Barat	Bengkayang	Banjir
12	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	Banjir
13	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	Banjir
14	Sulawesi Selatan	Kota Makasar	Banjir
15	Maluku	Maluku Tenggara	Gempabumi dan Tsunami
16	Maluku Utara	Halmahera Utara	Gempabumi dan Tsunami
17	Papua Barat	Teluk Wondama	Banjir Badang
18	Papua Barat	Teluk Bintuni	Banjir dan tanah longsor
19	Papua	Kota Jayapura	Banjir
20	Papua	Sarmi	Gempabumi dan Tsunami
21	Jawa Barat	Bandung Barat	Gempabumi
22	Jawa Barat	Kota Bekasi	Gempabumi
23	Jawa Tengah	Kendal	Banjir
24	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	Gempabumi dan Tsunami
25	NusaTenggara Timur	Ngada	Tsunami
26	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Gempabumi dan Tsunami
27	Papua Barat	Kota Sorong	Gempabumi dan Tsunami

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu metode pelaksanaan kegiatan yang melibatkan BPBD sebagai penanggungjawab operasional kegiatan dalam penyusunan rencana kontinjensi dan uji lapang kesiapsiagaan bencana. Penyusunan rencana kontinjensi dengan mekanisme penguatan kelembagaan bertujuan untuk memperkuat kapasitas BPBD dalam memahami dan

menginventarisasi sumberdaya yang dimiliki sehingga BPBD dapat mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana yang menjadi ancaman di wilayahnya secara optimal. Sedangkan uji lapang merupakan salah satu metode latihan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaku sesuai dengan bidang tugasnya dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Uji lapang bermanfaat untuk menguji PROTAP/SOP tanggap darurat yang telah disepakati, serta koordinasi lintas instansi yang dilaksanakan menggunakan skenario kejadian dan dampak bencana yang disusun sesuai potensi bencana.

Gambar 16. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi di beberapa Kab/Kota

Beberapa manfaat lanjutan kegiatan ini (*outcome*) adalah upaya untuk membangun dan meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana, yaitu:

- Dokumen Renkon sebagai dokumen perencanaan daerah dalam penanganan darurat bencana yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana operasi

- Dalam dokumen rencana kontijensi juga memberikan rekomendasi program/kegiatan pembangunan untuk melengkapi kekurangan kebutuhan sebagai upaya antisipatif terhadap ancaman mendatang.
- Pemerintah daerah sudah memiliki langkah-langkah antisipatif dalam mengorganisasikan sumber daya daerah pada saat keadaan darurat bencana

c. Penilaian IKD dan *ScoreCard*

Sasaran RPJMN 2015-2019 adalah untuk menurukan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2015-2019 yaitu PRB dalam kerangka pembangunan di pusat dan daerah, Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dan Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Terdiri dari 7 fokus prioritas yaitu perkuatan kebijakan dan kelembagaan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, Pengembangan sistem pemulihan pasca bencana dan 71 indikator pencapaian. Dari pencapaian 71 indikator tersebut, diperoleh nilai ketahanan daerah.

Tujuan dari penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk membantu kabupaten/kota dalam meningkatkan ketangguhan terhadap bencana secara sistematis dan terprogram, meningkatkan pemahaman dan mendorong komitmen pemerintah daerah dan nasional untuk menjadikan PRB dan ketangguhan bencana sebagai prioritas dalam pembangunan sesuai kerangka SFDRR dan tujuan 11 SDGs, membantu pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lain dalam menilai kebutuhan dan kapasitas mereka saat ini dan di masa mendatang, dan mempertemukan semua pemangku kepentingan untuk menyusun strategi-strategi dan tujuan-tujuan besar bersama dalam mengantisipasi, mengelola, mengurangi risiko dan kesiapsiagaan bencana dan iklim secara terpadu.

Fasilitasi kegiatan penilaian Ketangguhan Kota tahun 2019 dilakukan dengan menggunakan perangkat penilaian *Score Card* dan 71 Indikator IKD. Lokasi pelaksanaan difokuskan di Kota Ambon, Lumajang, Kediri, dan Kota Gorontalo. Selain itu, pada tahun 2019 juga dilakukan inventarisasi *ScoreCard* untuk Kabupaten/Kota yang juga melakukan penilaian secara mandiri. Proses penilaian dilakukan dengan metode *Focused Group Discussion* (FGD) didaerah dengan melibatkan perwakilan seluruh OPD terkait. Pendekatan pengisian perangkat penilaian dilakukan dengan pendekatan Self Assessment yang dilengkapi dengan bukti (*evidence based*).

Tabel 6. Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam penilaian ketangguhan daerah pada tahun 2019

No	Kab/Kota	Provinsi
1	Kab Lumajang	Jawa Timur
2	Kota Ambon	Maluku
3	Kota Kediri	Jawa Timur
4	Kab/Kota Se Gorontalo	Gorontalo

Kabupaten Lumajang mengapresiasi dukungan BNPB untuk memfasilitasi Kab Lumajang dalam Kota Tangguh dan IKD. Mengingat bahwa topografi Lumajang memiliki 3 gunung aktif dengan wilayah pantai selatan 71 km yang memiliki risiko tsunami. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bencana itu tidak bisa dilawan jadi kita harus bisa berdamai dengan bencana. Kabupaten Lumajang terpilih untuk melakukan penilaian ketangguhan kabupaten/kota yaitu Bupati Lumajang baru terpilih sehingga menjadi upaya BPBD Provinsi untuk mengenalkan penanggulangan bencana. Kedua, kinerja Kab Lumajang baik BPBD dan OPD nya dalam penanggulangan bencana sangat kolaboratif, dan ketiga, Lumajang sedang menyusun RPJMD sehingga harapannya dokumen RPB dan rekomendasi aksi penilaian ketangguhan kab. Lumajang dapat menunjang penyusunan RPJMD

Gambar 17. Penilaian Ketangguhan Daerah di Kabupaten Lumajang

Beberapa manfaat lanjutan kegiatan ini (outcome) adalah tersedianya dokumen acuan dalam penyusunan beberapa kegiatan strategis lainnya, diantaranya:

- Dokumen pendukung penyusunan laporan Indonesia kepada PBB terkait capaian implementasi Sendai Framework for DRR (SFDRR).
- Acuan rekomendasi penyusunan prioritas program pembangunan daerah sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang aman bencana di Kabupaten/Kota serta Provinsi terkait.
- Acuan Pemerintah dalam identifikasi kebutuhan program Nasional dalam upaya pengurangan risiko bencana didaerah.

Persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana

Capaian ini bisa terukur melalui indikator kinerja berupa persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Target yang ditetapkan dalam renstra 2019 untuk persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana yaitu sebesar 10 %.

BNPB mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, salah satu strategi yang digunakan untuk menwujudkan ini melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang Tangguh terhadap bencana. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan

Penetapan lokasi kegiatan sesuai dengan indikator kinerja utama "**Persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana**" tahun 2019 memberikan prioritas di desa yang berada di 136 kabupaten/kota yang merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang mempunyai indeks risiko bencana tinggi dan sedang. Kegiatan yang dilaksanakan pada lokasi dimaksud merupakan implikasi kajian risiko bencana dengan mengacu kepada 71 indikator penurunan indeks yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2019. Serta beberapa desa di kabupaten/kota lain yang tidak masuk dalam prioritas RPJMN namun memiliki indeks risiko bencana tinggi. Adapun rincian kegiatan dan realisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dengan mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya kapasitas ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	10 %	9.65%

Dalam pencapaian target yaitu jumlah meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana, ditetapkan sebesar 10 %. Prosentase kinerja didapatkan melalui formula sebagai berikut :

$$Persentase\ meningkatnya\ kapasitas\ masyarakat\ dalam\ PB = \frac{669 Desa}{6932\ Desa} x100\%$$

$$\frac{669}{6932} x\ 100\% = 9.65\%$$

Berdasarkan tabel tersebut, capaian realisasi kinerja meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana 2019 sebesar 9.65% dari target 10% atau meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana hingga tahun 2019 sebanyak 669 desa dari total 6932 desa. Rincian Rekapitulasi Desa Tangguh Bencana dapat dilihat pada lampiran. Perbandingan capaian tahun 2018 dan 2019 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja Utama	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	10 %	8 %	10%	9.65%

Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah

- Masih kurangnya pelibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana
- Masih kurangnya komitmen daerah dalam melakukan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, salah satunya mereplikasi pengembangan Desa Tangguh Bencana
- Belum masifnya pelibatan Lembaga usaha baik swasta, BUMN maupun UMKM dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- Pelibatan multipihak dalam penanggulangan bencana masih belum inkusif
- Fasilitator-fasilitator pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas

Beberapa faktor keberhasilan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana antara lain :

- Beberapa Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota mulai mengembangkan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan APBD nya
- Pemerintah Desa sudah mulai memahami tentang penggunaan dana desa untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana
- Meningkatnya peran serta dari para pihak (Pemerintah, Masyarakat/Komunitas, Akadmisi/Perguruan Tinggi, Media, dan Dunia Usaha) untuk menguatkan kapasitas masyarakat diwilayah kerja masing-masing
- Adanya Peran Perguruan Tinggi dalam PB melalui KKN Tematik Desa Tangguh Bencana.

Untuk itu upaya kedepan yang perlu dilakukan oleh BNPB diantaranya:

- Menumbuhkan komitmen kepala daerah untuk dapat melalukan replikasi destana di daerahnya masing-masing
- Menyiapkan modul-modul maupun panduan-panduan terkait dengan implementasi Desa Tangguh Bencana yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

- Memperbanyak fasilitator-fasilitator Desa Tangguh Bencana yang berasal dari desa yang bersangkutan sebagai upaya peningkatan keterlibatan multipihak dalam upaya pengurangan resiko bencana.
- Perlunya pelibatan lembaga usaha secara *massive* baik swasta, BUMN maupun UMKM dalam membangun kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelibatan multipihak yang inklusif dalam penanggulangan bencana untuk membangun sinergitas dan ketangguhan bangsa.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BNPB dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia selama Tahun 2019 yaitu :

a. Ekspedisi Desa Tangguh Bencana

Upaya yang dilakukan oleh BNPB dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Maksud kegiatan Destana adalah memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa untuk dapat mengenali ancaman, kerentanan dan kapasitas wilayahnya untuk dapat mengurangi dampak bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang akan terjadi di wilayahnya. BNPB mulai melaksanakan program Desa Tangguh Bencana pada tahun 2012 seiring terbitnya Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi, menghadapi bahaya, dan pulih dalam waktu singkat dari bencana.

Program Desa Tangguh Bencana telah dilakukan dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Target program destana tahun 2019 adalah 136 desa yang berada di kabupaten/kota yang yang merupakan daerah yang mempunyai indeks risiko bencana tinggi dan sedang . Pada tahun 2019 program Desa Tangguh Bencana dilakukan dengan menggunakan metode baru dalam pembentukan dan pengembangan destana yaitu Ekspedisi Desa Tangguh Bencana maka BNPB melakukan upaya pembentukan dan pengembangan destana melalui ekspedisi destana sehingga dapat menjangkau 512 desa yang berada di pesisir selatan pulau Jawa termasuk 136 desa (terlampir).

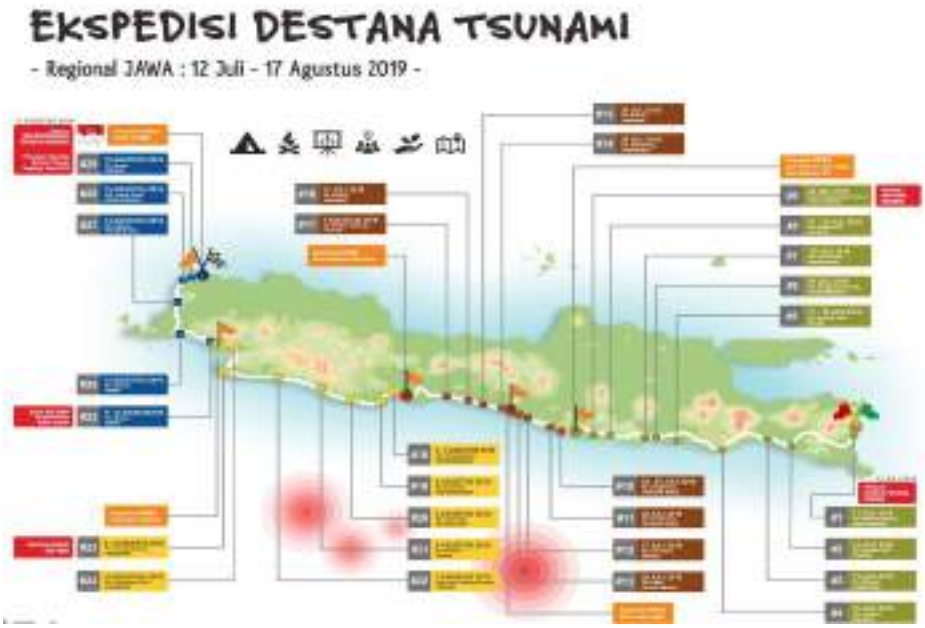

Gambar 18. Rute Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tahun 2019

Pelaksanaan Ekspedisi Destana ini dibagi menjadi 4 segmen yaitu Segmen Jawa Timur, Segmen DIY & Jawa Tengah, Segmen Jawa Barat, Segmen Banten. Ekspedisi destana ini melibatkan BPBD untuk mengkoordinasi multipihak (pentahelix) demi mensukseskan ekspedisi ini. BMKG, BSN, Kominfo, Kemendes, Kemendagri, dan lain-lain, berkontribusi melakukan berbagai sosialisasi kebencanaan selama ekspedisi. Pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan

lain-lain, turut bekerja bersama dalam ekspedisi ini. Selanjutnya, lembaga-lembaga masyarakat, seperti NGO, relawan, PMI, Baznas, MDMC, LPBI NU, Pramuka, RAPI, ORARI, Rumah Zakat, dan lain-lain, juga dikoordinasikan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, pasar dan komunitas-komunitas masyarakat. Lembaga usaha juga turut memberikan dukungan pada kegiatan ini. Sementara itu, akademisi seperti pakar perguruan tinggi lokal, FPT PRB, IABI, IAGI, dan lain-lain, bukan hanya turut serta dalam kegiatan sosialisasi, tetapi juga berkontribusi memfasilitasi kegiatan penilaian ketangguhan desa. Media massa pun dikerahkan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan selama Ekspedisi Destana Tsunami berlangsung.

Kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami merupakan pemicu/*trigger*, yang dibutuhkan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat di wilayah pesisir untuk dapat terlibat aktif dalam PB. Metode desiminasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat bisa memanfaatkan sistem yang sudah berjalan di masyarakat sehingga lebih mudah diterima dan dipahami. Mengunakan kesempatan pertemuan warga, pengajian, kegiatan karang taruna desa dan lain-lain. Kegiatan ngaji tsunami menjadi salah satu contoh desiminasi informasi yang bisa diduplikasi didaerah lain. Ekspedisi Destana tsunami dijadikan momentum untuk membangun mitigasi struktural, seperti yang dilakukan dengan pemasangan papan informasi, revitalisasi sirine dan pemasangan tanggul laut di Cilacap, juga mitigasi non structural, seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, relawan *goes to school*, relawan *goes to markets*, relawan *goes to community*, penanaman mangrove yang menjadi implementasi “kita jaga alam, alam jaga kita”. Kegiatan yang dilakukan selama ekspedisi ini antara lain

- Penguatan Aparatur Desa dan Babinsa/Babinkamtibmas dan Kecamatan. Kegiatan sosialisasi aparatur desa, dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan Babinsa/Bhabinkamtibmas dari 512 desa

- Penilaian Ketangguhan Desa

  Penilaian Ketangguhan Desa merupakan perangkat hitung ketangguhan desa melalui indikator-indikator dan komponen yang telah disusun. Modul digunakan untuk memudahkan dalam implementasi Desa Tangguh Bencana karena hasil dari pengukuran bisa menjadi *baseline* dalam intervensi Desa Tangguh Bencana sehingga tepat sasaran. Kegiatan penilaian difasilitasi oleh forum perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana (FPT-PRB) yang beranggotakan Perguruan Tinggi. Penilaian dilaksanakan oleh sebuah kelompok aparatur desa terdiri dari: Kepala desa/Lurah, Sekretaris Desa/ Kelurahan, Tokoh Desa/Kelurahan, Bhabinkamtibmas, wakil masyarakat umum dengan memperhatikan perwakilan gender dan penyandang disabilitas.

- Relawan *Goes to School*

  Kesadaran untuk mengenali bencana dan bagaimana menyelamatkan diri harus diperkenalkan sejak dini, maka diselenggarakanlah kegiatan Relawan *Go to School* ini. Relawan dengan berbagai latar belakang pengetahuan dan pengalaman membagikan ilmu yang mereka punya mengenai kebencanaan kepada siswa-siswa di sekolah. Materi yang disampaikan beragam tetapi semuanya memberikan bekal bagi para siswa yang jumlahnya mencapai lebih dari 1000 siswa ini untuk selamat dari bencana. Selain sekolah-sekolah relawan juga melakukan sosialisasi di pesantren, sosialisasi dikemas dengan pendekatan ceramah.

Gambar 19. Penilaian ketangguhan desa dan sosialisasi relawan ke pesantren

- Relawan *Goes To Community*

  Relawan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan Ngaji Tsunami di beberapa masjid seperti Masjid Jami Al-Khasanah, Jatimalang dan lain-lain. Selain ceramah agama, pengajian ini diisi pula dengan pemutaran film dokumenter tentang tsunami. Relawan juga melakukan sosialisasi kepada wisatawan dan pengurus penginapan yang berada disepanjang jalur pantai pulau Jawa. Sosialisasi juga dilakukan ke nelayan dan pasar/tempat pelelangan ikan sehingga masyarakat paham apa yang harus dilakukan ketika terjadi tsunami demi keberlangsungan usahanya.

- Pemasangan papan informasi

  Pemasangan papan peringatan tsunami dilakukan di pantai yang merupakan obyek wisata. Pemasangan papan ini merupakan salah satu upaya untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya tsunami, waktu yang tersedia untuk menyelamatkan diri dan cara evakuasi. Informasi-informasi tersebut harus disampaikan secara luas kepada semua pengunjung sepanjang Pantai.

Gambar 20. Pemasangan papan informasi dan pesta rakyat ekspedisi destana

- Revitalisasi Sirine EWS

  Setiap tanggal 26 setiap bulannya, secara serentak BPBD yang berada di sepanjang pesisir selatan pulau Jawa membunyikan sirine, sebagai bagian dari langkah kesiapsiagaan mengahadapi bencana tsunami, selain untuk memastikan alat *Early Warning System* ini aktif, namun juga untuk membiasakan masyarakat untuk memperhatikan dan peduli dengan keberadaan alat ini, dan tahu bagaimana meresponnya saat terjadi bencana.

- Diskusi Pakar

  Beberapa pakar yang terlibat adalah BMKG, IABI, Gubernur Jawa Tengah, BSN, dan lain-lain. Target *audience* diskusi ini adalah peserta ekspedisi, baik tim nasional, tim provinsi maupun tim lokal.

- Sarasehan Ketangguhan

  Sarasehan menyampaikan misi besar Ekspedisi Destana Tsunami yaitu memastikan bahwa masyarakat paham akan potensi ancaman tsunami yang ada di wilayahnya melalui rangkaian kegiatan sosialisasi, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

- Pesta Rakyat

  Kegiatan pesta rakyat merupakan salah satu upaya sosialisasi. Pesta rakyat dimulai dengan pemutaran film yang kemudian dilanjutkan dengan hiburan musik. Selama acara juga disampaikan pesan-pesan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat.

- Simulasi Tsunami

  Simulasi tsunami merupakan upaya yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih tanggap terhadap bencana. Relawan dan forum pengurangan risiko bencana desa bersama pemerintah setempat melakukan penyusunan rencana evakuasi dan peringatan dini, kemudian secara bersama sama dengan masyarakat melakukan gladi evakuasi dengan masyarakat setempat.

Gambar 21. Perkembangan dan Capaian Kinerja Desa Tangguh Bencana

Beberapa manfaat lanjutan kegiatan ini (*outcome*) adalah tersedianya dokumen acuan dalam penyusunan beberapa kegiatan strategis lainnya, diantaranya:

- Dokumen yang dihasilkan dari proses pelaksanaan baik pembentukan maupun pengembangan Destana bisa diintegrasikan dengan RPJMDes
- Dokumen Penilaian Ketangguhan Desa mencerminkan ketangguhan masyarakat desa dan dijadikan identifikasi awal (*gap analysis*) penerapan SNI 8357:2017 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh BSN untuk dapat dilakukan pendampingan menuju Desa Tangguh Bencana
- Pemanfaatan Dana Desa sebagaimana permendes dan permendagri tentang penggunaan dana desa untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

b. Pengembangan kapasitas Relawan

Selain Desa Tangguh Bencana upaya yang dilakukan oleh BNPB dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pengembangan kapasitas relawan. Masyarakat dan Lembaga non pemerintah dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk kerelawanan dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana

Relawan PB merupakan mitra penting pemerintah, khususnya BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Di satu sisi, relawan dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip sukarelawan, yaitu Panca Dharma. Prinsip ini mengikat para relawan bahwa mereka mandiri, profesional, solidaritas, sinergi dan akuntabel. Oleh karena itu, kapasitas sukarelawan menjadi perhatian BNPB untuk terus ditingkatkan, baik pendidikan dan keterampilan. Di sisi lain, relawan tidak hanya berperan pada saat tanggap darurat tertapi pada saat pra dan pascabencana, seperti upaya menjaga dan memperbaiki lingkungan.

Selama tahun 2019 dilakukan beberapa kegiatan terkait peningkatan kapasitas relawan dengan lokasi kegiatan di Bali, Bandung, Belitung.

Gambar 22. Kegiatan Temu Relawan

Tujuan pelaksanaan kegiatan temu relawan adalah :

1. Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, OPD dan relawan;
2. Bertambahnya pengetahuan, keterampilan, dan meningkatnya rasa sadar bencana pada peserta relawan; dan
3. Meningkatnya peran serta relawan pada tahap prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana.

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sudah lebih dari 44.300 relawan penanggulangan bencana yang terdata di BNPB. Dimana pada tahun 2018 relawan yang mendapatkan peningkatan kapasitas berjumlah 500 orang dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 800 orang. Relawan tersebut berasal dari berbagai organisasi yang ada di Indonesia. Sebagai media bertemu, berkumpul/berinteraksi dan berkoordinasi adalah Desk Relawan PB. Dalam hal ini Desk Relawan PB sebagai suatu titik di mana dua atau lebih subjek, organisasi/lembaga, dan lain-lain., bertemu dan berinteraksi. Disini Desk Relawan PB dapat menjadi penghubung dan media berinteraksi dalam PB, khususnya dalam penanganan darurat bencana yang seringkali melibatkan banyak sekali lembaga relawan (*affiliated volunteer*) dan bahkan termasuk relawan yang tidak punya

lembaga yang mewadahinya (*non affiliated volunteer*). Komunikasi, interaksi dan koordinasi yang lancar akan semakin memudahkan gerak langkah upaya PB sehingga dapat berjalan secara sinergis, cepat dan tepat pada sasaran.

Potensi Desk Relawan kedepannya sebagai berikut :

1. Relawan tidak hanya untuk tanggap darurat saja, mereka juga dapat diaktifkan untuk pengurangan risiko bencana (PRB), khususnya pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.
2. Relawan dapat dilatih secara teratur ketika tidak ada tanggap darurat.
3. Meningkatkan kompetensi relawan berdasarkan keterampilan dan minat.
4. Menganalisa data informasi kebutuhan dan ketersediaan logistik antara posko, dan tempat evakuasi.
5. Menghindari penumpukan barang di posko maupun tempat evakuasi.

c. Forum Pengurangan Risiko Bencana

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang terpadu dan terkoordinasi, maka perlu dipersiapkan pendekatan preventif-proaktif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta baik dalam aspek sosial, ekonomi dan ekologi (lingkungan alam dan buatan seperti bangunan gedung dan rumah) ke dalam suatu forum pengurangan risiko bencana.

Forum PRB sebagai mitra BPBD dalam mengelola risiko baik pada pra, saat maupun pasca bencana. Fungsi forum PRB sebagai wadah koordinasi multipihak dan fasilitasi dialog para pihak dalam menyusun strategi-strategi, menentukan prioritas dan langkah pengurangan risiko bencana di daerah dalam bentuk dokumen RPB dan RAD sebagai alat dalam pengelolaan

PRB didaerah. Forum PRB sebagai mekanisme memonitor dan mengukur pencapaian upaya pengurangan risiko bencana dan penyelenggaraan bencana (pra, saat, pasca) didaerah serta memfasilitasi pembelajaran terkait efektivitas dan pengembangan *system* penanggulangan bencana didaerah.

Pada tahun 2019 kegiatan inisiasi pembentukan forum pengurangan risiko bencana (PRB) telah dilaksanakan di Kabupaten Fak-Fak, Kota Cirebon dan Provinsi Kalimantan Utara. Forum PRB yang telah terbentuk sampai dengan tahun 2019 sebanyak 25 Provinsi dan 76 Kab/Kota. Selain itu juga dilakukan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Forum Pengurangan Risiko Bencana Se Indonesia yang mengusung semangat aliasi bersama untuk membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

Gambar 23. Rapat Koordinasi Nasional Forum PRB se-Indonesia

Beberapa manfaat lanjutan kegiatan ini (*outcome*) adalah

- Mengembangkan dan meningkatkan berbagai program/kegiatan/aksi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang relevan dengan upaya penguatan masyarakat
- Memperkuat keterlibatan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi atas perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana di daerah
- Memastikan pimpinan strategis daerah mempunyai visi dan komitmen terhadap penanggulangan bencana

d. Edukasi Kebencanaan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BNPB dalam rangka mendukung Program Desa Tangguh Bencana dengan memberikan edukasi

kebencanaan. Edukasi kebencanaan yang dilakukan pada tahun 2019 dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu edukasi kebencanaan melalui Satuan Pendidikan dan edukasi kebencanaan melalui pemahaman rumah tahan gempa.

- Edukasi melalui Satuan Pendidikan

Edukasi melalui Satuan Pendidikan dilakukan dengan menyiapkan modul edukasi bencana berbasis satuan pendidikan aman bencana melalui kemitraan dengan pramuka. BNPB melakukan gerakan satuan pendidikan aman bencana sejak tahun 2015 sebagai implementasi Perka BNPB No.12 tahun 2012 tentang penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana dan mendukung kampanye global satu juta sekolah dan rumah sakit aman. Sekolah sebagai salah satu fasilitas publik dan tempat kegiatan belajar mengajar perlu memperhatikan lokasi dan struktur bangunan yang aman dari bencana. Namun keterbatasan teknologi dan faktor-faktor lain menempatkan risiko kerusakan atau ancaman lain tetap ada. Sehingga perlu mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk memenuhi keamanan, tidak hanya yang bersifat struktur (fisik) maupun non struktur (kultural = penyadaran). Kondisi saat ini sebagian besar sekolah di Indonesia belum didesain aman terhadap gempa bumi, tsunami dan gunung api, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran untuk melakukan tindakan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan di sekolah. Satuan Pendidikan Aman Bencana bertujuan melindungi nyawa (*save more life*), keselamatan warga sekolah, dan menjaga agar sekolah/madrasah dibangun sesuai dengan ketentuan keamanan dan keselamatan, serta dapat menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan pada saat tanggap bencana. Kegiatan sekolah aman dilakukan melalui peningkatan kapasitas seluruh warga sekolah termasuk komite sekolah, orang tua siswa dan pemerintah desa. Sasaran utama Satuan Pendididikan Aman Bencana adalah:

- Memberikan perlindungan dan keselamatan ketika terjadi bencana kepada murid sekolah, guru dan tenaga lainnya
- Memastikan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah selama terjadinya bencana
- Melindungi investasi sektor pendidikan
- Memperkuat ketahanan terhadap bencana melalui pendidikan dan perilaku cerdas iklim

Edukasi kebencanaan diperlukan sebagai bekal agar peserta siap dan memiliki kapasitas menghadapi bencana. Dalam menindaklanjuti arahan tersebut telah ada langkah konkrit dari penandatangan MoU antara BNPB dan Kwarnas Gerakan Pramuka yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2019 di Sentul, Bogor.

Pada tahun 2019 dalam rangka mengaplikasikan MoU dengan Kwarnas Gerakan Pramuka maka diselenggarakan pembekalan pramuka dalam rangka implementasi satuan pendidikan aman bencana (SPAB) berbasis gugus depan dibeberapa daerah (lihat tabel). Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh fasilitator nasional dan fasilitator daerah yang telah mengikuti pembekalan dari BNPB. Permasalahan yang sering muncul adalah kegiatan ini belum menyesuaikan dengan jam belajar di sekolah.

Tabel 7. Lokasi Kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana Tahun 2019

No	Kab/Kota	Keterangan
1	Sukabumi	Pembina Gugus Depan di Kwartir Cabang Kab Sukabumi. Praktik di SDN Sriwijaya & SMAS Fardhiyatussaadah
2	Surabaya	Pembina Pramuka se Jawa Timur
3	Boalemo	Pembina Pramuka se Kab.Boalemo. Praktik di SD 01 Tilamuta & SMA Negeri 01 Tilamuta
4	Buleleng	Pembina Pramuka se Kab. Buleleng. Praktik di SDN 1 Kalibukbuk & SMK Triatmajaya
5	Bandung Barat	Pembina Pramuka Se Kab. Bandung Barat. Praktik di Lapangan Sesko AU,

No	Kab/Kota	Keterangan
		Lembang bersama 500 anak dari perwakilan SD di sekitar lembang, Kabupaten Bandung barat
6	Pangandaran	Pembina Pramuka Se Kab. Pangandaran. SDN 05 Pangandaran dan SMA Muhammadiyah Pangandaran
7	Bulukumba	Pembina Pramuka Se Kab. Bulukumba. Praktik di SD Negeri 198 Bira dan SMK Negeri 6 Bulukumba

Gambar 24. Implemantasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Berbasis Gugus Depan

Manfaat lanjutan (*outcome*) kegiatan ini diantaranya adalah terwujudnya replikasi pola edukasi kebencanaan di 40 sekolah lain disetiap Kabupaten/Kota dengan total implementasi edukasi kebencanaan berbasis gerakan Pramuka menjadi lebih dari 280 sekolah dengan keterlibatan peserta didik lebih dari 3.000 siswa (berkembang lebih dari 2.000% dari capaian output).

- Edukasi melalui Pemahaman Rumah Tahan Gempa

  BNPB juga melakukan pengembangan materi edukasi bencana melalui pengembangan aplikasi InaRISK Personal (berbasis smartphone) berupa penambahan fitur penilaian bangunan aman gempa. Penambahan fitur ini merupakan upaya untuk edukasi kepada masyarakat diawali dengan penilaian mandiri kondisi bangunan/rumah tinggal di kawasan bahaya gempa bumi sekaligus mensosialisasikan dan mengkampanyekan upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan bangunan/rumah yang memiliki struktur yang kuat dan aman terhadap gempabumi sehingga dapat meminimalisir dampak kerugian dari bencana yang ditimbulkan dan dapat diimplementasikan secara luas.

Uji coba edukasi penilaian Bangunan dilaksanakan di 8 lokus, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bandung, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Aceh Tengah. Penilaian bangunan berlangsung dari bulan Agustus hingga November 2019. Tabel di bawah menampilkan tanggal, jumlah desa dan fasilitator yang terlibat.

Tabel 8. Pelaksanaan Penilaian Bangunan 2019

No	Kabupaten/ Kota	Tanggal Pelaksanaan	Desa/Kelurahan Uji Coba	Fasilitator (orang)
1	Kota Yogyakarta	29 Agustus – 3 September 2019	1. Desa Purbayan 2. Desa Warungboto 3. Desa Brontokusuman	25
2	Kabupaten Sleman	29 Agustus – 3 September 2019	1. Desa Sidoarum 2. Desa Purwomartani 3. Desa Jogotirto	25
3	Kabupaten Gunung Kidul	29 Agustus – 3 September 2019	1. Desa Bunder 2. Desa Bandung 3. Desa Baleharjo	25
4	Kabupaten Bantul	29 Agustus – 3 September 2019	1. Desa Argomulyo 2. Desa Wonolelo 3. Desa Bangunharjo	25
5	Kabupaten Bandung	27 September – 1 Oktober 2019	1. Desa Sukamanah 2. Desa Pangalengan 3. Desa Margamulya	19

No	Kabupaten/ Kota	Tanggal Pelaksanaan	Desa/Kelurahan Uji Coba	Fasilitator (orang)
6	Kota Bengkulu	25 - 28 Oktober 2019	1. Desa Lempuing 2. Desa Tanah Patah 3. Desa Beringin Raya	25
7	Kabupaten Bengkulu Tengah	25 - 28 Oktober 2019	1. Desa Nakau 2. Desa Kembang Seri 3. Desa Taba Pasema	24
8	Kabupaten Aceh Tengah	5 – 7 Desember 2019	1.Kecamatan Kebayakan 2.Kecamatan Bebesen 3.kecamatan Jagong Jeget	26

Proses ujicoba dan edukasi dilaksanakan dengan melibatkan 100 fasilitator yang didampingi oleh BPBD setempat dan BNPB Penilaian dan edukasi bangunan tahan gempa dilakukan dengan menggunakan aplikasi InaRISK melalui fitur ACeBS yang memuat 47 pertanyaan bangunan aman gempa. Adapun hasil penilaian bangunan untuk seluruh daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 9. Hasil Penilaian Bangunan di 8 Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	(Jumlah Rumah)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Kota Jogja	269	195	163
2	Kabupaten Sleman	272	187	174
3	Kabupaten Gunung Kidul	348	208	95
4	Kabupaten Bantul	317	204	170
5	Kabupaten Bandung	214	146	78
6	Kota Bengkulu	114	126	84
7	Kota Bengkulu Tengah	73	120	143
8	Kabupaten Aceh Tengah	118	64	24
	Jumlah	1725	1250	931

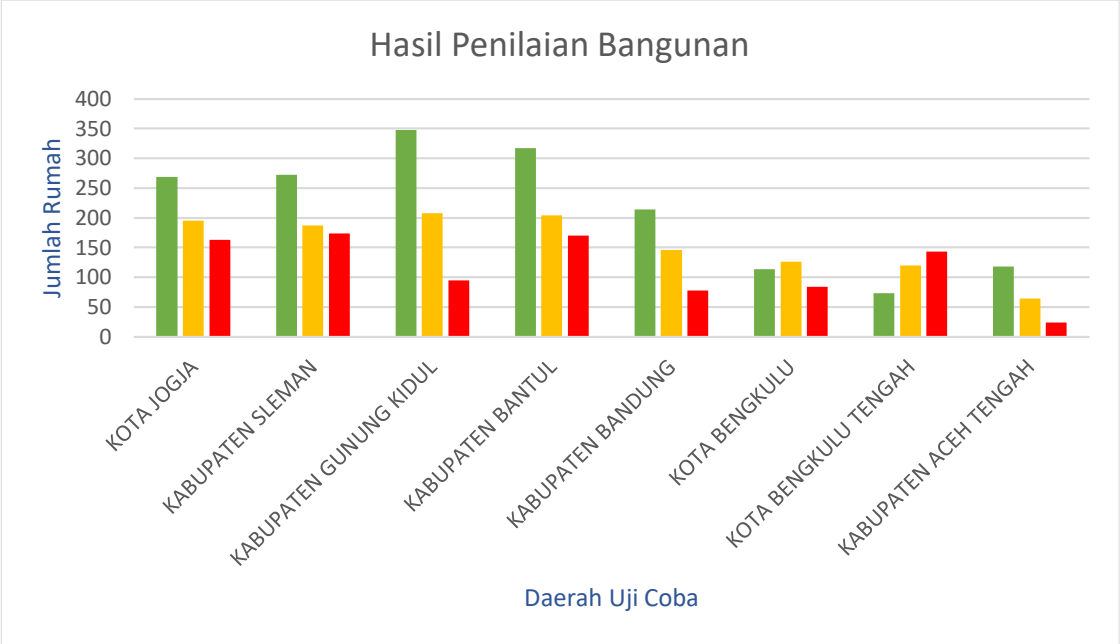

Gambar 25. Diagram Hasil penilaian bangunan di 8 kabupaten/kota

Manfaat lanjutan kegiatan ini (*outcome*) diantaranya adalah meluasnya pemanfaatan edukasi kebencanaan menggunakan aplikasi InaRISK yang semula dilakukan ujicoba dan sosialisasi di 8 Kabupaten/Kota meluas ke 24 Kabupaten/Kota lainnya.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kemampuan BNPB dalam merespon kejadian bencana

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kemampuan BNPB dalam merespon kejadian bencana tahun 2019 dicapai melalui pelaksanaan program sebagai berikut:

Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani (direspon)

Kejadian bencana di tahun 2019 telah terjadi sebanyak 3.814 kejadian, dengan sebagian besar disebabkan oleh bencana alam sebanyak 3.068 kejadian (80%) dan bencana non alam sebanyak 746 kejadian (20%). Dari 3.814 kejadian, pemerintah daerah

kabupaten/kota dan provinsi yang terdampak selalu hadir dalam rangka penanganan darurat bencana sesuai dengan dampak eskalasinya. Hal tersebut sejalan dengan pasal 5 UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah diwakili oleh BNPB dan Pemerintah daerah diwakili oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bencana terjadi berada di wilayah kerja BPBD sehingga Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD merupakan *first Responder* dalam penyelenggaraan penanggulangan apabila sebuah bencana terjadi. Tim Reaksi Cepat dari BNPB melakukan pendampingan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang terdampak.

Selama tahun 2019 BPBD telah merespon kejadian bencana sebanyak 3.520 kejadian bencana (database terekam di Dibi BNPB dan laporan harian Pusdalops). Sehingga perhitungan capaian kejadian bencana yang direspon selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$\frac{294\ (\text{BNPB})\ +\ 3520\ (\text{BPBD})}{3.814\ \text{Kejadian Bencana}}\ x\ 100\ \%\ =\ 100\%$$

Indikator kinerja utama (IKU) BNPB tahun 2018 – 2019 adalah menjadi persentase kejadian bencana yang berhasil ditangani (Direspon), seperti tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja 2019	Target	Capaian
Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani (Direspon)	100 %	100 %

JIka dibandingkan dengan capaian di tahun 2018, kinerja BNPB di tahun 2019 masih tetap dapat tercapai sesuai dengan target.

Indikator Kinerja 2018-2019	Target	Capaian 2018	Capaian 2019
Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani (Direspon)	100 %	100 %	100 %

Dari respon kejadian bencana yang telah dilakukan, tiga kejadian kejadian bencana yang paling banyak direspon adalah bencana banjir (71 kejadian), karhutla (47 kejadian) dan angin puting beliung (31 kejadian). Kejadian bencana lainnya yang direspon oleh BNPB dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

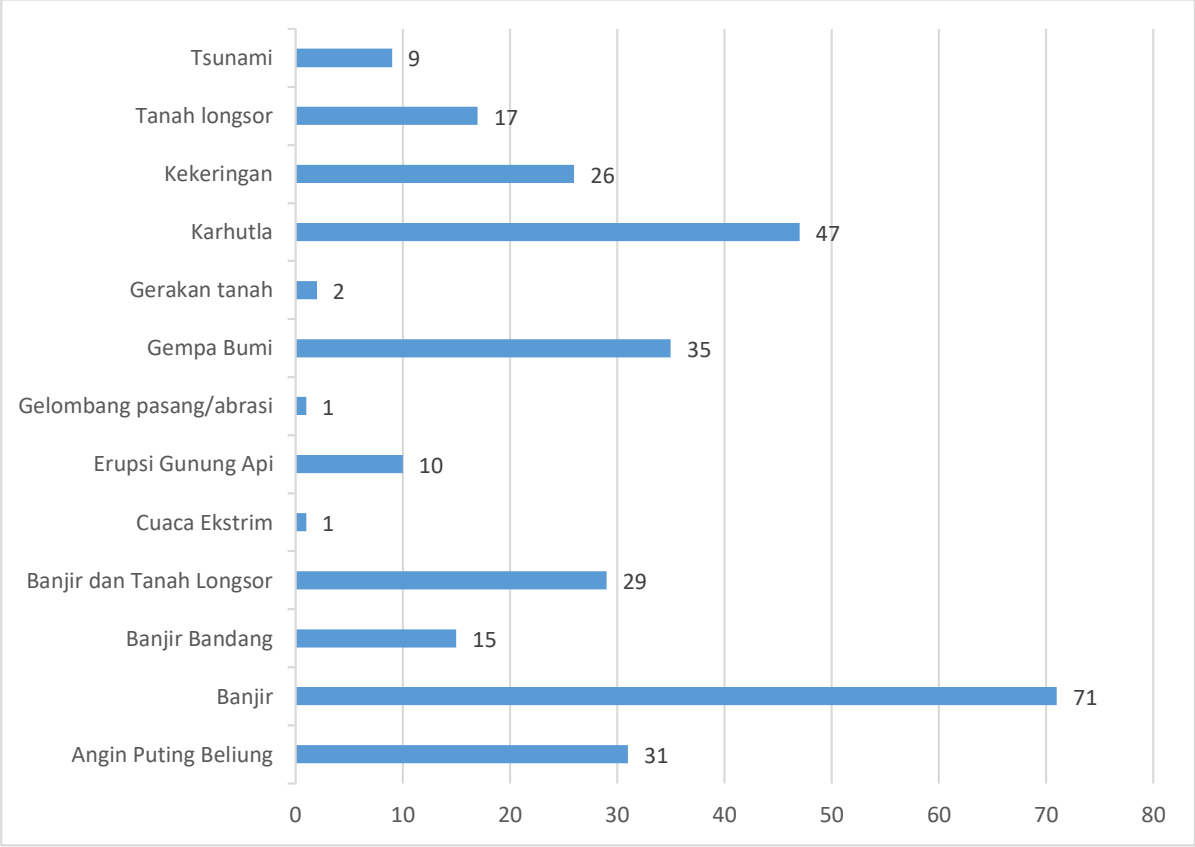

Gambar 26. Grafik 294 Kejadian Bencana Yang Direspon Tahun 2019

Untuk periode 2015-2017, keberhasilan BNPB dalam penanganan darurat dilihat dari kecepatan waktu respon kejadian bencana Rata-rata waktu respon kejadian bencana adalah rata-rata waktu dalam upaya pengerahan bantuan dan sumber daya penanganan darurat bencana pada awal informasi kejadian bencana yang diterima oleh Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB dari Pusdalops BPBD terdampak bencana hingga penanganan darurat bencana di lokasi bencana.

Indikator Kinerja 2015-2017	Target	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017
Rata-rata waktu respon kejadian bencana	1 hari atau 24 jam	1 hari atau 24 jam	1 hari atau 24 jam	1 hari atau 24 jam

Salah satu aspek yg dikerjakan dalam melakukan respon kejadian bencana adalah penyelamatan, pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana, yang dapat dilihat dari persentase jumlah korban yang selamat dalam setiap operasi penanganan darurat BNPB. Untuk menentukan prosentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana dan Prosentase Jumlah korban yang selamat akibat bencana dapat dinilai berdasarkan hasil Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dimiliki BNPB dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ korban\ yang\ tertangani}{Jumlah\ Korban\ yang\ terdampak}\ x\ 100\%$$

Dari data DIBI tahun 2019, korban meninggal dan hilang, berdasarkan data DIBI 2019 sebesar 589 jiwa, sedangkan korban terdampak dan mengungsi: 6.133.296 jiwa. Untuk korban yang tertangani adalah korban terdampak dan mengungsi dikurangi korban meninggal dan hilang. Secara ringkas yaitu:

Korban tertangani = 6.133.296 jiwa – 589 jiwa = 6.132.707 jiwa

$$\frac{6.132.707\ \text{jiwa}}{6.133.296\ \text{jiwa}} = \text{x}\ 100\ \% = 99{,}99\%$$

Persentase tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai memahami mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan demikian, masyarakat menyadari pentingnya menyelamatkan diri sendiri dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah korban baik luka-luka maupun meninggal dunia. Selain itu juga didukung dengan kerjasama dan koordinasi dengan K/L serta para pihak lain yang terlibat, sehingga tercipta sinergitas penanggulangan bencana. Disadari bahwa tanpa adanya dukungan dari *stakeholders* yang terkait kegiatan tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil diatas, BNPB bersama BPBD telah memenuhi target dalam merespon kejadian bencana yang telah terjadi selama 2019. Faktor-faktor keberhasilan capaian indikator ini antara lain

1. kelembagaan di daerah terutama BPBD dalam merespon bencana yang terjadi semakin meningkat kapasitasnya
2. adanya koordinasi intens antara pusat dan daerah tentang informasi bencana melalui pusdalops
3. koordinasi antar kelembagaan di daerah sdh mulai terbentuk
4. Hasil kaji cepat TRC daerah (BPBD) bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ditingkat pusat.
5. Meningkatnya pemahaman keterpaduan penanganan darurat dengan aktivasi pos komando penaganan darurat bencana

Respon Kejadian Bencana

Sepanjang tahun 2019 BNPB telah merespon sebanyak 294 kejadian bencana. Adapun rincian kejadian bencana yang direspon oleh BNPB dapat dilihat pada lampiran. Dalam melakukan respon kejadian bencana, beberapa hal yang dilakukan oleh BNPB yaitu:

a. Kaji Cepat

Kaji cepat dalam penanganan darurat bencana merupakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana

Kegiatan ini meliputi pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana pada waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu BPBD provinsi/kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan sektor terkait dalam penanganan darurat bencana.

b. Aktivasi Dan Manajemen Pos Komando Penanganan Darurat

Pendampingan Posko kedaruratan dalam rangka mendampingi daerah untuk memberikan petunjuk dan arahan, perintah serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang terkait dalam masa kedaruratan bencana di daerah yang terkena bencana pada saat penanganan darurat sehingga penanganan darurat bencana dapat dilakukan secara tepat, cepat dan efektif efisien.

Dengan adanya pendampingan posko tersebut dihasilkan :

- Keterpaduan / sinergitas penanganan darurat antar *stakeholder* penanganan bencana
- Kecepatan penanganan darurat dalam hal kemudahan akses
- Efektifitas penanganan darurat bencana
- Kemudahan akses informasi bencana
- Akuntabilitas penanganan darurat tercapai

c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemberian bantuan darurat bencana dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

Pemberian bantuan kebutuhan dasar dilakukan dengan melaksanakan kaji cepat bantuan kebutuhan dasar melalui penilaian kebutuhan secara cepat dan tepat pada saat setelah terjadi bencana terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya terkait dengan pemberian bantuan kedaruratan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana sesuai dengan standar minimal bantuan pada kondisi darurat bencana.

Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak hanya dilakukan oleh BNPB, melainkan juga dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana dapat mengurangi kerentanan selama penanganan darurat bencana.

d. Pendampingan Penanganan Pengungsi

Layanan Penanganan Pengungsi bertujuan untuk:

1) Menjamin terselenggaranya penanganan pengungsi yang dilakukan secara tepat, terpadu dan efisien;
2) Menjamin terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan pengungsi secara optimal; menjamin terselenggaranya penempatan pengungsi sesuai dengan standar pelayanan minimum dan;
3) Menjamin terselenggaranya pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan dalam pelayanan pengungsian menekankan kepada penempatan pengungsi, perlindungan dan pemberdayaan pengungsi serta kompensasi dan pengembalian hak pengungsi.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat korban bencana agar hidup aman, nyaman, bermartabat, dan memulihkan kembali fungsi sosial dan ekonomi selama di tempat pengungsian.

Kegiatan pendampingan dalam penanganan pengungsi berupa pengawasan/pendampingan bagi korban bencana/pengungsi maupun masyarakat yang terkena bencana untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya. Tahap terpenting adalah pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam penanganan pengungsi.

Bentuk pendampingan yang dilaksanakan antara lain :

1) Pelayanan kesehatan kepada pengungsi yang meliputi pemberian layanan konsultasi dan pemberian obat dari tenaga medis professional untuk keluhan kesehatan yang sering dialami seperti batuk, flu, demam, ISPA, penyakit kulit, hipertensi, asam lambung, dan lainnya. Gangguan kesehatan yang lebih berat akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan seperti puskemas atau RSUD.
2) Pelayanan psikososial di lokasi pengungsian diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok usia dan jenis kelamin prinsip dasar pemberian dukungan psikososial menggunakan pendekatan berbasis kelompok dan keterlibatan pengungsi secara aktif untuk membangun karakter yang kuat. Kegiatan psikososial antara lain pemberian sharing, brain gym berupa 4 gerakan PACE (*Positive, Active, Clear and Energizer*). Gerakan sederhana ini berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi otak.

e. Perbaikan Darurat Sarana Dan Prasarana Vital

Perbaikan darurat merupakan salah satu bagian proses dari operasi penanganan darurat. Kegiatan dalam perbaikan darurat meliputi: supervisi perbaikan darurat, supervisi pembersihan lingkungan, identifikasi pembersihan lingkungan, inventarisasi/verifikasi/identifikasi perbaikan darurat. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan fungsi dari prasarana dan sarana vital.

Dalam rangka melaksanakan perbaikan darurat, BNPB melibatkan stakeholder dalam penanganannya seperti Kementerian PUPERA, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, TNI, POLRI, PLN, Telkom, Pemerintah Daerah, PMI, NGO dan Lembaga Usaha.

Penyaluran Dana Siap Pakai Sebagai Dukungan Respon Kejadian Bencana

Dari pelaksanaan kegiatan terkait respon kejadian bencana, BNPB didukung dengan penggunaan dana siap pakai. Tahun 2019 BNPB telah menyalurkan Dana Siap Pakai sebesar Rp. 7,2 Triliun untuk penanganan bencana alam dan non alam (karhutla). Sebesar 49% DSP digunakan untuk penanganan bencana karhutla, 44% digunakan untuk bencana gempa bumi, dan 5% digunakan untuk bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah, sisanya digunakan untuk penanganan bencana angin puting beliung, banjir, kekeringan, tanah longsor dan lainnya, seperti pada grafik di bawah ini.

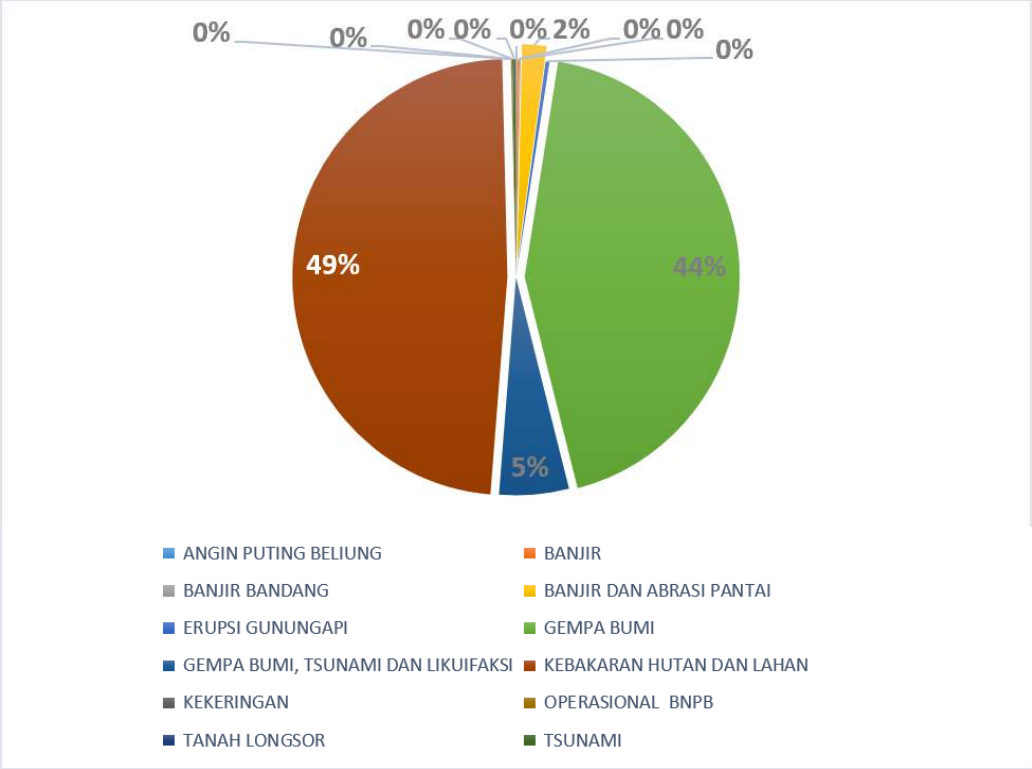

Gambar 27. Persentase Penggunaan DSP berdasarkan Jenis Bencana

Tabel 10. Penyaluran DSP berdasarkan jenis bencana tahun 2019

Jenis Bencana	Nilai DSP
Angin Puting Beliung	5.015.325.000
Banjir	14.827.531.120
Banjir Bandang	5.724.597.450
Banjir Dan Abrasi Pantai	132.563.685.714
Erupsi Gunungapi	21.599.510.080
Gempa Bumi	3.136.174.463.994
Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi	376.534.815.836
Kebakaran Hutan Dan Lahan	3.482.520.688.015
Kekeringan	1.334.292.500
Operasional BNPB	6.378.503.000
Tanah Longsor	250.000.000
Tsunami	20.024.448.358

Berdasarkan jenis belanjanya, BNPB menyalurkan DSP dalam bentuk tunai sejumlah 53,32 % untuk penanganan darurat bencana di Indonesia, Pengadaan jasa sebesar 44,68% dan pengadaan barang sebesar 2,01%.

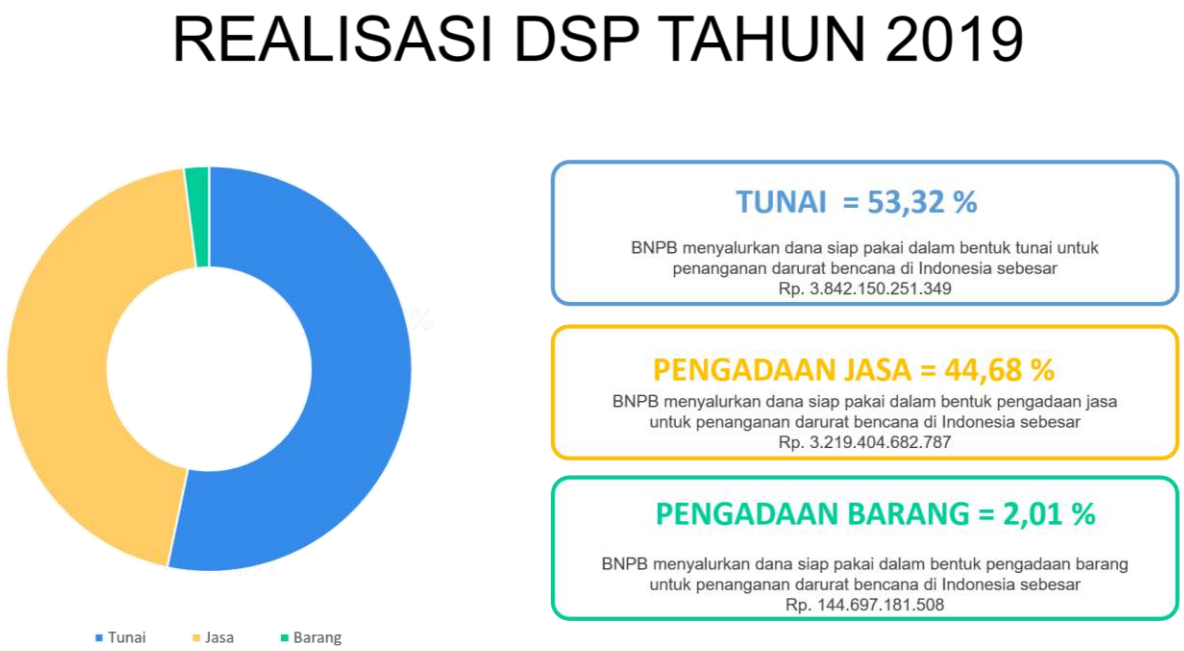

Gambar 28. Realisasi DSP Tahun 2019

Penanganan bencana prioritas di tahun 2019

1. Bencana Asap Akibat Kebakaran Lahan dan Hutan di 6 Provinsi di Sumatera dan Kalimantan

   Pada tahun 2019 ada 6 provinsi yang menetapkan status siaga darurat bencana asap karena kebakaran lahan dan hutan. Penatapan tersebut didasarkan adanya ancaman berupa terbakarnya hutan dan lahan terutama gambut di tiap-tiap provinsi yang didukung oleh kondisi meteorologi dan klimatologi wilayahnya yang mengakibatkan berkurangnya curah hujan dalam waktu yang lama, sehingga potensi kebakaran akan meningkat. Akibat adanya potensi bencana asap tersebut tentunya akan memberikan dampak pada kesehatan masyarakat, lumpuhnya aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan sehingga akan menyebabkan terganggunya kehidupan serta penghidupan sehingga akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Provinsi yang menetapkan siaga darurat bencana karhutla yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

   Pada rapat Koordinasi Nasional 6 Agustus 2019 di Istana, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan :

   1) Untuk memprioritaskan pencegahan. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kegiatan patroli terpadu untuk melihat potensi munculnya titik panas di sejumlah wilayah dalam area pemantauan.
   2) Untuk melakukan penataan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Tujuan dari penataan ekosistem gambut tersebut selain untuk menata lingkungan juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, Kepala Negara meminta untuk segera tanggap apabila menemukan titik api kecil sebelum nantinya meluas dan membesar.
   3) Segera mungkin padamkan api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar. Langkah-langkah *water bombing* yang kalau sudah terlanjur

besar itu juga tidak mudah. Tapi memang harus tetap dilakukan kalau api sudah besar.

4) Terkait penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, dilakukan dengan tanpa kompromi.

Dalam menjawab dan memastikan arahan Presiden tersebut berjalan, BNPB bersama Kementerian dan Lembaga terkait memiliki strategi:

- Memastikan agar lahan gambut tetap basah
- Membatasi alih fungsi lahan gambut
- Mencegah sedini mungkin terjadinya kebakaran dan pembakaran
- Mengerahkan semua sumber daya baik personil, peralatan, teknologi, managerial dan keuangan jika terjadi kebakaran sesuai dengan eskalasi dan potensi ancaman yang ada.
- Melayani kebutuhan kesehatan masyarakat jika eskalasi bencana asap membesar
- Melibatkan masyarakat sekitar sebagai potensi dan sumber daya untuk mencegah dan mematikan api jika terjadi kebakaran
- Menegakkan dan menindak secara hukum jika ada pihak-pihak yang secara sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan sesuai aturan perundangan yang berlaku.
- Menggencarkan sosialisasi tentang bahaya bencana asap dan larangan tentang pembakaran hutan dan lahan serta dampak yang akan diakibatkan.
- Menggencarkan dan mencari solusi untuk sistem pertanian dan perkebunan yang tanpa membakar lahan untuk proses pembersihannya.

Gambar 29. Gambar Pemadaman Kebakaran Hutan dan lahan melalui water bombing

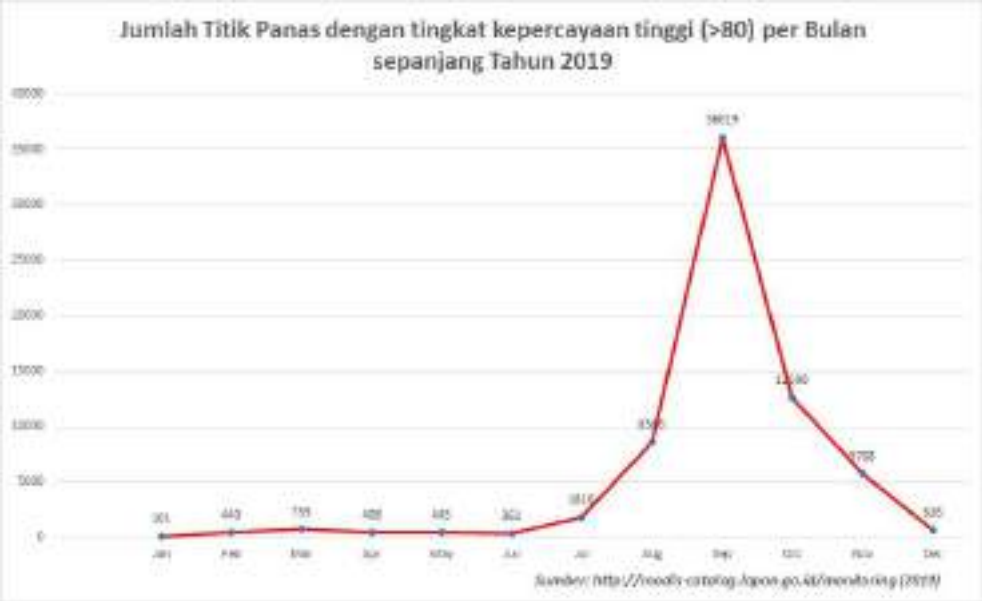

Gambar 30. Jumlah titik panas per bulan sepanjang Tahun 2019

Gambar 31. Grafik Jumlah Titik Hotspot per provinsi selama tahun 2019

Upaya BNPB dalam menghadapi situasi siaga darurat bencana asap yang diakibatkan kebakaran lahan dan Hutan di 6 Provinsi di Sumatera dan Kalimantan:

- Memberi pendampingan penanganan siaga darurat kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), berupa pendampingan ***Manajerial-Peralatan-Anggaran;***
- Aktivasi Pos Komando di provinsi dan kabupaten/kota yang terkoordinasi dengan PUSDALOPS BNPB;
- Menghadirkan dan membiayai aktivasi Operasi Udara (patroli udara, water bombing di Sumatera dan Kalimantan serta kegiatan TMC/Hujan Buatan di Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah);
- Memberikan dukungan pembiyaaan dalam pengorganisasian penanganan, pemadaman darat serta penegakkan hukum.
- Membentuk Satgas Siaga Darurat yang terdiri dari BPBD-TNI-POLRI-Tokoh Masyarakat sebanyak 9.072 personil di 6 Provinsi terdampak.
- Memberikan dukungan berupa peralatan untuk operasi penanganan karlahut

Selama tahun 2019, BNPB memberikan dukungan Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana asap akibat karhutla sebesar Rp. 3.536.312.748.191,-yang dimanfaatkan untuk memberikan dukungan operasi pemadaman melalui udara (*water bombing* dan TMC) dan dukungan operasional lainnya kepada daerah terdampak bencana asap serta pengerahan sumber daya manusia untuk operasi darat siaga darurat bencana asap. BNPB mengerahkan 53 unit helikopter berbagai jenis untuk *Water* Bombing guna mendukung pemadaman yang tidak dapat dijangku oleh Tim Operasi Pemadaman Darat. Untuk kegiatan TMC sebanyak 6 unit Fixed wings. Persebaran helikopter dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 32. Upaya BNPB/BPPT/TNI dalam menangani bencana karhutla melalui TMC

Gambar 33. Peta Sebaran Dukungan Udara Penanganan Asap Akibat Karthutla di Wilayah Sumatera dan Kalimantan tahun 2019

Sementara untuk kegiatan siaga darurat operasi darat, BNPB sudah mengerahkan sebanyak 9.072 personil dalam rangka patroli dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari TNI, POLRI, BPBD dan Tokoh Masyarakat.

Tabel 11. Personil Satgas Darat Penanganan Asap Akibat Karthutla di Wilayah Sumatera dan Kalimantan tahun 2019

NO	WILAYAH	TNI	POLRI	BPBD	MASY	JUMLAH	TMT
1	SUMSEL	1,000	205	102	205	1,512	9 JULI 2019
2	RIAU	1,000	205	102	205	1,512	10 JULI 2019
3	KALBAR	1,000	205	102	205	1,512	23 JULI 2019
4	KALTENG	500	205	102	705	1,512	25 JULI 2019
5	KALSEL	500	205	102	705	1,512	30 JULI 2019
6	JAMBI	500	205	102	705	1,512	8 AGUSTUS 2019
JUMLAH		**4,500**	**1,230**	**612**	**2,730**	**9,072**	**-**

Gambar 34. Upaya BNPB dalam menangani Bencana Kebakaran hutan dan lahan melalui operasi darat

Pada saat penanganan darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, BNPB telah berhasil mengevakuasi orang utan dengan menggunakan helikopter.

Gambar 35. Orang utan yang dievakuasi pada saat bencana kabut asap di wilayah Prov. Kalimantan Tengah

Dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana asap ini tentunya tak lepas dari tantangan yang ada, yaitu :

- Sulitnya air untuk pemadaman dikarenakan minimnya curah hujan sehingga banyak tubuh air (sungai, kanal, parit dan sebagainya) yang mengering .
- Sulitnya medan dan jauhnya titik api dari aksesbilitas jalan sehingga sumberdaya baik orang maupun peralatan susah menjangkaunya.
- Perlunya kontrol / pengendalian yang lebih ketat dalam operasi penanganan darurat terutama penggunaan helikopter untuk kegiatan *waterbombing.*
- Laporan masyarakat dinilai belum optimal sebagai informasi untuk dukungan operasi penanganan karlahut.
- Koordinasi dalam pelaksanaan rencana operasi gabungan antara operasi darat dengan operasi udara.

- Posko harus inklusif, mengingat adanya keterlibatan OPD/SKPD lain, bukan hanya BPBD dan TNI.
- Masih banyaknya praktek pembukaan lahan dengan membakar di masyarakat dan perlu tata kelola hutan yang lebih baik.

2. Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi NTB yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 06:47 WITA mengguncang pulau Lombok dan pulau Sumbawa dengan kekuatan 6,4 SR, disusul kembali dengan gempa berkekuatan 7 SR pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 19:46 WITA, lalu tanggal 19 Agustus 2018 gempa bumi berkekuatan 6,5 SR. Bencana alam gempa bumi di Provinsi NTB telah mengakibatkan sebanyak 564 jiwa meninggal dunia, 1.584 orang luka-luka dan 396.032 penduduk mengungsi. Sebanyak 222.530 unit rumah rusak yang terdiri dari 75.195 unit rumah rusak ringan, 32.829 unit rumah rusak sedang dan 114.506 unit rumah rusak berat. Nilai total kerusakan dan kerugian pada 7 kabupaten/kota adalah sebesar Rp.18.139.594.789,608,- yang terdiri dari kerusakan dan kerugian pada sektor permukiman sebesar Rp.13.297.509.230, sektor infrastruktur sebesar Rp.435.520.118.989, sektor sosial sebesar Rp.2.542.672.738.191, sektor ekonomi Rp.1.278001.912.013 dan lintas sektor sebesar Rp.585.890.296.185.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Presiden RI mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara barat. Dalam hal ini, BNPB telah menyalurkan dana siap pakai (DSP) untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta melakukan pendampingan untuk memastikan pemanfaatan dana dilakukan dengan benar dan tepat waktu sehingga dapat bermanfaat bagi

masyarakat secara berkelanjutan, segera terselesaikan dengan baik, tepat guna, tepat sasaran dan akuntabel.

Upaya penanganan darurat bencana gempabumi Provinsi NTB telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 360-611 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Provinsi NTB dengan masa 29 Juli-4 Agustus 2018 yang kemudian diperpanjang sampai tanggal 25 Agustus 2018. Pada Masa Tanggap Darurat ini dilakukan pendataan dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana. Selain itu, pada masa ini sudah mulai dilakukan pemulihan prasarana umum serta perbaikan rumah rusak menggunakan dana siap pakai (DSP). Pembiayaan perbaikan rumah melalui DSP ini diatur berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh BNPB.

Setelah Masa Tanggap Darurat berakhir, Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-686 tentang penetapan status Transisi Darurat ke Pemulihan dan Perbaikan Darurat yang terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan 26 Februari 2018 dengan prioritas penanganan kebutuhan dasar masyarakat pengungsi dan melanjutkan perbaikan prasarana dan sarana vital serta perbaikan rumah. Namun demikian, sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 360-645 Tahun 2019 bahwa masa Transisi Darurat ke Pemulihan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2019 dikarenakan target perbaikan rumah yang didanai melalui DSP belum selesai

Pada tahun 2019 upaya yang telah dilakukan dalam rangka penanganan darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu melanjutkan proses perbaikan dan pembangunan hunian tetap, yang pada tahun 2019 telah disalurkan bantuan sebesar Rp. 2.724.187.348.056,-, dari nilai tersebut sebesar Rp. 2.321.317.253.248,- adalah untuk bantuan stimulan rumah rusak.

Tabel 12. Data Penyaluran Dana Siap Pakai Agustus 2019 s.d Desember Tahun 2019

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT				
Update : 31 Desember 2019				
NO.	**KABUPATEN/KOTA**	**AGUSTUS 2018 S.D MARET 2019**	**OKTOBER 2019 S.D DESEMBER 2019**	**JUMLAH**
1	Kota Mataram	271.565.000.000	-	271.565.000.000
2	Kab. Lombok Barat	1.469.905.000.000	24.636.160.195	1.494.541.160.195
3	Kab. Lombok Tengah	452.440.000.000	20.940.000.000	473.380.000.000
4	Kab. Lombok Utara	2.076.540.000.000	234.100.000.000	2.310.640.000.000
5	Kab. Lombok Timur	449.865.000.000	296.550.000.000	746.415.000.000
6	Kab. Sumbawa Barat	169.505.000.000	119.521.093.053	289.026.093.053
7	Kab. Sumbawa	221.080.000.000	18.850.000.000	239.930.000.000
JUMLAH		**5.110.900.000.000**	**714.597.253.248**	**5.825.497.253.248**

Gambar 36. Infografis progress perbaikan rumah pasca gempa bumi NTB tahun 2018

Pada tahun 2019 dana stimulan perbaikan rumah dampak gempa bumi yang terjadi tahun 2018 telah disalurkan semua. Dari total rumah rusak sebanyak 188.863 unit, telah berhasil diselesaikan sebanyak 135.203 unit (71,6%) dan sisanya sebanyak 53.661 (28,4%) unit masih dalam tahap pengerjaan.

3. Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Banten dan Provinsi Lampung

   Bencana tsunami terjadi di Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018 malam. Penanganan pada saat tanggap darurat telah dilaksanakan dan pada tahun 2019, BNPB terus melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam upaya penanganan darurat penanganan untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

   BNPB sudah menyalurkan bantuan Dana Siap Pakai untuk penanganan transisi darurat ke pemulihan untuk Lampung Selatan sebesar RP. 6.868.023.352,-

4. Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi Sulawesi Selatan

   Pada bulan Januari 2019, bencana banjir terjadi di sebagian kabupaten/kota di Sulawesi Selatan antara lain Kabupaten Gowa, Sopeng, Takalar, Sidrap, Bantaeng, Selayar, Sinjai, Jeneponto, Maros, Pangkep, Baru, dan Kota Makassar. Puncaknya terjadi pada tanggal 22 Januari 2019. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi. Banjir melanda Jalan Trans Sulawesi di Maros lumpuh akibat terendam air hingga pinggang orang dewasa, 81 orang meninggal dunia, 1 orang hilang dan 4.440 jiwa terdampak. Sebanyak 14 unit rumah rusak ringan, 135 unit rumah rusak sedang dan 868 unit rumah rusak berat, serta 40 unit jembatan hanyut. Pada saat keadaan darurat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membangun jembatan darurat, membuka dapur umum dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta pembersihan material banjir dan longsor. BNPB melakukan pendampingan dan menyalurkan bantuan Dana Siap Pakai sebesar Rp. 650.000.000,-.

5. Penanganan Darurat Bencana Banjir Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara.

   Banjir dan tanah longsor di Konawe terjadi sejak Tanggal 5 Juni 2019. Banjir disebabkan curah hujan yang menentu dan faktor non alam seperti penebangan liar, menyebabkan meluapnya sungai Lahamuti, sungai Konaweeha dan Rawa Aopa sehingga Bendungan Wawatobi tidak mampu menampung aliran sungai Konaweeha. Banjir di Konawe mengakibatkan terjadi pengungsian sebanyak 7.998 KK / 32.824 jiwa puncaknya tanggal 16 Juni 2019, kerusakan rumah per 12 Juli 2019 sebanyak 290 unit hanyut, 772 unit rusak berat, 1.145 unit rusak sedang, 4.494 unit rumah rusak ringan serta 49 masjid terendam, 32 unit taman kanak kanak, 33 SD dan 11 unit SMP. Banjir di Konawe juga mengakibatkan beberapa jembatan rusak serta menggenangi lahan pertanian. Upaya penanganan darurat telah dilaksankan oleh pemerintah daerah dan BNPB mendampingi selama pelaksanaan penanganan darurat. BNPB menyalurkan Dana Siap Pakai sebesar Rp. 987.239.350,-

   Banjir di Konawe Utara terjadi pada tanggal 2-10 juni 2019 yang mengakibatkan 2.502 kk/9.609 jiwa mengungsi, 370 unit rumah hanyut, 2.132 unit rumah terendam dan 4 unit jembatan hanyut serta 4 unit rusak. BNPB pada saat keadaan darurat telah menyalurkan DSP sebesar Rp. 1.527.795.000 untuk operasional penanganan darurat. Sedangkan untuk pembangunan huntara, BNPB telah menyalurkan Dana Siap Pakai sebesar Rp. 14.641.541.000,-, untuk pembangunan huntara sebanyak 841 unit. Dari angka tersebut sebanyak 90 unit sudah selesai dibangun di Puusuli dan sudah ditempati oleh 80KK, 150 di Puuwonua, dan 80 unit di Tapuwatu.

Gambar 37. Progress Pembangunan Huntara

6. Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang Sentani, Kabupaten Jayapura

   Bencana Banjir Bandang Sentani di Wilayah Kabupaten Jayapura yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2019. Tercatat dampak yang ditimbulkan akibat banjir bandang tersebut yaitu 105 jiwa meninggal dunia, 17 jiwa hilang, 954 jiwa luka-luka, 835 jiwa mengungsi, 3.979 unit rumah rusak, dan 134 fasilitas umum rusak.

   Pada Tahun 2019 upaya yang sudah dilakukan dalam rangka penanganan darurat bencana banjir bandang dan luapan danau sentani di Kabupaten Jayapura yaitu penyaluran Dana Siap Pakai (DSP), untuk Kegiatan Penanganan Darurat sebesar

Rp. 8.408.333.500,-, Kegiatan Pendukung Rp. 1.113.470.000,-, Dana Tunggu Hunian sebesar Rp. 2.454.000.000,-, Belanja Administrasi Pendampingan dan Monev Pengungsi sebesar Rp. 250.000.000,- Pengolah Sagu sebesar Rp. 2.351.976.000,- dan Mesin Pengasap Ikan sebesar Rp. 625.000.000,-.

Gambar 38. Penyerahan Dana Tunggu Hunian

Action Plan penanganan darurat bencana banjir bandang Sentani sebagai berikut:

Tabel 13. *Action Plan* penanganan darurat bencana banjir bandang Sentani

No.	Kegiatan	Target Selesai
1.	Land Clearing (Pematangan Lahan 10 titik lokasi Relokasi (64 Ha) Rp. 6.977.638.000,- *DSP*	November 2019
2.	Pembangunan Hunian Tetap Usulan Pemkab Jayapura 3674 unit (DANA HIBAH RR)	Juni 2020
3.	Pengadaan 6 unit Mesin Sagu Portabel Rp. 1.996.500.000,- (Bantuan Dana Masyarakat)	Maret 2020
4.	Pembibitan 200.000 bibit Masohi Rp. 1.558.728.745 (Bantuan Dana Masyarakat)	Maret 2020
5.	Perbaikan 2 titik Jembatan Bailey di Kertosari dan Kemiri Rp. 1.059.493.000 (DSP)	November 2019
6.	Pengadaan 125 unit alat pengasap ikan : 25 unit BNPB Rp. 625.000.000,- 100 unit Bantuan Pemerintah melalui CSR PT. Freeport	Maret 2020

No.	Kegiatan	Target Selesai
7.	Bantuan 27 unit perahu Katamaran *DSP *	November 2019
8.	Pembangunan 1 Unit Pabrik Sagu *Bantuan Dana Masyarakat*	Akhir Juni 2020
9	Pembersihan Lingkungan 4 Lokasi Terdampak Banjir Bandang *DSP*	November 2019
10	Operasional Posko Transisi Darurat Ke Pemulihan Kab. Jayapura *DSP*	November 2019
11	Pendampingan & Pengawasan untuk Kegiatan Yang Dibiayai Bantuan Dana Masyarakat	

Progress penanganan darurat bencana banjir bandang Sentani, Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 14. Progres Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang Sentani, Kab Jayapura

No	Kegiatan	Nilai DSP	Keterangan
Kegiatan Penanganan Darurat		**8.408.333.500**	
1	Pelayanan air bersih & Penanganan Pengungsi	351.202.500	Kegiatan masih berlangsung
2	Pematangan Lahan Hunian Tetap 10 Lokasi	6.977.638.000	100 % (fisik & keuangan)
3	Pembangunan Jembatan Bailey di 2 Lokasi	1.059.493.000	100 % (fisik & keuangan)
Kegiatan Pendukung		**1.113.470.000**	
1	Pembersihan Lingkungan di 4 Lokasi	660.000.000	100 % (fisik & keuangan)
2	Monitoring & Evaluasi	93.600.000	100 % (fisik & keuangan)
3	Pendampingan Pematangan Lahan, Uang Lelah, & Uang Makan	335.445.000	100 % (fisik & keuangan)

No	Kegiatan	Nilai DSP (Rp)	Keterangan
1	DTH untuk 409 KK sesuai SK Bupati Jayapura 188.4/416 Tahun 2019 Tanggal 13 Desember 2019	2.454.000.000 Selama 12 bulan (April 2019 – Maret 2020) @500rb/KK dengan kategori rumah rusak berat	• Telah diserahkan untuk 12 KK oleh BPBD Kab. Jayapura • Pemkab Jayapura masih melakukan validasi bekerjsama dengan BRI sebagai penyalur bantuan
2	Belanja Administrasi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban dan Pengungsi	250.000.000	Kegiatan masih berlangsung dalam mendukung validitas penerima DTH

No	Kegiatan	Nilai DSP	Keterangan
1	6 Unit Pengolah Sagu yang terdiri atas: ▪ Bangunan Pengolah Hasil ▪ Peralatan Pengolah Sagu (mesin sagu) ▪ Pembuatan Sumur ▪ Transportasi Pengiriman	Rp. 2.351.976.000	▪ Sudah ditransfer tanggal 24 Januari 2020 ▪ Pelaksana Kegiatan Pemkab Jayapura
2	25 Unit Mesin Pengasap Ikan	Rp. 625.000.000	▪ Sudah ditransfer tanggal 24 Januari 2020 ▪ Pelaksana Kegiatan Pemkab Jayapura

7. Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Provinsi Maluku

Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Maluku yang terjadi pada tanggal 26 September 2019 Pukul 06:46 WIB mengguncang beberapa wilayah di Provinsi Maluku yaitu Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Gempa Bumi berkekuatan 6,5 SR dengan kedalaman 10 Km ini berada di 40 Km Timur Laut Ambon – Maluku.

Tercatat dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut yaitu 41 jiwa meninggal dunia, 228 jiwa luka berat, 103.301 jiwa mengungsi dan 10.902 unit rumah rusak.

Upaya penanganan darurat yang telah dilakukan :

- BNPB, Pemda (BPBD&Instansi terkait), TNI/Polri melakukan kebutuhan dasar pengungsi
- Melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan rumah dan fasum fasos
- Melakukan karya bhakti (pembersihan, trauma healing, sosialisasi dan pelayanan kesehatan) untuk perbantuan pemulihan pengungsi
- Pemasangan seismograf dengan rincian Pulau Ambon (4 titik), Pualu Haruku (1 titik), Pulau Saparua (2 titik) dan Pulau Seram (4 titik)
- Penyusunan *Action Plan* penanganan darurat bencana gempa bumi maluku
- Memastikan Keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah darurat
- Pelayanan kesehatan di RS Lapangan dan Pos Kesehatan tetap dilaksanakan
- Santunan bagi Korban Meninggal Dunia

Hingga akhir tahun 2019 upaya yang sudah dilakukan dalam rangka penanganan darurat bencana gempa bumi di Provinsi Maluku salah satunya adalah penyaluran Dana Siap Pakai (DSP), yaitu untuk Kegiatan Operasional Penanganan Darurat Bencana sebesar 8.045.697.000,-, *Cash for Work* dan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp. 11.170.250.000,- dan Dana Stimulan Rumah sebesar Rp.

233.392.750.000,-. Dana Siap Pakai yang disalurkan tersebut digunakan dibeberapa Kabupaten Kota yang terdampak.

Tabel 15. Penyaluran DSP di Provinsi Maluku

	Operasional PDB	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Jumlah
1	Provinsi Maluku	250.000.000	250.000.000	500.000.000	1.000.000.000
2	Kota Ambon	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
3	Kabupaten Maluku Tengah	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
4	Kabupaten Seram Bagian Barat	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
5	Kodam Pattimura			2.545.697.000	2.545.697.000
				Total	**8.045.697.000**

		Cash for Work	Dana Tunggu Hunian	Jumlah
1	Kota Ambon	407.750.000	918.000.000	1.325.750.000
2	Kabupaten Maluku Tengah	2.251.500.000	6.318.000.000	8.569.500.000
3	Kabupaten Seram Bagian Barat	375.000.000	900.000.000	1.275.000.000
			Total	**11.170.250.000**

	Stimulan Rumah	RB	RS	RR	Jumlah
1	Provinsi Maluku (pendampingan)			6.437.750.000	6.437.750.000
2	Kota Ambon	15.300.000.000	9.850.000.000	9.310.000.000	34.460.000.000
3	Kabupaten Maluku Tengah	52.650.000.000	61.350.000.000	44.460.000.000	158.460.000.000
4	Kabupaten Seram Bagian Barat	15.000.000.000	11.725.000.000	7.310.000.000	34.035.000.000
				Total	**233.392.750.000**

BNPB telah menyalurkan Bantuan *Cash for Work* dan Dana Tunggu Hunian kepada BPBD Kab/Kota terdampak, dan telah diteruskan kepada setiap kepala keluarga terdampak. Adapun dana stimulan rumah, disalurkan oleh BNPB kepada BPBD pada tanggal 31 Desember 2019, sehingga proses pembangunan hunian tetap akan dilakukan pada tahun 2020, sesuai dengan *action plan* yang telah disusun kabupaten/kota terdampak dan BNPB dibawah ini.

Tabel 16. *Action Plan* penyaluran Bantuan *Cash for Work* dan Dana Tunggu Hunian kepada BPBD Kab/Kota terdampak di Provinsi Maluku

No	Uraian Kegiatan	2019												2020																			
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penetapan SK Verifikasi rumah rusak																																
2	Penyerahan Proposal Bantuan Stimulan rumah dari daerah																																
3	Penyerahan SK Kepala Daerah Terdampak untuk penerima Bantuan Stimulan Rumah																																
4	Penyerahan DSP ke BPBD Kab/Kota terdampak untuk Bantuan Stimulan Rumah Rusak sebanyak 12.137 unit sebesar 233,3 M																																
5	Pelaksanaan Pembangunan Huntap, perbaikan rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan																																

8. Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Halmahera Selatan

Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2019 pukul 16:10 WIB mengguncang Provinsi Maluku Utara dengan kekuatan 7,2 SR dengan kedalaman 10 Km dari arah 62 Km Timur Laut Labuha, Maluku Utara. Tercatat dampak dari gempa bumi tersebut menyebabkan 14 jiwa meninggal dunia, 26.051 jiwa mengungsi dan 2.900 unit rumah rusak.

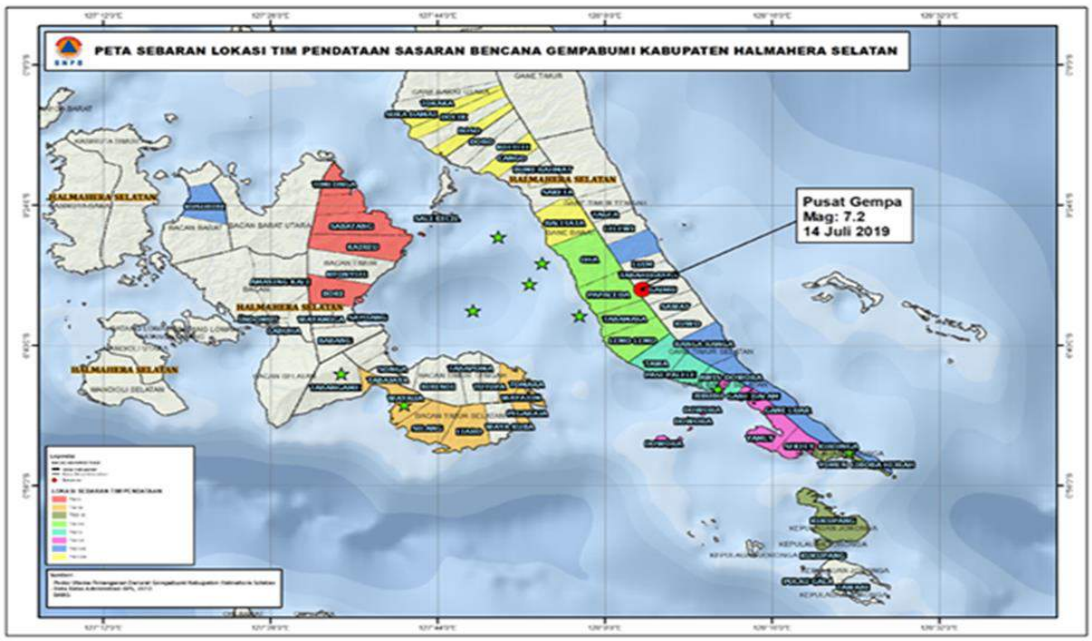

Gambar 39. Peta Sebaran Lokasi Tim Pendataan Sasaran Bencana Gempabumi Kab. Halmahaera Selatan

Pada tahun 2019 upaya yang telah dilakukan dalam rangka penanganan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu pendampingan Pemerintah Daerah dalam penanganan darurat bencana dan distribusi logistik dan peralatan serta pengerahan personil. Selain hal tersebut juga sudah dilakukannya penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) untuk percepatan penanganan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Dana Tanggap Darurat sebesar Rp. 500.000.000,-,kemudian ada penambahan sebesar Rp. 562.600.000,-. Selain untuk Tanggap Darurat juga ada Dana Tunggu Hunian sebesar Rp. 3.603.000.000,- dan Dana Pembangunan Hunian sebesar Rp. 91.335.000.000,-.

Dana tunggu hunian diberikan kepada korban bencana dengan rumah rusak berat sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap selesai dilakukan. Dengan adanya dana tunggu hunian diharapkan tidak ada pengungsi yang terpusat di satu titik pengungsian dalam waktu yang lama untuk menghindari masalah social ekonomi dan kesehatan yang dapat muncul. Para korban bencana dapat memanfaatkan dana tunggu hunian untuk sewa rumah sementara atau dapat sebagai pengganti biaya listrik dan air apabila tinggal bersama di rumah kerabat dan keluarga.

Dana stimulan untuk penanganan rumah baru ditransfer pada akhir Desember 2019, sehingga pembangunan rumah warga belum mulai dilaksanakan. Warga ditargetkan dapat menempati kembali rumahnya pada Juni 2020. Rencana pembangunan hunian tetap melalui dana stimulan bagi korban bencana gempa bumi di Halmahera Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 40. Rencana Penanganan Stimulan Rumah

Tantangan dalam penanganan darurat yaitu

a. Sinergi penanganan darurat daerah dan pusat dari pimpinan daerah selaku penanggung jawab utama dalam setiap penanganan darurat bencana sesuai eskalasi nya

b. Konsep Komando penanganan darurat masih belum sepenuhnya bisa memadukan semua sumber daya dalam rangka penanganan darurat, terutama di awal darurat bencana. Sehingga perlu pemahaman komprehensif dengan membuat sebuah sistem untuk dapat menjalankan konsep komando dengan baik. Selain itu, perlu kemudahan akses dalam penanganan darurat dimana hal ini menjadi tantangan di lapangan.

c. Pembiayaan penanganan darurat di daerah yang minim.

d. Adanya rentetan bencana besar membutuhkan sumber daya yang besar terutama dalam hal percepatan transisi darurat

Rekomendasi dalam menghadapi tantang penanganan darurat diantaranya:

a. Memberikan pemahaman dan penekanan ke pimpinan daerah untuk selalu menjadi penanggung jawab dalam penanganan darurat
b. Mensosialisasikan, melatihkan dan mengladikan sistem komando penanganan darurat ke semua stakeholder penanganan darurat secara berjenjang dan berkelanjutan
c. Mengkoordinasikan dan membuat SOP bersama untuk mempermudah akses ketika terjadi penanganan darurat, seperti mekanisme bantuan asing, percepatan pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya.
d. Mengkoordinasikan dan menekankan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong pemerintah daerah mau mengalokasikan sumberdaya khusus untuk penanganan darurat bencana sesuai ancaman di daerah masing-masing
e. Berkoordinasi untuk mempercepat pengkoordinasian dan pengerahan sumber daya untuk menyelesaikan proses transisi darurat

Persentase Kabupaten/Kota rawan bencana yang memiliki ketersediaan logistik dan peralatan serta kemampuan teknis yang memadai untuk kesiapsiagaan dan darurat bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mendukung pemenuhan Logistik dan Peralatan untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana provinsi di Indonesia. Dalam arti memenuhi kebutuhan logistik dan peralatan yang sesuai dengan standar minimal ketersediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Dukungan tersebut dimulai dari menginventarisasi seluruh kebutuhan terhadap Logistik dan Peralatan, pengadaan sampai dengan pendistribusian. Sebagai tindak lanjut pengadaan dan pendistribusian, agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan lebih optimal BNPB juga memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap penggunaan serta pemanfaatan logistik dan peralatan.

Pada Tahun 2019 BNPB telah mengadakan 9 (sembilan) Paket bantuan logistik dan 11 (sebelas) Paket peralatan yang akan didistribusikan ke BPBD dalam rangka Kedaruratan dan penguatan kelembagaan. Pemberian bantuan logistik dan peralatan dilakukan untuk mendukung kesiapan daerah dalam penanggulangan bencana. Kegiatan tersebut telah disinkronkan dengan RPJMN 2015 s/d 2019.

Untuk daerah prioritas RPJMN di 136 kab/kota berisiko Tinggi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka capaian distribusi telah mampu memenuhi kebutuhan Logistik sejumlah 109 BPBD Kab/Kota dan Peralatan sejumlah 133 BPBD Kab/Kota dengan capaian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kemampuan BNPB dalam merespon kejadian bencana	Persentase Kabupaten/Kota rawan bencana yang memiliki ketersediaan logistik dan peralatan serta kemampuan teknis yang memadai untuk kesiapsiagaan dan darurat bencana	90%	88.97%

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BNPB dalam rangka meningkatkan pemenuhan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana Tahun 2019 yaitu :

a. Distribusi Logistik dan Peralatan ke 136 Kabupaten/Kota Rawan Bencana (Prioritas RPJMN)

Selama kurun waktu tahun 2019, BNPB telah melakukan pemenuhan bantuan Logistik ke 109 BPBD Kab/Kota dan bantuan Peralatan sejumlah 133 BPBD Kab/Kota rawan bencana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17. Pemenuhan bantuan Logistik wilayah Prioritas RPJMN (136 BPBD Kab/Kota)

Tahun	Realisasi Distribusi		Target Distribusi		Capaian Distribusi		
	Peralatan	Logistik	Peralatan	Logistik	Peralatan	Logistik	Rata-rata
2015	111	50	136	136	81.62%	36.76%	58.19%
2016	118	129	136	136	86.76%	94.85%	90.81%
2017	129	83	136	136	94.85%	61.03%	77.94%
2018	131	87	136	136	96.32%	63.97%	80.15%
2019	133	109	136	136	97.79%	80.15%	88.97%

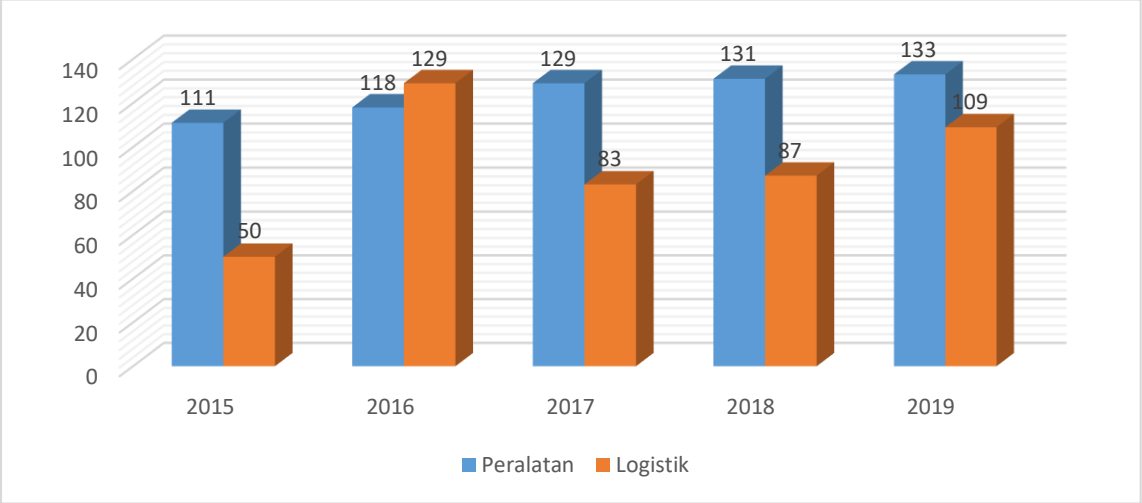

Gambar 41. Distribusi Logistik & Peralatan ke 136 kab/kota berisiko tinggi Tahun 2015 s/d 2019

b. Distribusi Logistik dan Peralatan ke BPBD Prov/Kab/Kota

Sampai dengan akhir tahun 2019 Pemerintah Daerah yang sudah membentuk BPBD sebanyak 512 BPBD. Dari total BPBD Prov/Kab/Kota tersebut yang telah menerima bantuan logistik dan peralatan rata-rata sebesar **39,02%,** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18. Jumlah Penerima Bantuan Logistik dan Peralatan

TAHUN	LOGISTIK (Prov/Kab/Kota)	% LOGISTIK	PERALATAN (Prov/Kab/Kota)	% PERALATAN	TOTAL	% RATA-RATA
2015	101	20,16%	501	100,00%	602	60,08%
2016	250	49,90%	253	50,50%	503	50,20%
2017	261	52,06%	383	76,45%	644	64,26%
2018	272	54,29%	257	50,39%	529	52,79%
2019	150	29.94%	241	48.10%	391	39.02%

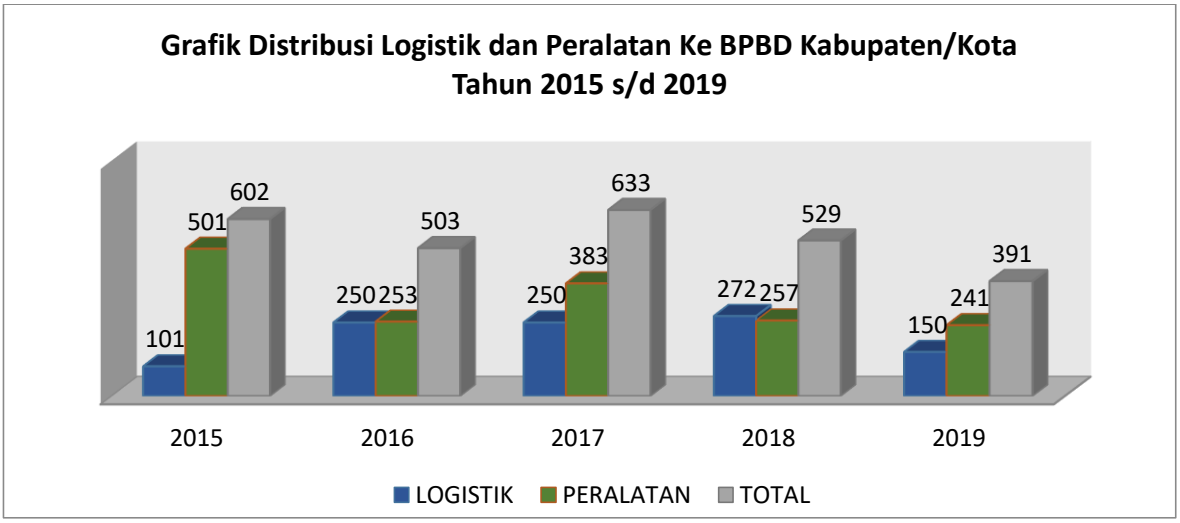

Gambar 42. Distribusi Logistik dan Peralatan dalam rangka Penguatan Kelembagaan BPBD Prioritas dan Non Prioritas RPJMN Periode tahun 2015 s/d 2019

c. Pelaksanaan Pemantapan Sistem Manajemen Logistik

Penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan penanganan secara terpadu antara pemerintahan, dunia usaha dan lembaga masyarakat untuk mengakomodir hal ini menjadi tanggung jawab BNPB. Dengan dibentuknya BNPB diharapkan pada saat terjadi bencana akan tercipta dinamika kerja yang

terstruktur dan dengan mekanisme yang jelas mulai dari koordinasi, komando dan pelaksanaan, karena dalam aturan tersebut BNPB memiliki ketiga fungsi tersebut. Penanggulangan bencana terdapat beberapa bidang yang harus ditangani antara lain bidang logistik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan, untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BNPB dan BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan. Agar terjalin koordinasi yang baik dalam melaksanakan sistem manajemen logistik perlu adanya rapat koordinasi untuk menyusun petunjuk pelaksanaan teknis penyimpanan dan pendistribusian.

d. Bimbingan Teknis Pengenalan Peralatan Kebencanaan

Peningkatan Kapasitas SDM di tingkat BPBD melalui kegiatan Peningkatan pengetahuan manajemen logistik dan Bimbingan Teknis Pengenalan Peralatan Kebencanaan, Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan Teknis PengoperasianPeralatan PB bagi personil BPBD. Selama kurun waktu tahun 2019, telah dilakukan 5 (lima) kali kegiatan Bimbingan Teknis Pengenalan Peralatan Kebencanaan tingkat Prov/Kab/Kota

Pelatihan Tenda Pengungsi

Pelatihan Mesin Perahu

Pelatihan Alat Pemadam Karhutla

Pelatihan Perahu Karet

Pelatihan Mobil Dapur Umum Lapangan

Pelatihan Water Treatment Portable

e. Kegiatan Lainnya

Dalam hal penganggulangan bencana, BNPB tidak hanya mendukung bantuan logistik dan peralatan, namun juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung sasaran strategis utama yang dituangkan kedalam bentuk kegiatan yang kesemuanya dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas BPBD dalam menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, diantaranya:

1. Kegiatan Inventarisasi Ketersediaan & Kebutuhan logistik dan peralatan bagi BPBD 33 Provinsi. Kegiatan ini untuk mengetahui kebutuhan logistik dan peralatan dari masing – masing BPBD, serta untuk mengetahui ketersediaan logisik dan peralatan di BPBD dari hasil kegiatan penilaian kebutuhan akan

menghasilkan data kebutuhan dari masing – masing BPBD, dan dari data tersebut akan dijadikan acuan pengadaan logistik dan peralatan di tahun mendatang;

2. Kegiatan gelar peralatan bertujuan agar BPBD memiliki kesiapan dalam menghadapi situasi darurat bencana, baik dari segi SDM nya maupun dari segi peralatan PB;
3. Pengadaan logistik dan peralatan, melalui kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan logistik dan peralatan yang akan disdistribusikan ke BPBD Prov/Kab/Kota untuk penguatan kelembagaannya;
4. Monitoring dan evaluasi logistik dan rekomendasi terkait Peralatan Bencana di 33 provinsi guna mengetahui hasil dukungan logistik dan peralatan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penyimpanan dan pemeliharaan peralatan PB.
6. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan K/L dan Forum Logistikdalam rangka mendukung kegiatan penanggulangan bencana dengan melibatkan Kementerian terkait, Organisasi non pemerintah yang bergerak dalam penanggulangan bencana dan dunia usaha seperti MDMC, PMI, PKPU, MER-C, LPBMI-NU, Dompet Dhuafa dan dunia usaha yang tergabung dalam Forum Logistik diantaranya ASPERINDO, ALFI, ALI, Kementerian Sosial, Bappenas.
7. Pelaksanaan Uji Coba Pemetaan Data Ketersediaan Logistik

   Pendataan ketersediaan logistik kebencanaan tersebut perlu didukung oleh sistem informasi yang terpadu agar tata kelola administrasi dalam manajemen logistik lebih dan data ketesediaan sumber daya tersebut dapat terpantau secara *real time*.
8. Evaluasi Kajian Gudang Regional

   Direktorat Logistik BNPB, memiliki program pemantapan manajemen gudang logistik regional. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk evaluasi dari Kajian Gudang Regional bahwa diperlukan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan petugas pengelola bantuan logistik di BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

9. Penguatan Sistem Manajemen Logistik di Daerah Rawan Bencana

   Penguatan Sistem Manajemen Logistik di Daerah Rawan Bencana dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM di daerah rawan bencana dengan melakukan sosialisasi, *sharing knowledge*, melalui pelatihan atau menjadi narasumber diberbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan penguatan sistem manajemen logistik di daerah rawan bencana.

f. Pemanfaatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Saat Terjadi Bencana

Pada saat masa tanggap darurat Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana senantiasa siap siaga untuk pemenuhan bantuan baik berupa logistik maupun peralatan penanggulangan bencana. Berikut ini adalah pemanfaatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat bencana:

Pemanfaatan Tenda Pengungsi	Pemanfaatan Mobil Dapur Umum Lapangan

Pemanfaatan Flexible Tank 	Pemanfaatan Mobil Tangki Air
Pemanfaatan Perahu Evakuasi 	Pemanfaatan Mobil Truk Serbaguna
Pemanfaatan Mobil Pick Up Maxi 	Pemanfaatan Mobil Toilet

Pemanfaatan Light Tower Portable 	Pemanfaatan Tenda Keluarga
Distribusi Bantuan Logistik 	Distribusi Bantuan Logistik
Distribusi Bantuan Logistik 	Distribusi Bantuan Logistik

Gambar 43. Kegiatan pemanfaatan dan distribusi bantuan logistik dan peralatan

Secara keseluruhan, capaian Kinerja BNPB dalam Pemenuhan Logistik dan Peralatan, sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan selaras dengan RPJMN, namun pemberian bantuan untuk 136 Kab/Kota Prioritas RPJMN tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perka BNPB No.5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan, Bab II mengenai penyelengaraan bantuan peralatan huruf A point 2 (dua) menyebutkan bahwa Peralatan diberikan kepada pemerintah daerah/BPBD dan/atau instansi/lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana dengan mempertimbangkan :
   a. Karakteristik bencana daerah;
   b. Prioritas RPJMN;
   c. BPBD yang sudah terbentuk sesuai PERDA (surat Sestama No.73/BNPB/SU/LP.02.03/1/2016);
   d. Ketersediaan peralatan;
   e. Mengajukan proposal permohonan bantuan peralatan dan logistik.
2. Terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota Prioritas RPJMN yang belum mempunyai BPBD, yaitu Kota Bandung, Kota Surabaya dan Kota Depok;
3. Terdapat 2 (dua) BPBD Kabupaten/Kota Prioritas lainnya yang belum mendapatkan bantuan Peralatan maupun Logistik yaitu BPBD Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Pangandaran.
4. Selama Periode tahun 2015 s/d 2019 hampir seluruh BPBD Kab/Kota Prioritas RPJMN telah mendapatkan bantuan Peralatan, sehingga Peralatan yang ada diprioritaskan untuk diberikan kepada BPBD Prov/kab/Kota yang lain, yang masih memerlukan bantuan guna memperkuat kelembagaannya;
5. Anggaran BNPB yang semakin menurun sangat mempengaruhi Jumlah pengadaan Peralatan dan Logistik yang akan diberikan ke BPBD,

Dengan terpenuhinya dukungan logistik dan peralatan, maka hasil yang diharapkan dapat tercapai adalah:

a. Semua pihak yang terkait dalam penanganan bencana baik Pemerintah Pusat (BNPB) maupun Pemerintah Daerah (BPBD) lebih siap, cepat dan tanggap dalam menghadapi ancaman bencana;
b. Dapat menguatkan kelembagaan penanggulangan bencana dalam sarana dan prasarana di BPBD daerah;

c. Dengan adanya penguatan berupa persiapan logistik dan peralatan di daerah, maka ketika terjadi bencana BPBD Propinsi/Kabupaten/Kota dapat mengantisipasi kejadian bencana atau dengan kata lain risiko bencana yang datang dapat dikurangi;
d. Untuk Kabupaten/Kota Prioritas RPJMN yang tidak mempunyai BPBD, agar dibuatkan kajian untuk membentuk BPBD sehingga Penanganan Bencana yang mungkin terjadi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat pascabencana

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat pascabencana tahun 2019 dicapai melalui pelaksanaan program sebagai berikut:

Rata-Rata Peningkatan Indeks Pemulihan Pasca Bencana

Indikator kinerja utama (IKU) BNPB untuk bidang rehabiltasi dan rekonstruksi pada tahun 2015 s.d. tahun 2017 adalah persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana, dengan rekapitulasi capaian tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Indikator	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017
Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	63.75	69.49	68.09

Pada Tahun 2018 (triwulan 3) dilakukanperubahan terhadap IKU BNPB yaitu menjadi rata-rata peningkatan indeks pemulihan pasca bencana. Target terhadap IKU BNPB mengalami peningkatan dari yang semula 3% pada tahun 2018 menjadi 3,5% pada tahun 2019.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2018		2019
		Target	Capaian	Target
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat pascabencana	Rata-rata peningkatan indeks pemulihan pasca bencana	3 %	3.47 %	*3.5 %*

Pemulihan berkaitan erat dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 pasal 57 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

a. Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
f. Peningkatan fungsi pelayanan publik;
g. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
h. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dilakukan dengan mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana.Terdapat beberapa sasaran dari penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu sasaran kelembagaan, sasaran operasional, dan sasaran substansial. Sasaran kelembagaan mencakup seluruh lembaga/institusi baik di tingkat pusat maupun daerah yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan, sasaran operasional adalah pemerintah dan masyarakat di daerah bencana mampu melaksanakan rehabilitasi

dan rekonstruksi dengan baik dan benar. Selanjutnya, sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup enam sasaran, yaitu aspek kemanusiaan, aspek perumahan dan permukiman, aspek infrastruktur pembangunan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lintas sektor.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No.6 Tahun 2017, dinyatakan bahwa manajemen penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan satu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan:

a. masukan (input) berupa Jitupasna;
b. proses (process) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi :
   1) penyusunan rencana dan penentuan prioritas;
   2) pengalokasian sumber daya dan dana;
   3) pelaksanaan;
   4) monitoring dan evaluasi; dan
   5) pelaporan;
c. hasil (output) yaitu hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
d. keluaran (outcome) yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat korban bencana dan lingkungan;
e. dampak (*impact)* terhadap pencapaian tujuan pemulihan dan rencana pembangunan daerah dan nasional

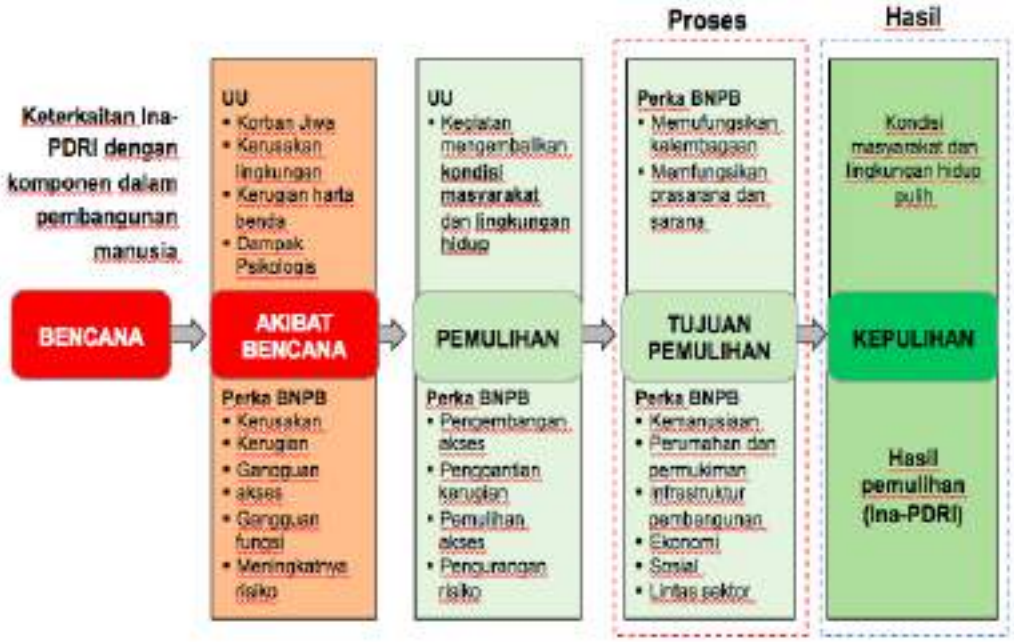

Gambar 45. Keterkaitan Pemulihan Pascabencana berdasarkan UU, Perka BNPB dengan Indikator Pembangunan Manusia

Gambar 44. Struktur Indikator pengukuran peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi

Dengan demikian, aspek pemulihan pascabencana berkaitan dengan komponen dalam pembangunan manusia, dengan tekanan pada indikator berfungsinya hasil pembangunan *(outcome).* Untuk mengukur keberhasilan atau kesuksesan suatu proses pemulihan pasca bencana terutama pencapaian sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi, maka perlu suatu bentuk evaluasi yang digambarkan melalui Indeks Pemulihan Pascabencana. Indeks pemulihan pascabencana adalah sebuah indeks untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kinerja atau keberhasilan proses pemulihan pada tingkat *outcome,* meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan di daerah terdampak bencana oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Pengukuran pemulihan pascabencana dibangun berdasarkan struktur keterkaitan aspek-aspek pemulihan dalam kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan manusia (welfare) pada posisi yang tertinggi. Kesejahteraan tersusun atas komponen pendidikan, kesehatan dan pendapatan (ekonomi). Komponen-komponen tersebut diukur dengan indikator pada tingkat impact, seperti yang digunakan di dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), yaitu (1) tingkat pengetahuan (2) tingkat kesehatan (3) tingkat pendapatan. Capaian komponen IPM yang tinggi diharapkan akan dapat memperluas pilihan-pilihan penduduk dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik lagi.

Aspek pemulihan pasca bencana yang akan dijadikan sebagai indikator dibangun berdasarkan dukungan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena itu, untuk menentukan indikator-indikator yang akan dipilih, maka keterkaitan berbagai aspek disusun dalam suatu struktur berikut ini: Berdasarkan struktur tersebut di atas, maka meningkatkan kualitas hidup masyarakat pascabencana disusun berdasarkan indikator pada tingkat outcome, yaitu mengukur hasil-hasil aktivitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan berdasarkan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan, dengan formulasi perhitungan

Formula untuk menghitung Ina-PDRI adalah :

$$\text{Ina-PDRIit} = \frac{Ni}{ni} \times \left(Apit \times Asit \times Aeit \right)^{3}; \; ni \neq 0$$

Keterangan

- Ina-PDRIit: Indeks Pemulihan Pasca Bencana Indonesia dari daerah i pada waktu t
- Ap : Indeks Pemulihan dari aspek pendidikan dari daerah i pada waktu t
- As : Indeks Pemulihan dari aspek kesehatan dari daerah i pada waktu t
- Ae : Indeks Pemulihan dari aspek ekonomi dari daerah i pada waktu t

Tingkat pemulihan yang diperhitungkan dalam Ina-PDRI *(Indonesia-Post Disaster Recovery Index)* dilihat dari perubahan (selisih) indeks sebelum dan sesaat setelah terjadi bencana dan sesudah bencana.

Capaian kinerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2019

Untuk mengukur keberhasilan atau kesuksesan suatu proses pemulihan pascabencana terutama pencapaian sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi, maka diukur peningkatan indeks pemulihan pascabencana.Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pemulihan Pascabencana – Indonesia *Post-Disaster Recovery Index* (Ina-PDRI) pada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang mengalami bencana masif pada tahun 2016 dan menjadi prioritas nasional dalam pemulihan pascabencana, maka diperoleh nilai rata-rata peningkatan Indeks pemulihan pascabencana sebesar 4,85%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Capaian 2019
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pascabencana	Rata-rata peningkatan indeks pemulihan pascabencana	3.5%	4.85 %

Secara garis besar, pemulihan pascabencana pada masing-masing daerah tersebut didominasi dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada urutan selanjutnya ditandai dengan pemulihan perumahan dan infrastruktur dan

peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi, perbaikan ekosistem dalam upaya pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dinilai masih belum optimal. Nilai peningkatan Indeks Pemulihan Pascabencana pada masing-masing daerah yang terjadi bencana masif tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini

Tabel 19. Hasil Perhitungan Indeks Pemulihan Pascabencana pada Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota, Provinsi	Kejadian Bencana Massif pada Tahun 2016	Nilai Rata-rata Peningkatan Indeks Pemulihan Pascabencana pada Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.	Kabupaten Pidie, Aceh	Gempabumi	3,32%
2.	Kabupaten Pidie Jaya, Aceh	Gempabumi	1,98%
3.	Kabupaten Bireuen, Aceh	Gempabumi	2,03%
4.	Kabupaten Garut, Jawa Barat	Banjir Bandang	8,72%
5.	Kabupaten Sumedang, Jawa Barat	Banir dan Longsor	6,64%
6.	Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat	Banjir Bandang	5,58%
7.	Kota Bima, Nusa Tenggara Barat	Banjir Bandang	5,67%
Rata-rata Peningkatan Indeks Pemulihan Pascabencana Tahun 2019			**4,85%**

Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan. Kesemuanya dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik dan lebih aman (*build back better and safer*) dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) serta diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi (Renaksi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

Sepanjang tahun 2019 setidaknya terdapat 7 bencana masif yang terjadi di Indonesia dengan total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 69,51 triliun. Bencana tesebut didominasi akibat gempa bumi dan banjir, disamping kebakaran hutan dan lahan dengan total kerusakan dan kerugian terbesar yaitu mencapai Rp 62,78 Triliun yang berdampak terhadap 6 provinsi. Kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir terjadi di 4 provinsi sepanjang tahun 2019 yaitu di Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara dan Bengkulu, sementara kerusakan dan kerugian yang timbul akibat gempa bumi terjadi diwilayah Maluku dan Halmahera Selatan

Gambar 46. Nilai Kerusakan dan Kerugian akibat bencana massif pada tahun 2019

Rangkaian proses penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan dilakukan melalui pengkajian kebutuhan pascabencana yang akan mengkaji akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pascabencana. Pengkajian kebutuhan pascabencana merupakan instrumen pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlandaskan pada informasi yang akurat dari para pihak yang terdampak bencana dan selanjutnya disusun dalam bentuk dokumen rencana aksi.

Hasil kajian akibat bencana yang dipadukan dengan hasil kajian dampak bencana melalui suatu proses triangulasi data dan informasi yang akan menghasilkan suatu rumusan hasil kajian kebutuhan pascabencana. Setelah melalui proses pengkajian, maka kebutuhan pascabencana disajikan berupa kegiatan, biaya yang dibutuhkan dan jangka waktu pelaksanaan pada setiap kegiatan. Kebutuhan pascabencana dikelompokkan menjadi kegiatan perbaikan atau pembangunan kembali, penggantian kerugian, penyediaan bantuan atau dukungan akses terhadap kebutuhan dasar, kebutuhan penunjang penyelenggaraan kembali proses dan fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan serta kebutuhan penguatan yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat dan pemerintahan dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Fasilitasi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan kegiatan dalam rangka memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah khususnya BPBD dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di beberapa wilayah terdampak bencana.

Pada Tahun 2019 telah direalisasikan 2 kali penyaluran dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penyaluran hibah pertama melalui penandatangan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2019, kepada 1 Provinsi dan 4 kabupaten/kota yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 20. Daftar Penerima Hibah RR 2019 Tahap I

NO	DAERAH PENERIMA	NILAI HIBAH
1	Kota Palu	Rp820,653,280,000
2	Kabupaten Sigi	Rp568,663,780,000
3	Kabupaten Donggala	Rp516,780,890,000
4	Kabupaten Parigi Moutong	Rp66,361,850,000
	TOTAL	**Rp1,972,459,800,000**

Penyaluran hibah tahap kedua melalui penandatanganan PHD yang dilaksanakan di daerah masing-masing pada Bulan Desember 2019 kepada 149 Pemerintah Daerah terdampak bencana sektor tertentu. Dari 149 daerah penerima tersebut, 127 daerah telah menerima penyaluran hibah dengan total anggaran sebesar Rp.1.187.768.746.000,- terdapat 2 daerah tidak mengambil dana hibah dan 20 daerah gagal tersalurkan dikarenakan masalah administrasi dan waktu penyaluran yang sangat bertepatan dengan akhir tahun anggaran.

Pendampingan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pelaksanaan rehabilitasi dan rerkonstruksi yang menyeluruh maka BNPB melakukan Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang meliputi pendampingan fisik maupun sosial ekonomi. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pendampingan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang fisik meliputi pendampingan mulai dari awal penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P), pemilihan prototipe rumah, pelaporan progres pemanfaatan hibah, pendampingan verifikasi dan validasi *by name by address* penerima bantuan rumah serta pendampingan proses pembangunan rumah mulai dari pembentukan pokmas, pembukaan rekening, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pelaporan.

Pendampingan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat di wilayah pascabencana sehingga mampu memulihkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan serta kesejahteraannya. Kegiatan Pendampingan Ekonomi ini dilaksanakan di daerah sangat dinamis dan kondisional, mulai dari sosialiasi, pemilihan site lokasi, kajian kebutuhan, pembentukan dan penguatan kelompok, pelatihan (pengorganisasian, teknis produksi dan kewirausahaan), forum musyawarah/FGD dan pemberian stimulan alat dan bahan, serta perumusan *exit* strategi usaha untuk menjaga keberlanjutan program.

Gambar 47. Proses Pelaksana Pendampingan Ekonomi Tahun Anggaran

Selain pendampingan ekonomi, salah satu strategi pemulihan sosial ialah melakukan pendampingan sosial berbasis komunitas. Program ini mengutamakan partisipasi anggota masyarakat dimana masyarakat memainkan peran penting dalam setiap langkah intervensi yang direncanakan. Oleh karena banyaknya permasalahan sosial yang meliputi subsektor kelembagaan sosial, psikososial, seni-budaya, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan bangunan atau peninggalan bersejarah akibat bencana yang harus ditanggulangi, maka BNPB perlu melakukan pendampingan sosial untuk memulihkan masyarakat korban terdampak bencana. Mekanisme pelaksanaannya sebagaimana terdapat pada gambar berikut :

Gambar 48. Skema Pendampingan Sosial

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pendampingan sosial di wilayah pascabencana dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Upaya ini diwujudkan dalam rangka menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi, termasuk di wilayah pascabencana.

a. Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah

Bencana gempabumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018 lalu menyebabkan kerugian yang luar biasa di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong. Total kerugian dan kerusakan akibat bencana gempabumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah (Sulteng) mencapai Rp22,51 triliun. kerugian tidak hanya dipicu oleh magnitudo gempa tetapi juga fenomena tsunami dan likuifaksi dengan skala dampak yang besar. Berdasarkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun oleh kabupaten/kota terdampak kebutuhan anggaran untuk pembangunan kembali Sulteng yang lebih baik mencapai Rp36 triliun.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah. masa pemulihan ditargetkan selesai 31 Desember 2020. Pembangunan kembali atau rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan fokus pada 5 (lima) sektor yaitu perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor dengan melibatkan seluruh stakeholder dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri. Masa transisi darurat ke pemulihan telah berakhir pada tanggal 24 April 2019 dan saat ini masuk dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Berdasarkan kegiatan Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Bidang Fisik di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dilaksanakan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh tim pendamping adalah:

a. Menjadikan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai acuan bagi pemerintah/pemda/donor dalam perencanaan dan penganggaran berdasarkan skala prioritas.
b. Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mempermudah dan mempercepat proses pemulihan.
c. Pemerintah melibatkan Kementerian/Lembaga memberikan pendampingan dan fasilitasi terhadap pemerintah daerah terdampak di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai salah satu upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
d. Khusus untuk pemulihan ekonomi diperlukan dukungan percepatan antara lain: Identifikasi kegiatan bisnis dan usaha potensial, terutama untuk sektor unggulan pariwisata, keringanan pengembalian/pemutihan pinjaman, bantuan peralatan produksi, pelatihan keterampilan kerja/usaha, dan promosi dan pemasaran.
e. Perlu adanya pendampingan lanjutan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengingat pelaksananaan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah tahap I

menggunakan dana Hibah Langsung Luar Negeri belum 100% selesai selain itu pembangunan rumah tahap II menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi baru akan dilaksanakan di tahun 2020.

Dokumen dari tim pendamping akan digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang khususnya penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.

Gambar 49. Kegiatan Pendampingan RR Bidang Fisik di Provinsi Sulawesi Tengah

Total bantuan pendanaan untuk pembangunan rumah rusak terkait bencana Tsunami, Gempabumi dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah telah disalurkan sebanyak 2 kali. Pada tahap I telah disalurkan bantuan hibah luar negeri yang disampaikan melalui BNPB sebesar Rp 235,5 M dengan target rumah sebanyak 4.522 unit. Progres pembangunan rumah secara rinci pada masing-masing kab/kota dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

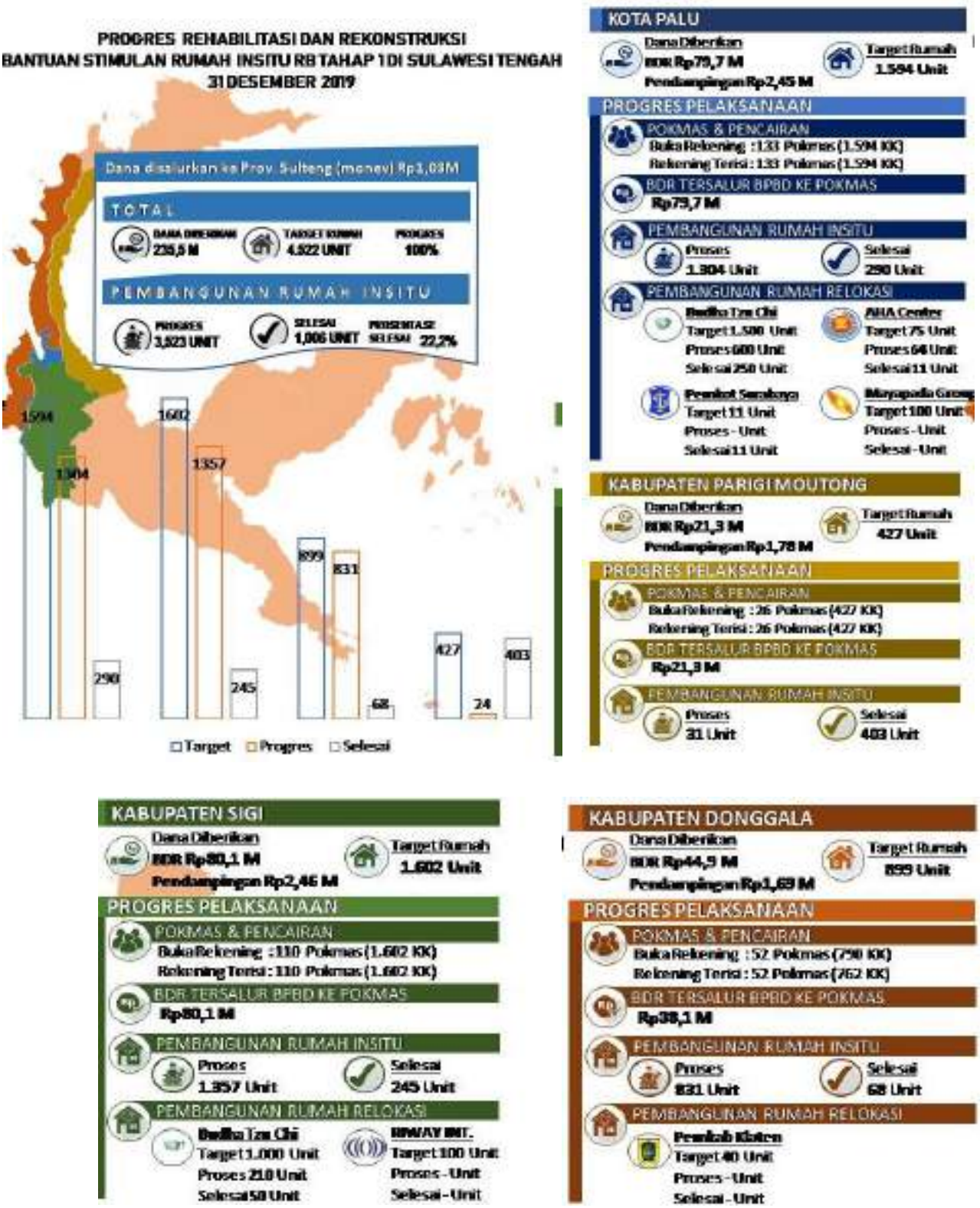

Gambar 50. Progres Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bantuan Stimulan Rumah Insitu Rusak Berat Tahap 1 di Provinsi Sulawesi Tengah

Sementara untuk tahap II telah disalurkan bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi melalui PHD yang ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2019 untuk pembangunan rumah di wilayah provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,97 T untuk target rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan sebanyak total 85.763 unit. Namun sampai dengan akhir 2019 pembangunan rumah tahap II belum berproses.

Untuk pendampingan ekonomi dilaksanakan di 4 kab/kota di wilayah prov Sulawesi Tengah dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1) **Kabupaten Sigi**

   Pendampingan Ekonomi di Kabupaten Sigi dilaksanakan di Desa Lolu, Mpanau, Kaleke Ramba dan Bulubete. Kegiatan yang telah dilaksanakan ialah sosialisasi, koordinasi, pemilihan lokasi dan pelatihan serta bantuan stimulan berupa alat produksi (bahan material bangunan, tenaga kerja sumur dangkal, dan lain-lain). Komoditas yang bisa menjadi sumber potensi pemulihan ekonomi di daerah pascabencana berdasarkan keputusan bersama kelompok usaha adalah Tomat, Cabe, Kangkung, Air Minum Isi Ulang, Keramba Ikan dan Piring Lidi.

2) **Kabupaten Donggala**

   Pendampingan Ekonomi di Kabupaten Donggala dilaksanakan di Desa Boneoge dan Limboro. Kegiatan yang telah dilaksanakan ialah sosialisasi, koordinasi, pemilihan lokasi dan pelatihan serta bantuan stimulan berupa alat produksi (mesin generator, mesin diesel, peralatan masak, plastik kemasan, spiner, mesin giling, tong air, benang, alat sisir, godokan, mesin jahit dan mesin neci). Komoditas yang bisa menjadi sumber potensi pemulihan ekonomi di daerah pascabencana berdasarkan keputusan bersama kelompok usaha adalah Ikan Olahan dan Tenun Subi.

3) Kota Palu

Pendampingan Ekonomi di Kota Palu dilaksanakan di Desa Balaroa, Donggala Kodi, Lere, Kabonena, Duyu, Lolu Utara, Tatura Utara, Lolu Selatan, Talise, Tondo, Besusu Timur, Besusu Barat dan Besusu Tengah. Kegiatan yang telah dilaksanakan ialah sosialisasi, koordinasi, pemilihan lokasi dan pelatihan serta bantuan stimulan berupa alat produksi (Etalase, kompor, tabung gas, alat penggorang, wajan, panci, dan lain-lain). Komoditas yang bisa menjadi sumber potensi pemulihan ekonomi di daerah pascabencana berdasarkan keputusan bersama kelompok usaha adalah Pisang Goreng.

4) Kabupaten Parigi Moutong

Pendampingan Ekonomi di Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan di Desa Pelawa dan Binangga. Kegiatan yang telah dilaksanakan ialah sosialisasi, koordinasi, pemilihan lokasi dan pelatihan serta bantuan stimulan berupa alat produksi (mesin produksi, kompor dan tabung gas, peralatan tambahan dan lain-lain). Komoditas yang bisa menjadi sumber potensi pemulihan ekonomi di daerah pascabencana berdasarkan keputusan bersama kelompok usaha adalah abon ikan, minyak kelapa, gula merah, piring ingko, ingko Lidi, VCO dan meubel.

Gambar 51. Lokasi dan Produk Pendampingan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk pendampingan sosial dilaksanakan di 4 kab/kota di wilayah prov Sulawesi Tengah dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 21. Hasil Pendampingan sosial di Kabupaten Sigi

LOKASI			JENIS PAKET	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	INTERVENSI STIMULAN (BANTUAN ALAT)
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN				
1. SIGI	Dolo Selatan	Ramba	1. Seni Keagamaan	RISMA Desa Ramba	Syuaib	**Paket Seni Rabana:**
						Paket Rabana, Siga, Seragam utk tim Rabana (Kaos)
						Pelatih
			2. Olahraga	Karang Taruna Sejahtera Desa Ramba	Jafar	**Alat olahraga** (bola takraw dan bola Volly), Perlengkapan OR Bulutangkis (Net, Raket)
		Bulubete	1. Olahraga	Kelompok Sepak Bola **PEREBUT** (Persatuan Sepakbola Bulubete)	Syarif	**Bola Kaki:** dukungan sarana Mesin Pemotong rumput, Jaring Gawang, Bola Kaki, dan Kaos Tim
						Pelatih
			2. Keagamaan	PKK Desa Bulubete	Kasmawati	**Sarana Ceramah dan Pengajian:** Sound System dan Al Quran, Buku Yasinan
						Ceramah Agama
			3. Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Permata Hati	Taslima	**Dukungan Sarana dan Prasarana Bermain** : Perosotan, Ayunan dan Alat Peraga
						Pelatihan DPA
	Kulawi	Tangkulowi	Seni Keagamaan	Pemuda Gereja Bethania GPID Luro Tangkulowi	Nombri Toro	**Alat:** Gitar (Bass, Melodi, Ritem) dan Cajon
	Sigi Biromaru	Watunonju	Cagar Budaya	REWPUBLIKA (Regenerasi Watunonju Peduli Budaya dan Lingkungan Cagar Alam	Didi Darmadi	**Sarana Promosi Budaya:** LCD, Laptop, dan Soud System)
	Dolo	Kotapulu	Seni Budaya	Kelompok Sanggar Seni Komunitas Polelea Kab Sigi	Akbar Dian	**Paket Alat Musik Tradisional** (Kakula, Gimba dan Lalove); Sound System dan Lighting.
						Penguatan Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal

Tabel 22. Hasil Pendampingan sosial di Kota Palu

LOKASI			JENIS PAKET	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	INTERVENSI STIMULAN (BANTUAN ALAT)
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN				
2. PALU	Mantikulore	Tondo	1. Olahraga	Karang Taruna	Rahmat Hidayat	**Sarana:** Futzal, Volly, Takraw , dan Kostum
						Sewa lapangan futzal
			2. Keagamaan	Majelis Taklim "Al Aqsa"	Nurleli	**Sarana Ceramah dan Pengajian:** Sound system, Paket Al-Quran, Paket Yaasin.
				TPA Al Ikhlas	Faisal Abu Bakar	**Sarana Pengajian, Baca Al-Quran Anak:** Paket Iqra, Paket Al Quraan, Rekal Al Quran.
	Tatanga	Duyu	Keagamaan	Majelis Taklim	Nurhayati	**Sarana Ceramah dan Pengajian:** Sound system, Paket Al-Quran, Paket Yaasin).
	Ulujadi	Tipo	Pendidikan (Inklusi)	SMPN 8 Palu	Mursida Said	**Peralatan Seni:**
						Gendang besar, Gendang Kecil, Lalove, dan Kaki penyangga gendang
						Musik Bambu: (Suling, Alat pengiring), dan Honor pelatih
						Pendidikan Olah Raga:
						Jaring gawang Futzal, Bola futsal, dan Papan Score
						Pendidikan Keterampilan:
						Mesin jahit elektrik, Mesin jahit meja biasa, Aat tembak besar, Lem tembak, Karton, Origami, Buku gambar, Pensil warna, Gunting, Lem fox, dan Selotip.
						Keagamaan:
						Al-Quran, Iqra dan Alkitab
	Palu Utara	Kayumalue Pajeko	Olah Raga	Karang Taruna	Afdal	**Sepak Bola Mini:**
						Bola, Rompi, Kun, Jaring gawang, Kaos kaki bola, Skin deker, Peluit, dan Honor pelatih
						Volli Ball:
						Bola Voli, Net Voli
						Sepak Takraw:
						Bola Takraw, dan Net Takraw

Tabel 23. Hasil Pendampingan sosial di Kabupaten Donggala

LOKASI			JENIS PAKET	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	INTERVENSI STIMULAN (BANTUAN ALAT)
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN				
3. DONGGALA	Tanantovea	Wani 1	1. Seni Keagamaan	Alkaherat	Ibu Mukjizat	**Seni Zamrah:** 1. Alat Zamrah/ Rabana 2. Pelatih
			2. Olahraga	Matador Wani	Syarif	**Futzal:** 1. Bola, Tiang, dan jaring Gawang 2. Pelatih
	Sindue	Lero	1. Seni Keagamaan	Al Hidayah	Ibnu Wahyu D.	**Seni Zamrah:** 1. Alat Zamrah/ Rabana 2. Pelatih
			2. Olahraga	Ksatria Lero	Kristianto	**Futzal:** 1. Bola Futzal 2. Pelatih
	Sirenja	Tompe	1. Seni Keagamaan	Risma Tompe	Irfan R. Yunda	**Seni Zamrah:** 1. Alat Zamrah 2. Pelatih
			2. Olahraga	Takraw Tompe	Bakri	**Takraw:** 1. Bola Takraw 2. Net
			3. Olahraga	Tim Volly Tompe	Erik	**Volly:** 1. Bola Volly 2. Net 3. Pelatih
	Balaesang	Lombongan	1. Seni Keagamaan	Al Aksa	Didi Darmawan	**Seni Zamrah:** 1. Alat Zamrah 2. Pelatih
			2. Olahraga	Club Lombongan	Akib	**Bola Kaki:** 1. Kostum 2. Bola Kaki 3. Pelatih

Tabel 24. Hasil Pendampingan sosial di Kabupaten Parigi Moutong

LOKASI			JENIS PAKET	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	INTERVENSI STIMULAN (BANTUAN ALAT)
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN				
4. PARIGI MOUTONG	Parigi Tengah	Pelawa	1. Seni Keagamaan	Risma	Subhan	**Seni Zamrah:** 1. paket seni zamrah 2. Pelatih
			2. Olahraga	Pemuda	Faisal, S. H.	**Bola kaki, Bola volly dan Takraw:** Pengadaan sarana olahraga tiang gawang, jaring, bola dan scoring board
			3. Keagamaan	Majelis Taklim	Bahrun	**Sarana Ceramah dan Pengajian:** Sound System, Lemari Al Quran, Mukenah dan Al Quran
			4. Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Hj. Harwin	**Dukungan Sarana dan Prasarana Bermain:** Perosotan, Ayunan dan Alat Peraga
		Binangga	1. Seni Keagamaan	Risma	Ardiansyah	**Seni Zamrah:** 1. paket seni zamrah 2. Pelatih
			2. Keagamaan	Pengurus Masjid	Amar Ma'ruf	**Sarana Pembinaan Keagamaan:** TOA/speaker Masjid, Mixer Masjid
			3. Olahraga	Pemuda	Rasyid	**Bola kaki, Bola volly dan Takraw:** Pengadaan sarana olahraga tiang gawang, jaring, bola dan scoring board
			4. Keagamaan	TPA	Dahlia	**Sarana Pengajian, Baca Al-Quran Anak:** Paket Iqra, Paket Al Quraan, Rekal Al Quran
			5. Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rosmini	**Dukungan Sarana dan Prasarana Bermain:** Perosotan, Ayunan dan Alat Peraga

Gambar 52. Bantuan Stimulan Kegiatan Pendampingan Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah

b. Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari kegiatan Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Bidang Fisik di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berikut hal-hal yang menjadi rekomendasi, yaitu

a. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi seharusnya mengacu pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sudah disusun dan disepakati oleh stakeholder terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
b. Untuk mengimplementasikan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperlukan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah;
c. Perlu adanya pendampingan lanjutan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena pelaksananaan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah masih akan diusulkan kembali tahun 2020.

Gambar 53. Kegiatan Pendampingan RR Bidang Fisik di Provinsi NTB

Untuk pendampingan ekonomi dilaksanakan di 4 kab/kota di wilayah provinsi NTB dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1) **Kabupaten Lombok Utara**

   Pendampingan Ekonomi di KabupatenLombok Utara dilaksanakan di Desa Santong, Sukadana, Karang Bajo, Genggelang, Gumantar. Kegiatan yang telah dilaksanakan ialah sosialisasi, koordinasi, pemilihan lokasi dan pelatihan serta bantuan berupa alat produksi (Roasting, Kemasan, Bangunan Pengering, Pemasaran, Perijinan, Papan Plank, dan lain-lain). Komoditas bisa yang menjadi sumber potensi pemulihan ekonomi di daerah pascabencana berdasarkan keputusan kelompok usaha adalah Kopi, Madu Trigona, Tenun, Coklat dan Mete.

2) **Kabupaten Lombok Timur**

   Pendampingan Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan di Desa Sembalun Lawang, Sugian, Biloq Petung, Kembang Kuning, Sembalun Bumbung dan Sajang. Kegiatan yang telah dilaksanakan ialah sosialisasi, koordinasi, pemilihan lokasi dan pelatihan serta bantuan berupa alat produksi (Raw materal, solar dryer kemasan, pemasaan, pewarna alam, perijinan, papan plank, dan lain-lain). Komoditas yang menjadi sumber potensi pemulihan ekonomi di daerah pascabencana berdasarkan keputusan kelompok usaha adalah Tenun, Mete, Kopi, Black Garlic dan Kopi.

3) **Kabupaten Lombok Tengah**

   Pendampingan Ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan di Desa Air Berik, Karang Sidemen, Aik Bual. Kegiatan yang telah dilaksanakan ialah sosialisasi, koordinasi, pemilihan lokasi dan pelatihan serta bantuan

berupa alat produksi (*solar dryer*, kemasan, pemasaran, perijinan, papan plank, dan lain-lain). Komoditas yang menjadi sumber potensi pemulihan ekonomi di daerah pascabencana berdasarkan keputusan kelompok usaha adalah Kopi dan Gula semut.

4) Kabupaten Lombok Barat

Pendampingan Ekonomi di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan di Desa Pusuk Lestari, Kekait, Batu Mekar dan Saribaye. Kegiatan yang telah dilaksanakan ialah sosialisasi, koordinasi, pemilihan lokasi dan pelatihan serta bantuan berupa alat produksi (Kemasan, pemasaran, perijinan, mesin sealler, bahan baku, peralatan, papan nama, dan lain-lain). Komoditas yang menjadi sumber potensi pemulihan ekonomi di daerah pascabencana berdasarkan keputusan kelompok usaha adalah Gula Semut, Ketak dan Madu Trigona.

Gambar 54. Kegiatan Survey penentuan komoditas dan pemberian bantuan stimulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gambar 55. Lokasi dan Produk Pendampingan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Untuk kegiatan Pendampingan Sosial di Prov. NTB dilaksanakan terhadap 12 kelompok dari 8 desa masing-masing 2 desa di setiap kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat di daerah pascabencana, pulihnya kelembagaan masyarakat berdasarkan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatnya dukungan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pemulihan pascabencana.

Desa terpilih merupakan wilayah terdampak bencana. Pemilihan Desa yang dilakukan kegiatan Pendampingan Sosial dilakukan secara purposive berdasarkan analisis data dan informasi dari hasil kaji cepat dan menyiapkan matriks skoring. Metode yang digunakan yaitu dimulai dari diskusi dengan pihak terkait, analisis situasi/pemetaan, parameter skoring, dan perangkingan.

Pemilihan bentuk stimulan yang diberikan kepada kelompok berdasarkan kebutuhan dari masing-masing kelompok. Stimulan yang telah diberikan yaitu berupa Rak dan alas baca Al-Qur'an, Iqro, Buku-buku islami, Seragam/Kostum, Meja dan kursi, Sarung dan timbangan digital, *Sound system*, Kirab budaya, Guru/Pengajar, Alat musik, Workshop dan kursus, Legalitas kelompok dan Papan nama.

Gambar 56. Hasil Pendampingan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat

c. Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Karo

Berdasarkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2019, Hasil perhitungan kerusakan dan kerugian akibat erupsi Gunungapi Sinabung sejak September 2013 hingga Mei 2015 (sebelum ditetapkan status Awas) diperkirakan Rp1,80 triliun, terdiri dari nilai kerusakan sebesar Rp578,99 miliar dan nilai kerugian sebesar Rp1,23 triliun. Kerusakan dan kerugian di sektor ekonomi produktif meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, perikanan, UKM, dan industri adalah yang paling besar, yaitu lebih dari Rp1,14 triliun. Sedangkan kerusakan dan kerugian di sektor permukiman sebesar

Rp505,9 miliar, infrastruktur Rp83,93miliar, sosial Rp53,43 miliar, dan lintas sektor Rp18,26 miliar. Total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebesar Rp3,60 triliun.

Sesuai dengan Surat Kepala Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG) Nomor 1230/45/BGL.V/2014 tanggal 8 April 2014 merekomendasikan 3 desa yaitu Desa Sukameriah Kecamatan Payung, Desa Simacem dan Desa Bekerah Kecamatan Naman Teran yang harus direlokasi. Pemerintah Kabupaten Karo Menetapkan Relokasi Tahap I sebanyak 370 KK penerima Hunian Tetap (Huntap) dan 473 penerima Lahan Usaha Tani (LUT) ke Siosar dan telah selesai dilaksanakan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2018, untuk memenuhi tuntutan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun Hunian Tetap (Huntap) tambahan untuk 103 KK.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG) Nomor 2124/45/BGL.V/2015 tanggal 2 Juli 2015 merekomendasikan Masyarakat yang tinggal diluar radius 3 Km dari kawah Gunung Sinabung yaitu 4 Desa yaitu Desa Gurukinayan Kecamatan Payung, Desa Kutatonggal Kecamatan Namanteran, Desa Berastepu dan Desa Gamber Kecamatan Simpang Empat. Pemerintah Kabupaten Karo bersama BNPB menetapkan Relokasi Tahap II dilaksanakan dengan cara Relokasi Mandiri. Pada tahun 2016 Relokasi Tahap II (Mandiri) sebanyak 1.682 KK telah selesai dilaksanakan tersebar di 21 Hamparan Berkelompok dan 7 Mandiri Tersebar. Selanjutnya Pada tahun 2018, dilaksanakan Relokasi Tahap II (Mandiri) Lanjutan sebanyak 156 KK pembangunan huntap di sekitar 8 Hamparan berkelompok dan tersebar. Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di Hamparan-hamparan Relokasi Tahap II (Mandiri) juga sudah selesai dilaksanakan dengan beberapa kebutuhan hamparan yang belum terpenuhi sepenuhnya.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2169/45/BGL.V/2015 Tanggal 07 Juli 2015 Perihal Perkembangan tingkat aktivitas Level IV (Awas) Gunung Sinabung sampai tanggal 07 Juli 2015 pukul 00:00-06:00 WIB direkomendasi untuk masyarakat yang

berada di dalam jarak kurang dari 4 km dan di luar sektor Selatan-Tenggara dan Tenggara-Timur tetapi berada di dalam KRB III berpotensi terkena hujan abu lebat dan lontaran material vulkanik, yaitu yang berada di Desa Sukanalu, Desa Sigarang-garang, Desa Mardingding dan Dusun Lau Kawar Desa Kuta Gugung agar direlokasi ke lokasi yang aman; Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan Relokasi Tahap III kembali dilaksanakan ke Siosar sebanyak 1.038 KK yang saat ini masih dalam tahap pelaksanaan hingga tahun 2020.

Berdasarkan kegiatan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung api Sinabung yang telah dilaksanakan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh tim pendamping adalah:

1. Perlu adanya koordinasi dengan OPD terkait Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan rencana.
2. Perlunya peningkatan pendekatan terhadap masyarakat terdampak oleh pemerintah daerah agar permasalahan terkait isu-isu penanggulangan bencana dapat diselesaikan.
3. Khusus untuk pemulihan ekonomi diperlukan dukungan percepatan identifikasi kegiatan bisnis dan usaha potensial, terutama untuk 127 sektor unggulan pariwisata khususnya di tempat relokasi Siosar.
4. Perlu adanya pendampingan lanjutan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunungapi Sinabung mengingat bahwa pelaksanaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana TA 2018 telah dilakukan perpanjangan sehingga pelaksanaanya sampai dengan 27 Desember 2020.

Dokumen ini akan digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo di masa yang akan datang khususnya penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan.

Gambar 57. Kegiatan Pendampingan RR Bidang Fisik di Kabupaten Karo

Progres pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akibat erupsi gunung sinabung di Kabupaten Karo berlangsung selama 4 tahun dari tahun 2015 - 2018. Terdapat 3 kali tahapan relokasi dimana relokasi pertama menggunakan dana DSP sebanyak Rp 297 M untuk 370 unit rumah beserta fasilitas umum dan sosial. Relokasi tahap 2 dan 3 menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dengan total sebanyak Rp 437,8 M untuk membangun 2.702 unit rumah beserta infrastruktur dasar berupa listrik, air dan drainase. Selain untuk kegiatan pembangunan hunian pada tahun 2017 – 2018 dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan dipergunakan untuk pembangunan sektor ekonomi sekitar yaitu terkait pematangan lahan relokasi dan pengadaan alat traktor.

Gambar 58. Progress Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gunung Sinabung di Kabupaten Karo

Monitoring dan Evaluasi

BNPB dalam fungsinya untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RR pascabencana melakukan pemantauan secara berkala dan melaporkan progres kegiatan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di daerah penerima hibah RR Pascabencana

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Fisik untuk bencana sektor tertentu adalah sebagai berikut:

a. **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kunjungan ke daerah.**
   Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk kunjungan lapangan dengan jumlah 42 kunjungan daerah untuk mengetahui progress pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

b. **Melaksanakan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi ke Daerah.**
   Pertemuan bertujuan untuk mengetahui progress pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang pelaksanaanya dikelompokan dalam periode waktu triwulan (triwulan 1, 2, 3 dan 4). Hasil monitoring dan evaluasi terhadap hibah pelaksanaan

RR pascabencana TA 2018 (4 provinsi dan 9 kabupaten/kota), TA 2017 Tahap 1 perpanjangan (7 kabupaten/kota)dan TA 2017 Tahap 2 perpanjangan (2 provinsi dan 12 kabupaten/kota), dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 25. Hasil Laporan per Triwulan Daerah Penerima Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2018

No.	Laporan Triwulan	Keuangan			Fisik
		Anggaran	Realisasi	%	%
1	Triwulan I	602,333,079,443	856,815,722	0,14	0,16
2	Triwulan II		14,190,973,110	2,36	2,36
3	Triwulan III		73,265,406,383	12,16	12,09
4	Triwulan IV		269,250,978,971	44,71	36,31

Tabel 26. Hasil Laporan per Triwulan Daerah Penerima Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2017 Tahap 1 Perpanjangan.

No.	Laporan Triwulan	Keuangan			Fisik
		Anggaran	Realisasi	%	%
1	Triwulan I	756,587,360,000	534,359,209,511	70,63	77,33
2	Triwulan II		595,205,953,689	78,67	84,50
3	Triwulan III		616.856.599.471	81,53	84,69
4	Triwulan IV		626.648.427.645	82.83	87.05

Tabel 27. Hasil Laporan per Triwulan Daerah Penerima Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2017 Tahap 2 Perpanjangan

No.	Laporan Triwulan	Keuangan			Fisik
		Anggaran	Realisasi	%	%
1	Triwulan I	399,810,690,000	222,859,070,035	55,74	62,16
2	Triwulan II		240,403,123,955	60,13	64,34

No.	Laporan Triwulan	Keuangan			Fisik
		Anggaran	Realisasi	%	%
3	Triwulan III		288,957,513,354	72,27	74,48
4	Triwulan IV		298.976.993.762	74.78	82.13

Sampai dengan akhir masa pemanfaatan hibah, terdapat 11 daerah penerima yang mengajukan ijin perpanjangan pemanfaatan hibah TA 2017 dan TA 2018 hingga pemanfaatan tahun 2020. Terhadap daerah tersebut telah diberikan rekomendasi teknis perpanjangan pemanfaatan hibah dan telah mendapatkan ijin perpanjangan pemanfaatan hibah dilanjutkan sampai dengan tahun 2020.

Gambar 59. Kegiatan Rapat Monitoring Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Fisik.

Gelar Budaya di Wilayah Pasca bencana

Gelar budaya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyalurkan minat, bakat dan talenta yang dimiliki masyarakat guna menumbuhkan kembali semangat, motivasi dan kepercayaan diri masyarakat pasca bencana. Kegiatan ini berupa kegiatan lomba lukis, teater dan permainan tradisional. Dengan kegiatan ini diharapkan tali silaturahmi dan kehidupan sosial masyarakat dapat pulih dan menumbuhkan kreatifitas serta gagasan baru dalam tiap individu masyakarat terdampak bencana. Kegiatan gelar budaya ini juga di-*design* dengan agar sesuai dengan metoda pemulihan psikososial dan sosial-budaya masyarakat. Adapun pelaksana kegiatan ini adalah kelompok pemberdayaan dengan melibatkan seluruh

unsur masyarakat di lokasi yang telah dipilih sebelumnya. Pemulihan sosial melalui kesenian akan dapat memberikan kesempatan kepada warga untuk dapat mengekspresikan diri dan perasaannya dan dapat menjadi saran komunikasi antar warga yang terpisah. Dengan seni juga memungkinkan sesorang untuk menguasai dan mengubah keadaan sehingga mereka dapat merasa memliki kemampuan mengontrol situasi yang tidak pasti setelah bencana.

Pada tahun 2019, kegiatan gelar budaya dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Kab Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui kegiatan gelar budaya diharapkan kegiatan ini dapat memulihkan kondisi masyarakat pascabencana dengan meningkatkan potensi budaya masyarakat, meningkatkan potensi pariwisata, serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan budaya dan pariwisata.

Gambar 60. Kegiatan Gelar Budaya di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB

Kegiatan Gelar Budaya di Prov. NTB dilaksanakan pada tanggal 16-17 Oktober 2019 di Lapangan Rest Area Kec Sembalun, Kab. Lombok Timur. Kegiatan tersebut berlangsung dari jam 15.30 sampai dengan jam 22.00 WITA di setiap hari pelaksanaannya, dengan menampilkan berbagai kesenian dari masyarakat di daerah terdampak bencana, antara lain : Gendang Beleq, Tari Gegeruk, Kelompok Tari Anak, Teater Cupak Gerantang, Fashion Show Tenun Sembalun, Peresean, Musik Biola dari Desa Sembalun, Tari Sinar Rahulan, Tari Lelontek dan Qasidah.

Gambar 61. Kegiatan gelar budaya di Kabupaten Donggala

Kegiatan Gelar Budaya di Prov. Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 19-20 November 2019 di Lapangan Huntara Gunung Bale Kab. Donggala.Kegiatan tersebut berlangsung dari jam 10.00 sampai dengan jam 18.00 WITA, diawali dengan diadakannya perlombaan untuk anak-anak di huntara serta hiburan dan karaoke bersama warga, dilanjutkan di hari kedua dengan menampilkan berbagai kesenian dari masyarakat, antara lain: Orkes Gambus Ya Salam, Kesenian Samra, Tari Raego Kreasi, Rabana Al-Huda dan Tari Mokambu Sanggar Goneganti.

Dampak langsung kegiatan gelar budaya adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan kegiatan ini. Masyarakat lokal terlibat dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Seperti terlibat dalam menyiapkan lokasi kegiatan hingga publikasi mengenai acara gelar budaya, berpartisipasi dalam mengisi kegiatan dengan mengikuti perlombaan dan ikut memberikan tampilan kesenian (melalui seni tari, seni karawitan, atau seni musik), hingga ikut mengajak masyarakat sekitar untuk hadir dan meramaikan kegiatan. Sisi ekonomi masyarakat juga tumbuh pada kegiatan ini, khususnya pada hari pelaksanaan kegiatan. Hal ini terlihat dari banyaknya pedagang asongan yang datang menjajakan dagangannya serta ikut sertanya kelompok UKM setempat untuk memperkenalkan hasil usaha kelompok mereka. Maka, melalui kegiatan gelar budaya ini selain menggairahkan kembali sektor seni masyarakat juga menumbuhkan kembali sektor ekonomi masyarakat.

BNPB dalam upaya melakukan pemulihan tidak hanya memberikan stimulan bantuan peralatan ataupun bahan produksi akan tetapi juga dukungan pemasaran kepada kelompok terdampak bencana guna memberikan media promosi dan penjualan kepada pembeli/konsumen.

Gambar 62. Pelaksanaan Pameran Dukungan Pemasaran Kelompok Terdampak

Strategi kegiatan dukungan pemasaran ini adalah untuk memunculkan produk unggulan, menciptakan wahana interaksi bisnis bagi UMKM antara para pengusaha, pembeli, dan investor dari dalam dan luar negeri. Selain itu memberikan informasi tentang produk yang dihasilkan masyarakat dan untuk membangun citra positif BNPB kepada masyarakat tentang keberhasilan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pascabencana melalui kegiatan pemulihan dan peningkatan ekonomi.

Beberapa kegiatan pameran yang diikuti oleh BNPB selama tahun 2019adalah:

1. Pameran Festival Kopi 2019 di Bandung pada tanggal 22-25 Agustus 2019
2. Pameran Craft Ina 2019 di Jakarta Convention Center pada tanggal 16-20 Oktober 2019,
3. Pameran One Pesantren One Product (OVOP) di Grand City Surabaya, pada tanggal 25-27 November 2019.

4. Pameran Pengurangan Resiko Bencana di Pangkal Pinang pada tanggal 11-13 Oktober 2019.

Gambar 63. Pelaksanaan Pameran PRB di Kota Pangkal Pinang

Sasaran Strategis 4. Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan

Capaian kinerja sasaran strategis terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan tahun 2019 dicapai melalui pelaksanaan program sebagai berikut:

Rata-rata Waktu Penyebaran Informasi Kejadian Bencana

Indikator kinerja utama (IKU) selanjutnya adalah rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana. Pencapaian IKU pada 2019 sangat baik, yaitu sebesar 159%.Target rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana kepada publik pada tahun 2019 selama 3 jam dan BNPB mampu merealisasikan dalam waktu rata-rata *sudden on set* dan *slow on set* dalam waktu 1 jam 13 menit.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)
1	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kiner	Rata-rata Waktu Penyebaran Informasi Kejadian Bencana	3 Jam	1 Jam 13 Menit

Sementara itu, sebagai perbandingan target BNPB pada 2017 selama 4,5 jam tercapai dalam waktu 1 jam 9 menit. Tahun 2018 target yang dibutuhkan selama 4 jam, pencapaian BNPB 59 menit 45 detik. Tahun 2019 target yang dibutuhkan selama 3 jam pencapaian BNPB 1 jam 13 menit. Berikut ini perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 s/d 2019

Tahun	Target Penyebaran Informasi (waktu yang dibutuhkan)	Pencapaian	Persentase Capaian
2015	5 jam	3 jam 30 menit	155%
2016	5 jam	2 jam 15 menit	150%
2017	4,5 jam	1 jam 9 menit	245%
2018	4 jam	59 menit 45 detik	401.67%
2019	**3 jam**	**1 Jam 13 menit**	**159%**

BNPB menilai bahwa penyebaran data dan informasi sangat penting dengan latar belakang prinsip keselamatan jiwa dan seminimum mungkin kerugian dampak bencana. Target penerima dan pengguna data dan informasi tersebut adalah publik, seperti masyarakat dan media massa. Di samping itu, BNPB juga memandang mitra kerja seperti Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Donor, maupun dunia usaha yang memiliki kepedulian dibidang bencana untuk mendapatkan data dan informasi. Melihat pencapaian dalam penyebaran data dan informasi, BNPB menggunakan media atau

kanal yang dapat diakses secara mudah oleh publik. Penyebaran data dan informasi bencana yang dilakukan melalui beberapa media, sebagai berikut:

1. Media sosial (Instagram @bnpb_indonesia, Twitter @BNPB_Indonesia, Facebook @InfoBencanaBNPB, Youtube BNPB Indonesia).
2. Sistem Informasi/Aplikasi (website BNPB, Whatsapp, InAWARE, Pantauan Bencana, Geospasial, DIBI, Petabencana.id, sms broadcast). BNPB TV, tv.bnpb.go.id dapat juga diakses di aplikasi Google Playstore dan IoS. Diorama Kebencanaan, juga dapat diakses di Google Playstore.
3. Pendekatan Media Massa (konferensi pers, media monitoring, siaran pers, bimbingan teknis wartawan).
4. Pendekatan melalui badan kehumasan antar kementerian dan lembaga (Bakohumas, Grup Milis dan Whatsapp grup admin media sosial kementerian/lembaga).
5. Pelayanan publik dalam hal edukasi bencana seperti diorama edukasi bencanadan perpustakaan BNPB di Graha BNPB.
6. Pelayanan publik dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk menjadi acuan setiap satuan kerja dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sebagai amanat dari Undang-Undang KIP No. 14 Tahun 2008. PPID BNPB melakukan pelayanan baik yang datang langsung melalui meja informasi, melalui surat, dan fax dan melalui layanan elektronik *website* www.bnpb.go.id , media sosial seperti twitter, Facebook, Instagram dan Youtube. Pemohon informasi rata-rata berasal dari individu, LSM, organisasi masyarakat, Kementerian/Lembaga.
7. Sosialisasi dan edukasi bencana ke masyarakat langsung melalui kesenian tradisional (wayang kulit, wayang golek) dan lomba kreativitas kebencanaan (lomba blog, poster, foto, film dan podcast).
8. Sosialisasi dan edukasi bencana melalui media elektronik (radio dan televisi).
9. Sosialisasi dan edukasi bencana melalui media cetak (Majalah GEMA, Jurnal Penanggulangan Bencana, serta buku-buku mengenai edukasi bencana).
10. Sosialisasi dan edukasi bencana pada tingkat sekolah dasar, "BNPB BPBD Mengajar".

Secara ringkas, alur data dan informasi yang disebarkan kepada publik bersumber dari *monitoring room* BNPB, Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, pejabat BPBD di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta *stakeholders*, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Data dan informasi dari unit Pusat Data Informasi dan Humas BNPB digunakan sebagai acuan sumber informasi oleh media massa dalam bentuk berita di media online, *running text* di televisi serta berita di media konvensional, seperti koran, radio dan televisi. Pada era teknologi informasi, media sosial merupakan kanal yang paling efektif dalam penyebaran data dan informasi kejadian bencana. Selain itu cara kerja penyebaran data dan informasi kejadian bencana yang cepat dilakukan oleh BNPB dengan mem*broadcast* berita menggunakan Whatsapp dan media massa menerbitkan berita berdasarkan sumber BNPB tersebut.

Strategi Pusat Data Informasi dan Humas BNPB menggunakan media sosial dan Whatsapp karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi tersebut lebih popular dan mudah dalam penggunaan untuk berkomunikasi via telepon atau fax.
2. Kemampuan untuk mengirimkan text dengan karakter tidak terbatas, gambar, suara dan video.
3. Kapasitas penyimpan *contact person* besar di dalam grup.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Graha BNPB - Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120

+62 21 2982 7793
+62 21 2128 1200
contact@bnpb.go.id
ppid@bnpb.go.id
www.bnpb.go.id
+62 812 971 000 69
@BNPB_Indonesia
BNPB Indonesia
bnpb_indonesia
@InfoBencanaBNPB
BNPBTV tv.bnpb.go.id
PUSDALOPS +62 812 - 123 75 75

Melalui media atau kanal yang dimiliki BNPB, informasi dapat disampaikan secara cepat dan akurat kepada masyarakat, khususnya kejadian bencana, baik upaya penanganan dan perkembangan terkini pascabencana. Rilis berita resminya disebarluaskan langsung oleh Kapusdatinmas BNPB melalui WhatsApp Group yang dinamakan Media Komunikasi Bencana atau disingkat Medkom Bencana (sebanyak 7 group) dan Wartawan Peduli Bencana (Wapena) yang terbagi dalam berbagai daerah provinsi (sebanyak 9 group).

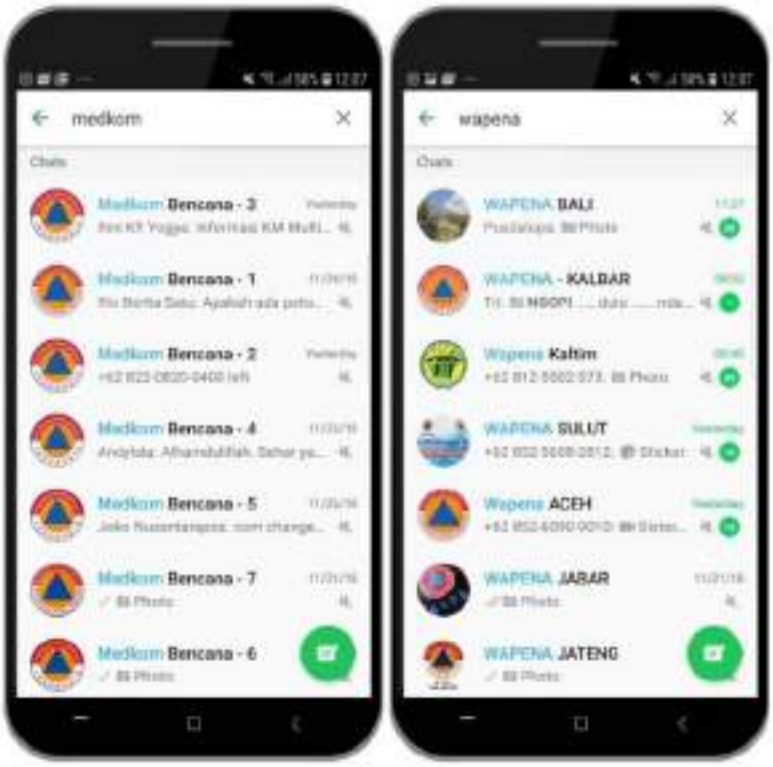

Gambar 64. *WhatsApp Group* Media Komunikasi Bencana

No.	*WhatsApp Group*	Jumlah Partisipan
1.	Medkom Bencana – 1	250
2.	Medkom Bencana – 2	249
3.	Medkom Bencana – 3	244
4.	Medkom Bencana – 4	253
5.	Medkom Bencana – 5	243
6.	Medkom Bencana – 6	193
7.	Medkom Bencana – 7	203
8.	Wapena Bali	189
9.	Wapena Sumbar	51
10.	Wapena Aceh	74
11.	Wapena Kalbar	44
12.	Wapena Sulut	65
13.	Wapena Maluku	52
14.	Wapena Sulsel	42
15.	Wapena Jabar	31
16.	Wapena Jateng	26
Jumlah Partisipan Medkom Bencana dan Wapena		**2.209**

*) update data WA Goup per 31 Desember 2019

Berkembangnya teknologi seperti *WhatsApp Group* memudahkan untuk Pusdatinmas mengupdate dan menyebarkan informasi atau data sementara bencana yang terjadi dalam waktu singkat. Sehingga informasi yang diterima langsung kepada wartawan yang tergabung di Medkom Bencana dan Wapena. Mengingat peran serta media bagian dari Pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi/Peneliti, dan Media) serta sebagai pengganda informasi langsung kepada masyarakat melalui kanal media masing-masing.

Rata-rata penyebaran informasi kebencanaan **1 jam 13 menit** terbagi dalam 2 (dua) kategori bencana yang bersifat *slow on set* membutuhkan waktu 1 jam 7 menit dan *sudden on set* membutuhkan waktu 1 jam 20 menit. Kecepatan penyebaran informasi ini didukung oleh penyampaian laporan kejadian bencana yang cepat dari daerah ke pusat. Hal ini tidak terlepas dari bantuan Pusat Data Informasi dan Humas BNPB ke BPBD-BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota daerah berupa peralatan radio komunikasi, teknologi informasi, pembentukan pusat pengendali operasi, whatssapp group dan mobil komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan mudahnya masyarakat dalam mengakses berita membuat penyampaian informasi kebencanaan lebih cepat sampai kepada masyarakat.

Peningkatan Penyebaran Informasi kejadian bencana yang dilakukan BNPB menggunakan 2 (dua) cara. Pertama diukur dari waktu kejadian bencana yang dilaporkan oleh BPBD ke Pusdalops BNPB dan diterima Pusdatinmas. Kedua, diukur dari waktu berita bencana tersebut ditayangkan di *website* BNPB yang disebarluaskan ke *Whatsapp Grup* kemudian disiarkan oleh awak media di kanal berita media massa masing-masing.

a. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana untuk kejadian bencana *slow on set* (durasi waktu yang dibutuhkan rata-rata 1 jam 7 menit pascabencana)

Tabel 29. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana untuk kejadian bencana *slow on set*

No	Kejadian Bencana			Penyebaran Data dan Informasi			Media yang mengacu pada informasi BNPB	Durasi Waktu (jam)
	Jenis Bencana	Waktu dari sumber informasi		Media yang digunakan BNPB dalam menyebarkan Informasi bencana	Waktu			
1.	Banjir Landa 53 Kecamatan di Sulawesi Selatan, 8 Tewas, 4 Hilang dan Ribuan Warga Mengungsi	23 January 2019	14.00 WIB	https://www.bnpb.go.id/banjir-landa-53-kecamatan-di-sulawesi-selatan-8-tewas-4-hilang-dan-ribuan-warga-mengungsi	23 January 2019	15.00 WIB	https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/23/bnpb-banjir-landa-53-kecamatan-di-9-kabupatenkota-di-sulawesi-selatan-8-orang-tewas	1 jam
2.	Banjir Bandang Terjang 9 Kelurahan Di Sentani Kabupaten Jayapura, 3 Orang Meninggal Dunia	16 Maret 2019	21.30 WIT = 19.30 WIB	https://www.bnpb.go.id/banjir-bandang-terjang-9-kelurahan-di-sentani-kabupaten-jayapura-3-orang-meninggal-dunia	16 Maret 2019	21.15 WIB	https://www.tribunnews.com/regional/2019/03/16/banjir-bandang-terjang-9-kelurahan-di-sentani-jayapura-3-orang-meninggal-dunia	1 jam 45 menit
3..	Meski Terus Erupsi, Gunung Bromo Tetap Aman dan Menawan Untuk Dikunjungi	19 Maret 2019	12.00 WIB	https://bnpb.go.id/meski-terus-erupsi-gunung-bromo-tetap-aman-dan-menawan-untuk-dikunjungi	19 Maret 2019	13.20WIB	https://news.okezone.com/read/2019/03/19/519/2032293/gunung-bromo-tetap-aman-dan-menawan-untuk-dikunjungi-meski-terus-erupsi	1 jam 20 menit

No	Kejadian Bencana			Penyebaran Data dan Informasi			Media yang mengacu pada informasi BNPB	Durasi Waktu (jam)
	Jenis Bencana	Waktu dari sumber informasi		Media yang digunakan BNPB dalam menyebarkan Informasi bencana	Waktu			
4.	Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Status Masih Level 2	28 March 2019	06.34 WIB	https://bnpb.go.id/gunung-merapi-keluarkan-awan-panas-status-masih-level-2	28 March 2019	07.58WIB	https://www.ayobandung.com/read/2019/03/28/48136/11-gunung-api-erupsi-pvmbg-keluarkan-peringatan-untuk-penerbangan	1 jam 24 menit
5.	Dampak Banjir Dan Longsor Meluas di Bengkulu: 10 Meninggal, 8 Hilang dan 12.000 Mengungsi	28 April 2019	11.51 WIB	https://bnpb.go.id/dampak-banjir-dan-longsor-meluas-di-bengkulu-10-meninggal-8-hilang-dan-12000-mengungsi	28 April 2019	12.43 WIB	https://daerah.sindonews.com/read/1399620/174/banjir-bengkulu-meluas-10-meninggal-8-hilang-dan-12000-mengungsi-1556430113	51 menit
6.	Gunung Sinabung Kembali Erupsi, Tinggi Kolom Erupsi Hingga 2.000 Meter	07 Mei 2019	07.48 WIB	https://bnpb.go.id/gunung-sinabung-kembali-erupsi-tinggi-kolom-erupsi-hingga-2000-meter	07 Mei 2019	08.01 WIB	https://regional.kompas.com/read/2019/05/07/11022731/gunung-sinabung-kembali-erupsi-tinggi-kolom-erupsi-hingga-2000-meter	13 menit
7.	Gunung Sinabung Meletus dengan Tinggi Kolom Abu 7	09 Juni 2019	16.28 WIB	https://bnpb.go.id/gunung-sinabung-meletus-dengan-tinggi-kolom-abu-7-km-tidak-ada-korban-jiwa	9 Juni 2019	17.18 WIB	https://beritajatim.com/peristiwa/gunung-sinabung-meletus-dengan-tinggi-abu-7-	49 menit

No	Kejadian Bencana			Penyebaran Data dan Informasi			Media yang mengacu pada informasi BNPB	Durasi Waktu (jam)
	Jenis Bencana	Waktu dari sumber informasi		Media yang digunakan BNPB dalam menyebarkan Informasi bencana	Waktu			
	Km, Tidak Ada Korban Jiwa						km-tidak-ada-korban-jiwa/	
8.	Tidak Ada Korban Jiwa pada Kebakaran Hutan Gunung Arjuna	29 Jull 2019	11.40 WIB	https://www.bnpb.go.id/tidak-ada-korban-jiwa-pada-kebakaran-hutan-gunung-arjuna	29 Jull 2019	13.21 WIB	https://mediaindonesia.com/read/detail/250036-tidak-ada-korban-jiwa-pada-kebakaran-hutan-gunung-arjuna	1 Jam 40 menit
9.	Kembali Erupsi, Status Gunung Tangkuban Parahu Dinaikkan Menjadi Waspada	02 Agustus 2019	06.07 WIB	https://www.bnpb.go.id/kembali-erupsi-status-gunung-tangkuban-parahu-dinaikkan-menjadi-waspada	02 Agustus 2019	07:09 WIB	https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49202107	1 jam 1 menit
10.	Dua Doni Monardo di Sentani	4 September 2019	09.06 WIB	https://www.bnpb.go.id/dua-doni-monardo-di-sentani	4 September 2019	10.23 WIB	https://nasional.okezone.com/read/2019/09/04/337/2100435/cerita-dua-doni-monardo-di-sentani-papua	1 jam 17 menit
11.	Siaga Darurat Karhutla, Pemprov Riau Tebar Posko Kesehatan	16 September 2019	18:34 WIB	https://www.bnpb.go.id/siaga-darurat-karhutla-pemprov-riau-tebar-posko-kesehatan	16 September 2019	19.30 WIB	https://regional.inews.id/berita/pekanbaru-siaga-darurat-karhutla-pemprov-tebar-15-posko-kesehatan-untuk-warga	56 menit

No	Kejadian Bencana			Penyebaran Data dan Informasi			Media yang mengacu pada informasi BNPB	Durasi Waktu (jam)
	Jenis Bencana	Waktu dari sumber informasi		Media yang digunakan BNPB dalam menyebarkan Informasi bencana	Waktu			
12.	Luas Lahan Terbakar Seluruh Indonesia Capai 857 Ribu Ha	22 Oktober 2019	13.13 WIB	https://www.bnpb.go.id/luas-lahan-terbakar-seluruh-indonesia-capai-857-ribu-ha	22 Oktober 2019	13.37WIB	https://daerah.sindonews.com/read/1451096/174/kebakaran-lahan-dan-hutan-se-indonesia-tembus-857-ribu-hektare-1571726202	24 Menit
13.	Gunung Merapi Erupsi, Masyarakat Tetap Tenang	09 November 2019	06.21 WIB	https://www.bnpb.go.id/gunung-merapi-erupsi-masyarakat-tetap-tenang	09 November 2019	07.35 WIB	https://kumparan.com/kumparannews/gunung-merapi-erupsi-bnpb-imbau-masyarakat-tetap-tenang-1sDeNCkustH	1 jam 14 menit
14.	Banjir Bandang Kembali Terjang Solok Selatan	13 Desember 2019	05.00 WIB	https://bnpb.go.id/banjir-bandang-kembali-terjang-solok-selatan	13 Desember 2019	06:51 WIB	https://wartakota.tribunnews.com/2019/12/13/lagi-solok-selatan-diterjang-banjir-bandang-jembatan-langsung-ambruk	1 jam 51 menit

Penyebaran data dan informasi kejadian bencana *slow on set* mengarah kepada kejadian bencana yang sebelumnya dapat diprediksikan, seperti banjir dan erupsi gunungapi. Sebagai contoh pada kejadian bencana erupsi gunungapi, lembaga yang berwenang, PVMBG – Badan Geologi akan menetapkan status dan rekomendasi terkait dengan gunungapi (umumnya kenaikan status diberlakukan pada durasi 1 – 2 jam kemudian sebelum kejadian). Data dan informasi yang berupa status dan rekomendasi tersebut mengalami proses analisis hingga pernyataan resmi pemerintah pertama ke publik melalui Whatsapp (khusus media massa), Twitter, Facebook, Instagram, youtube dan website BNPB pada durasi 5 – 10 menit. Setelah itu, jika terjadi bencana, dalam durasi 30-60 menit, pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi kedua ke publik yang berisi analisis lebih lanjut berupa dampak dan penanggulangan kejadian bencana. Selain itu juga berita mengenai kegiatan BNPB atau update penanganan bencana oleh BNPB yang diukur dari waktu rilis dikirimkan kepada wartawan (jam tayang di website) sampai dengan dimuat oleh media tersebut.

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran strategis ini adalah:

- Terbangun koordinasi dalam bentuk pertukaran data dan informasi antara BNPB, BMKG, PVMBG-Badan Geologi, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BPBD di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta mitra penanggulangan bencana, seperti Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga Bencana, lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa, lembaga non-pemerintah, dan lembaga donor.
- Integrasi data kependudukan BPS dan informasi geospasial wilayah terdampak dari BNPB.
- Publik mendapatkan informasi terkini terkait tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- Tersebarnya informasi, yang bersumber dari BNPB, di media massabaik lokal, nasional maupun internasional.
- BNPB sebagai acuan media massa dalam menginformasikan kejadian bencana.

Dengan capaian ini informasi kejadian bencana bisa lebih cepat dari yang ditargetkan sehingga memungkinkan masyarakat atau para pemangku kepentingan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi sehingga dengan demikian risiko bencana dapat dikurangi. Berikut ini beberapa penyebaran data dan informasi kejadian bencana yang *slow on set* dari beberapa kejadian bencana yang besar sepanjang tahun 2019 yang bersumber dari BNPB, baik melalui Whatsapp (WA), konferensi pers dan website BNPB www.bnpb.go.id

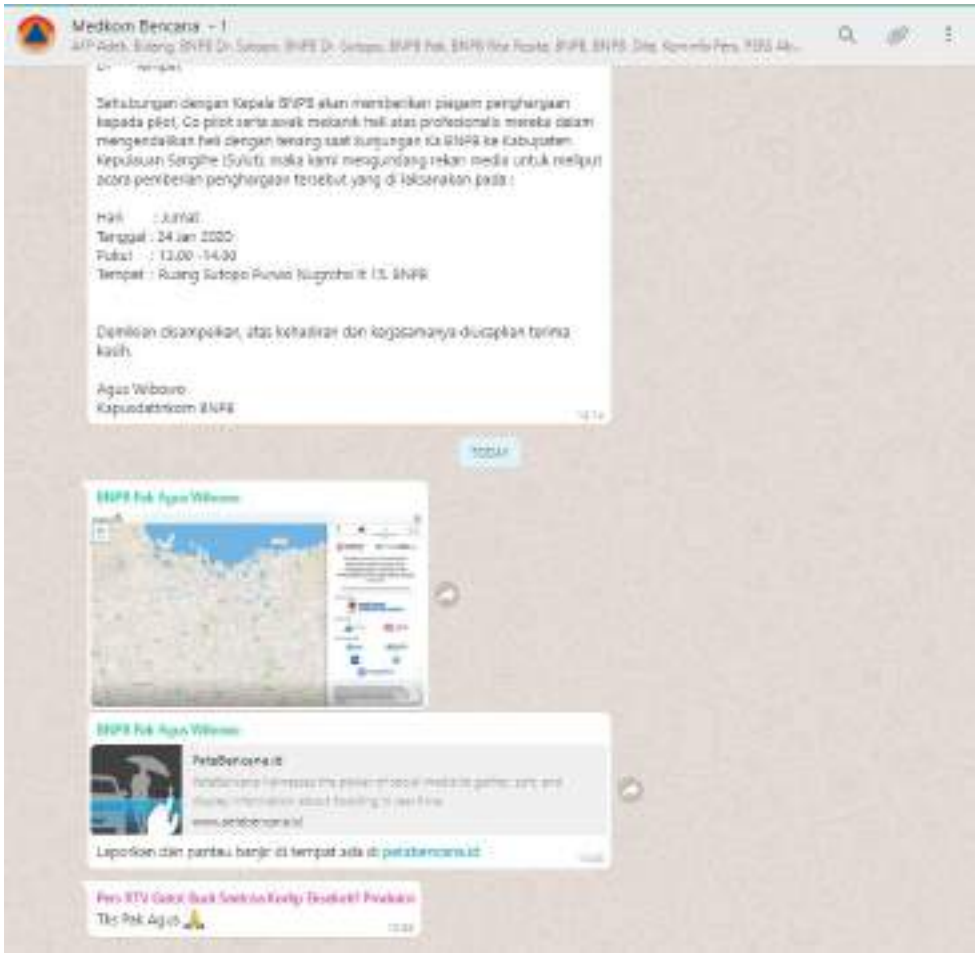

Gambar 65.*WhatsappGroup* Wartawan (Medkom Bencana-1)

Gambar 66. Website resmi BNPB www.bnpb.go.id

Dalam menyebarkan informasi dan mensosialisasikan program kinerja BNPB kinerja BNPB bidang humas menggunakan media sosial. Agar lebih mudah dan efektif dalam membangun budaya sadar bencana untuk masyarakat Indonesia. Hal ini dianggap efektif karena Indonesia termasuk 4 besar dalam pengguna media sosial. Antara lain yang digunakan adalah Fanpage Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube.

Akun resmi media sosial BNPB dan jumlah followersnya (update 21 januari 2020) adalah:

1. Twitter : @BNPB_Indonesia (222.343 followers) mengalami kenaikan 66.25% atau bertambah 57.248 followers dari tahun 2018 sejumlah 165.095.

2. Fanpage Facebook : Badan Nasional Penanggulangan Bencana/@HumasBNPB (88.800 followers) mengalami kenaikan 13% atau bertambah10.247 followers dari tahun 2018 sejumlah 78.553.
3. Instagram : @bnpb_indonesia (93.689 followers) mengalami kenaikan 489,61% atau bertambah77.799 followers dari tahun 2018 sejumlah 93.689.
4. Youtube : BNPB Indonesia (8.144 followers) mengalami kenaikan 221,52% atau bertambah5.611 followersdari tahun 2018 sejumlah 8.144.

Tabel 30. Perbandingan jumlah follower media sosial resmi BNPB dari tahun ke tahun

Tahun	Twitter	Facebook	Instagram	Youtube
2015	65.789	17.437	233	131
2016	70.792	40.092	780	971
2017	99.306	61.116	15.890	2.533
2018	165.095	78.553	93.689	8.144
2019	**222.343**	**88.800**	**136.145**	**13.500**

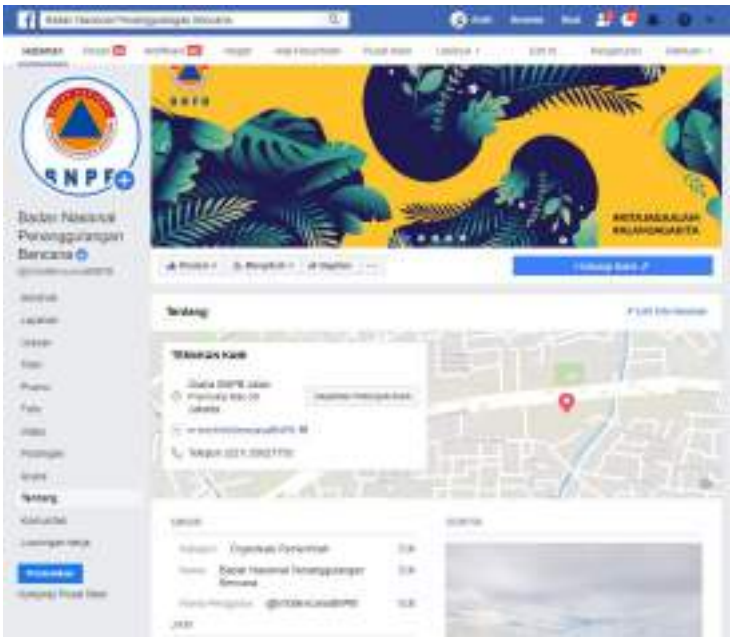

Gambar 67. Fanpage Facebook resmi BNPB @InfoBencanaBNPB

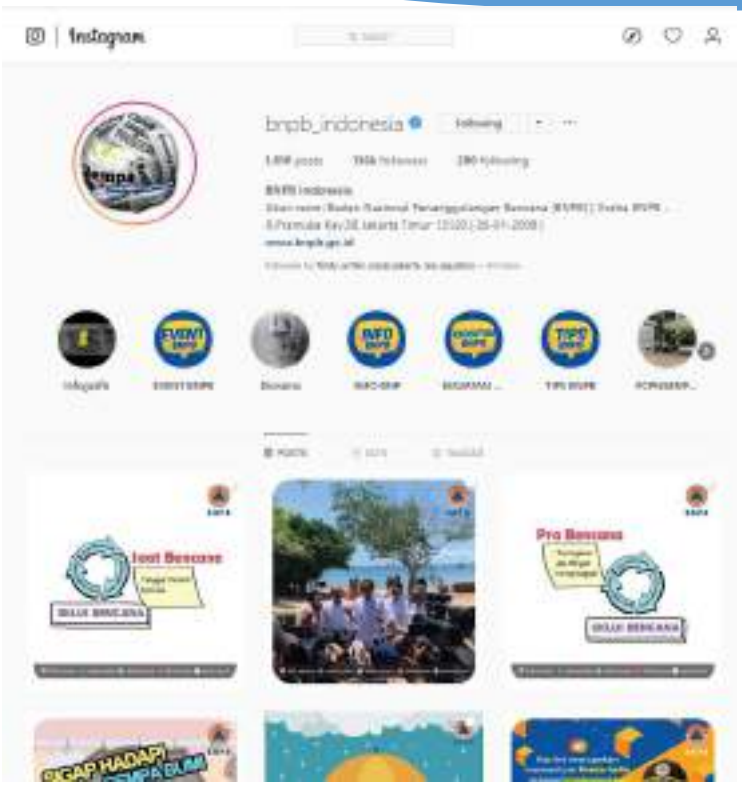

Gambar 68. Instagram resmi BNPB @bnpb_indonesia

Gambar 69. *YouTube* resmi BNPB Indonesia

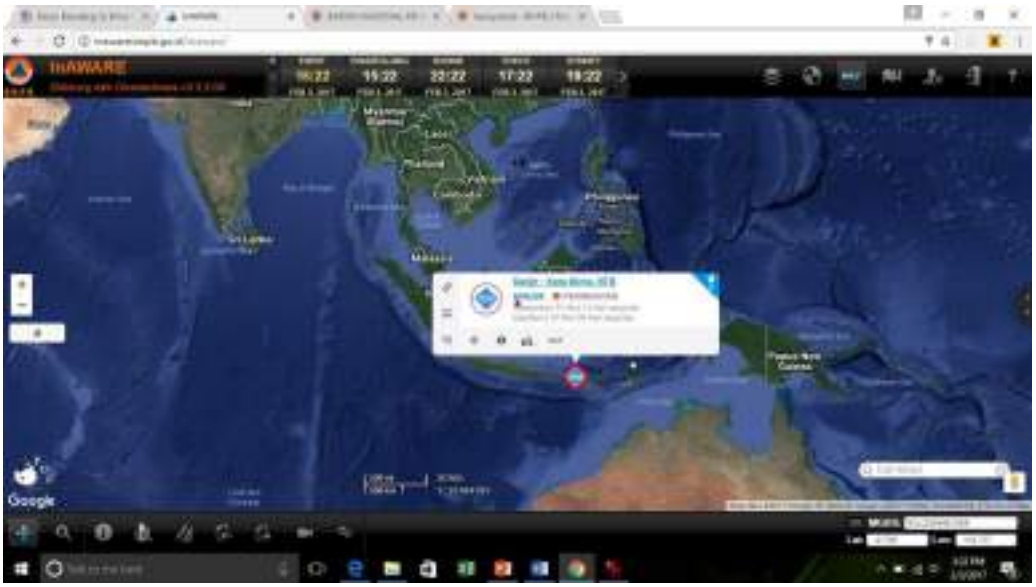

Gambar 70. InAWARE (http://inaware.bnpb.go.id/inaware/)

Gambar 71. Geospasial (http://geospasial.bnpb.go.id/)

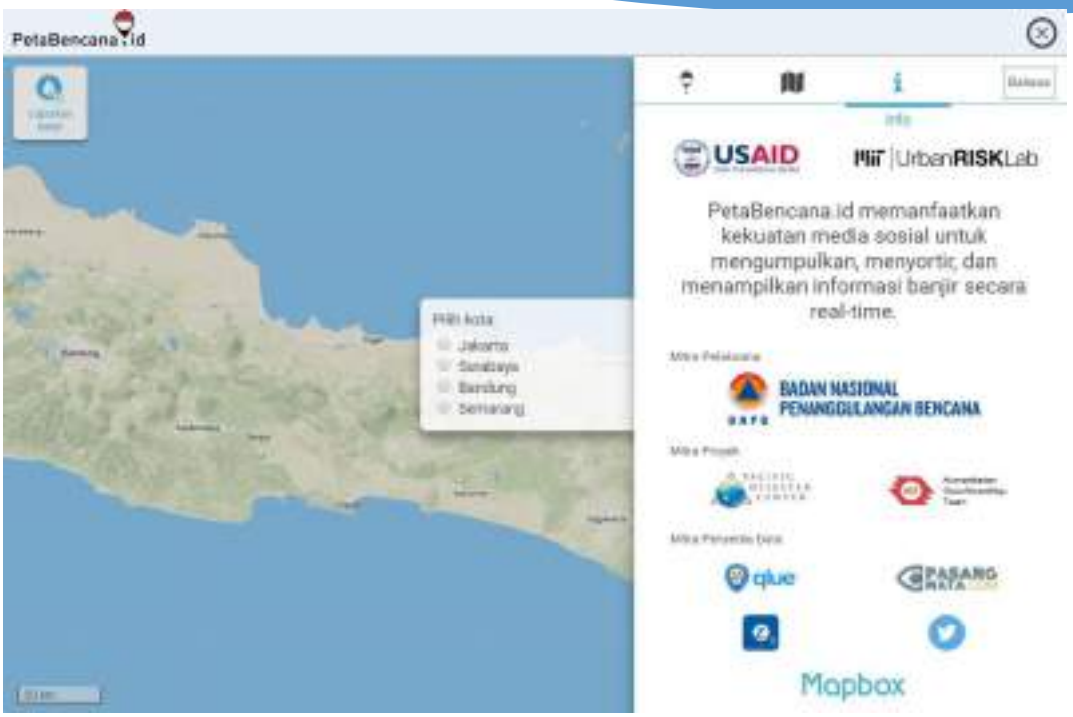

Gambar 72. Peta Bencana (http://petabencana.id/)

Gambar 73. Data Informasi Bencana Indonesia/DIBI (http://bnpb.cloud/dibi/)

Gambar 74. Aplikasi BNPB TV dan Diorama BNPB dapat diakses di Google Playstore

b. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana untuk kejadian bencana *sudden on set* (durasi waktu yang dibutuhkan rata-rata 1 jam 20 menit pascabencana)

Tabel 31. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana untuk kejadian bencana *sudden on set*

No	Kejadian Bencana			Penyebaran Data dan Informasi			Media yang mengacu pada informasi BNPB	Durasi Waktu (jam)
	Jenis Bencana	Waktu dari sumber informasi		Media yang digunakan BNPB dalam menyebarkan Informasi bencana	Waktu			
1.	Lebih dari 800 Jiwa Warga Morotai Mengungsi Akibat Gempabumi 5,3 SR	07 Februari 2019	17.03 WIB	https://www.bnpb.go.id/lebih-dari-800-jiwa-warga-morotai-mengungsi-akibat-gempabumi-53-sr	07 Februari 2019	19.06 WIB	https://www.bnpb.go.id/lebih-dari-800-jiwa-warga-morotai-mengungsi-akibat-gempabumi-53-sr	2 jam 3 menit
2.	23 Orang Korban Longsor Berhasil Dievakuasi di Bolaang Mongondow	27 Februari 2019	18.00 WITA = 17.00 WIB	https://www.bnpb.go.id/23-orang-korban-longsor-berhasil-dievakuasi-di-bolaang-mongondow	27 Febuari 2019	18.00 WIB	https://regional.kontan.co.id/news/sebanyak-23-orang-korban-longsor-berhasil-dievakuasi-di-bolaang-mongondow	1 jam
3..	Gempa M 5,4 Guncang Lombok Timur, 2 Orang Meninggal Dunia dan Ratusan Rumah Rusak	17 March 2019	14.09 WIB	https://bnpb.go.id/gempa-m-54-guncang-lombok-timur-2-orang-meninggal-dunia-dan-ratusan-rumah-rusak	17 March 2019	16.01 WIB	https://daerah.sindonews.com/read/1387587/174/gempa-guncang-lombok-timur-2-wisatawan-meninggal-dan-ratusan-rumah-rusak-1552831878	2 jam 8 menit
4.	7 Korban Longsor di Banjarbaru Berhasil Ditemukan, 5	09 April 2019	04.30 WITA = 03.30 WIB	https://bnpb.go.id/7-korban-longsor-di-banjarbaru-berhasil-	09 April 2019	06.30 WIB	https://kalsel.inews.id/berita/7-korban-longsor-di-banjarbaru-	2 jam 30 menit

No	Kejadian Bencana			Penyebaran Data dan Informasi			Media yang mengacu pada informasi BNPB	Durasi Waktu (jam)
	Jenis Bencana	Waktu dari sumber informasi		Media yang digunakan BNPB dalam menyebarkan Informasi bencana	Waktu			
	Tewas dan 2 Selamat			ditemukan-5-tewas-dan-2-selamat			ditemukan-5-tewas-dan-2-selamat	
5.	Gempabumi M 6,9 Guncang Sebagian Sulteng	12 April 2019	18.40 WIB	https://bnpb.go.id/gempabumi-m-69-guncang-sebagian-sulteng	12 April 2019	19.10 WIB	https://regional.kompas.com/read/2019/04/12/19492271/fakta-terkini-gempa-magnitudo-69-di-banggai-kepulauan-sulteng-yang	30 menit
6.	Longsor Tambang Ilegal Bangka Tengah, Tiga Orang Meninggal Dunia	19 Juni 2019	21.00 WIB	https://www.bnpb.go.id/longsor-tambang-ilegal-bangka-tengah-tiga-orang-meninggal-dunia	19 Juni 2019	21.28 WIB	https://www.tribunnews.com/regional/2019/06/19/longsor-tambang-ilegal-bangka-tengah-tiga-orang-meninggal-dunia	28 menit
7.	Gempa Sarmi Akibatkan 33 Rumah Warga Rusak Berat	20 Juni 2019	00.24 WIB	https://www.bnpb.go.id/gempa-sarmi-akibatkan-33-rumah-warga-rusak-berat	20 Juni 2019	05.20 WIB	https://regional.kompas.com/read/2019/06/21/06385651/33-rumah-rusak-berat-akibat-gempa-di-sarmi-papua	4 jam 55 menit
8.	Dua Meninggal Dunia, Lebih dari	15 Juli 2019	15.00 WIB	https://www.bnpb.go.id/dua-meninggal-dunia-lebih-	15 Juli 2019	15.10 WIB	https://nasional.tempo.co/read/1224764/g	10 menit

No	Kejadian Bencana			Penyebaran Data dan Informasi			Media yang mengacu pada informasi BNPB	Durasi Waktu (jam)
	Jenis Bencana	Waktu dari sumber informasi		Media yang digunakan BNPB dalam menyebarkan Informasi bencana	Waktu			
	2.000 Mengungsi Pascagempa Maluku Utara			dari-2000-mengungsi-pascagempa-maluku-utara			empa-halmahera-selatan-bnpb-2-orang-meninggal-2-000-mengungsi	
9.	Enam Meninggal Dunia Pascagempa Halmahera Selatan M 7,2	17 Juli 2019	09:29 WIB	https://www.bnpb.go.id/enam-meninggal-dunia-pascagempa-halmahera-selatan-m-72	17 Juli 2019	09.44 WIB	https://maluku.inews.id/berita/update-gempa-m-72-di-halmahera-selatan-6-warga-meninggal-berikut-identitasnya	15 menit
10.	Gempa M 6,9 Guncang Beberapa Wilayah Jawa dan Sumatera, Berpotensi Tsunami	02 Agustus 2019	19.03 WIB	https://www.bnpb.go.id/gempa-m-74-guncang-beberapa-wilayah-jawa-dan-sumatera-berpotensi-tsunami	02 Agustus 2019	19.14 WIB	https://pontianak.tribunnews.com/2019/08/02/gempa-m-74-guncang-beberapa-wilayah-jawa-dan-sumatera-catat-daftar-wilayah-siaga-tsunami?page=4	11 menit
11.	Tiga Meninggal Dunia Pascagempa M 6.8 di Wilayah Maluku	26 September 2019	12:38 WIB	https://www.bnpb.go.id/tiga-meninggal-dunia-pascagempa-m-68-di-wilayah-maluku	26 September 2019	12.56 WIB	https://kumparan.com/kumparannews/korban-tewas-akibat-gempa-6-8-m-di-	18 menit

No	Kejadian Bencana			Penyebaran Data dan Informasi			Media yang mengacu pada informasi BNPB	Durasi Waktu (jam)
	Jenis Bencana	Waktu dari sumber informasi		Media yang digunakan BNPB dalam menyebarkan Informasi bencana	Waktu			
							ambon-bertambah-jadi-3-orang-1rwDftuWf2j	
12.	Gempa Tektonik M 5,2 Guncang Kota Ambon Kembali Telan Korban	10 Oktober 2019	20:03 WIB	https://www.bnpb.go.id/gempa-tektonik-m-52-guncang-kota-ambon-kembali-telan-korban	10 Oktober 2019	20:23 WIB	https://nasional.okezone.com/read/2019/10/10/337/2115416/gempa-magnitudo-5-2-di-kota-ambon-telan-korban-jiwa	20 Menit
13.	Beberapa Kali Gempa Susulan Terjadi Pascagempa M 7,1 di Maluku Utara	15 November 2019	01.45 WIB	https://www.bnpb.go.id/beberapa-kali-gempa-susulan-terjadi-pascagempa-m-71-di-maluku-utara	15 November 2019	02.50 WIB	https://www.liputan6.com/news/read/4111375/gempa-susulan-terjadi-pascagempa-magnitudo-71-di-maluku-utara	1 jam 5 menit
14.	Delapan Kecamatan Limapuluh Kota Terdampak Banjir dan Longsor	21 Desember 2019	15.00 WIB	https://bnpb.go.id/delapan-kecamatan-limapuluh-kota-terrampak-banjir-dan-longsor	21 Desember 2019	18.00 WIB	https://republika.co.id/berita/q2w1ru282/8-kecamatan-di-lima-puluh-kota-terdampak-banjir-dan-longsor	3 jam

Penyebaran data dan informasi kejadian bencana *sudden on set* mengarah kepada kejadian bencana yang tidak dapat diprediksikan, seperti gempabumi, puting beliung dan longsor. Sebagai contoh pada kejadian bencana gempabumi, lembaga yang berwenang, yaitu BMKG akan menginformasikan kejadian yang terjadi dalam durasi 5 menit kepada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB dan Kepala BNPB. Kemudian Pusdalops melakukan pengecekan ke lokasi dan pemetaan otomatis dampak gempabumi tersebut. Ini memerlukan waktu 10 menit. Setelah itu, proses analisis awal hingga pernyataan resmi pemerintah awal dengan periode waktu yang dibutuhkan 5 – 10 menit. Pernyataan itu disebarluaskan kepada publik melalui Whatsapp (khusus media massa), twitter, facebook, instagram, youtube dan website BNPB. Selanjutnya pemerintah memberikan pernyataan resmi kedua pada publik dengan periode waktu 30 – 60 menit. Pernyataan resmi kedua berisi analisis lebih lanjut berupa dampak dan penanggulangan. Selain itu juga berita mengenai update penanganan bencana dari BNPB yang diukur dari waktu rilis dikirimkan kepada wartawan (jam tayang di website) sampai dengan dimuat oleh media tersebut.

Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran strategis ini adalah:

- Terbangun koordinasi dalam bentuk pertukaran data dan informasi antara BNPB, BMKG, PVMBG, BIG, BPS, KLHK, BPBD di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta mitra penanggulangan bencana, seperti Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga Bencana, lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa, lembaga non-pemerintah, dan lembaga donor.
- Integrasi data kependudukan BPS dan informasi geospasial wilayah terdampak dari BNPB.
- Akses secara online kejadian bencana dengan internet (InAWARE dan Pantauan Bencana)
- Publik mendapatkan informasi terkini terkait tanggap darurat bencana di lokasi bencana.

- Tersebarnya informasi, yang bersumber dari BNPB, di media massa baik nasional maupun lokal.
- BNPB sebagai acuan media massa dalam menginformasikan kejadian bencana

Konferensi pers

Gambar 75. Live melalui TV, Konferensi Pers Kepala BNPB, Deputi bidang Sistem dan Strategi, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas

Sarana Prasarana Pendukung Kecepatan Informasi

Kecepatan informasi mengenai bencana yang disebarkan oleh BNPB tergantung dari laporan kejadian bencana dari daerah ke pusat. Kejadian bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia dipantau oleh Pusdalops yang bekerja selama 24 jam. Informasi dari daerah dapat secara cepat didapatkan karena bantuan peralatan teknologi informasi yang sangat mendukung. Berdasarkan data bencana BNPB, kecenderungan kenaikan kejadian bencana meningkat, salah satu faktor adalah pencatatan yang lebih baik dilakukan oleh BPBD di tingkat kabupaten dan kota.

Informasi bencana yang didapatkan dari daerah, langsung disebarluaskan ke media massa melalui Whatsapp dan dimuat dalam website, twitter, instagram ataupun facebook BNPB. Dukungan BNPB kepada BPBD dengan pembuatan pusdalops daerah, pemberian bantuan peralatan teknologi informasi dan mobil komunikasi sangat membantu dalam penyampaian informasi bencana. Selain itu, peningkatan sumberdaya di daerah juga dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, sehingga sumber daya daerah semakin handal dalam pelaporan kejadian bencana.

Tantangan

BNPB yang berdiri sejak delapan tahun lalu terus berupaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan penyebarluasan data dan informasi pada setiap kejadian bencana memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berbagai faktor yang melatarbelakangi karakteristik tersebut, seperti kondisi geografis terjadinya bencana, infrastruktur komunikasi setempat, kondisi masyarakat hingga sumberdaya lokal.

BNPB melakukan penyebaran informasi kejadian bencana yang sifatnya *slow* dan *sudden on set* sepanjang tahun 2019. Namun demikian, suatu tantangan khususnya dalam mengukur indikator yang bersifat kualitatif khususnya bagaimana perilaku dan pemahaman publik menyikapi informasi yang disampaikan oleh BNPB, baik secara langsung maupun melalui media massa.

Di sisi lain, sebagai lembaga yang masih relatif baru, BNPB selalu membenahi diri dalam kapasitas sumber daya seperti keterampilan, pengetahuan, dan infrastruktur. Berikut ini beberapa tantangan yang dihadapi BNPB dalam menjawab target dari sasaran rencana strategis.

- Kecepatan penyebaran data dan informasi kejadian bencana dipengaruhi oleh alur data dan informasi dari lapangan ke pusdalops untuk kemudian diteruskan ke bagian Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB (khususnya terkait penyebaran informasi ke publik), kemudian data dan informasi tersebut diberikan dengan skala prioritas pada pimpinan BNPB sebagai pengambil kebijakan tanggap darurat.
- Tim lapangan dari unit kerja lain belum memiliki kapasitas dalam menganalisis kondisidi lokasi bencana secara spasial. Kondisi ini berpengaruh pada pembuatan peta geospasial tematik terkait kejadian bencana.
- Optimalisasi pendirian infrastruktur dan penyediaan jaringan internet melalui v-sat saat kejadian bencana.
- Belum ada prosedur baku atau *standard operating procedure* (SOP) untuk mendelegasikan secara cepat tim Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB ke lokasi bencana.

Capaian Penyebaran Informasi untuk Kejadian Bencana dan Penurunan Risiko

a. Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Dalam memperkuat sarana dan prasara penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pembangunan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB). Pusdalops difungsikan sebagai tempat pemantauan secara terus menerus 24 jam 7 hari, terhadap kondisi dan aktivitas alam.

Informasi terkait dengan bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta diseminasinya. Informasi kebencanaan tidak hanya

menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat prabencana maupun pasca bencana.

Sejak tahun 2012 BNPB sudah membangun 153 Pusdalops yaitu 23 Pusdalops BPBD Provinsi, 115 Pusdalops BPBD Kabupaten dan 15 Pusdalops BPBD Kota. Pada tahun 2019 BNPB menyediakan peralatan TIK yang dapat digunakan untuk pertukaran data dan informasi antara BNPB dan BPBD peralatan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memabangun pusdalops yang lebih baik.

Diharapkan Pemerintah daerah dapat mempersiapkan pengambilan dan melakukan instalasi serta dapat memelihara peralatan yang telah diberikan kepada BPBD tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas daerah dalam melakukan pemantauan dan pengendalian bencana secara cepat, tepat dan terkoordinasi.

Peralatan TIK pusdalops akan diberikan kepada 20 lokasi, yaitu :

1. BPBD Kabupaten Solok (Provinsi Sumatera Barat);
2. BPBD Kabupaten Kep. Mentawai (Provinsi Sumatera Barat);
3. BPBD Provinsi Lampung;
4. BPBD Provinsi Bangka Belitung;
5. BPBD Provinsi Kepulauan Riau;
6. BPBD Kabupaten Garut (Provinsi Jawa Barat);
7. BPBD Kabupaten Pandeglang (Provinsi Banten);
8. BPBD Kabupaten Tegal (Provinsi Jawa Tengah);
9. BPBD Kabupaten Kudus (Provinsi Jawa Tengah);
10. BPBD Kota Semarang (Provinsi Jawa Tengah);

11. BPBD Kota Jogjakarta (Provinsi DI. Yogyakarta);
12. BPBD Kabupaten Sidoarjo (Provinsi Jawa Timur);
13. BPBD Kabupaten Lamongan (Provinsi Jawa Timur);
14. BPBD Kabupaten Malang (Provinsi Jawa Timur);
15. BPBD Kabupaten Magetan (Provinsi Jawa Timur);
16. BPBD Kabupaten Tanah Bumbu (Provinsi Kalimantan Selatan);
17. BPBD Kabupaten Poso (Provinsi Sulawesi Tengah);
18. BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara;
19. BPBD Kabupaten Bone Bolango (Provinsi Gorontalo);
20. BPBD Kota Ternate (Provinsi Maluku Utara).

b. Respon Media Massa

Melalui mesin monitoring, berita bencana yang bersumber dari BNPB sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilacak dengan kata kunci 'BNPB'. Sepanjang tahun 2019, berita terkait bencana didominasi sumber BNPB dengan narasumber Kepala BNPB dan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB. Ini menunjukkan bahwa BNPB sangat cepat dan responsif pada setiap kejadian bencana maupun informasi perkembangan terkini penanggulangan bencana di Indonesia. Data tersebut diakses pada http://bnpb.monitoring.web.id/, sepanjang tahun 2019.

Gambar 76. Media Monitoring berita bencana

Total berita pada periode Januari – Oktober tahun 2019 sebanyak 15.898 berita dengan isu yang terbanyak di bicarakan media massa yaitu kebakaran hutan dan lahan yang melanda Riau. Puncak pemberitaan terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdapat pada bulan September 2019 sebanyak 2.064 berita diantaranya pemberitaan mengenai gempa bumi yang melanda Kota Ambon.

Tone berita Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdiri dari 11.022 berita positif, 26 negatif, dan 4.850 netral. Berita negatif diantaranya tentang DPR mengkritisi data karhutla yang dimiliki oleh BNPB yang menyebutkan bahwa sebagian besar peyebab karhutla adalah ulah manusia.

Rincian berita dari media online mendominasi berita Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan jumlah 10.893 berita (69%), televisi 2.714 berita (17%), cetak 2.152 berita (14%), dan radio 139 berita (1%). Narasumber Internal yang banyak dikutip media yaitu Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2.183 berita), dan Narasumber Eksternal yang dominan diberitakan media adalah Joko Widodo, Presiden RI (438 berita).

Media Tribunnews.com menjadi media terbanyak yang memberitakan terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan jumlah 917 berita, diikuti Antaranews.com 713 berita dan CNN Indonesia TV 604 berita.

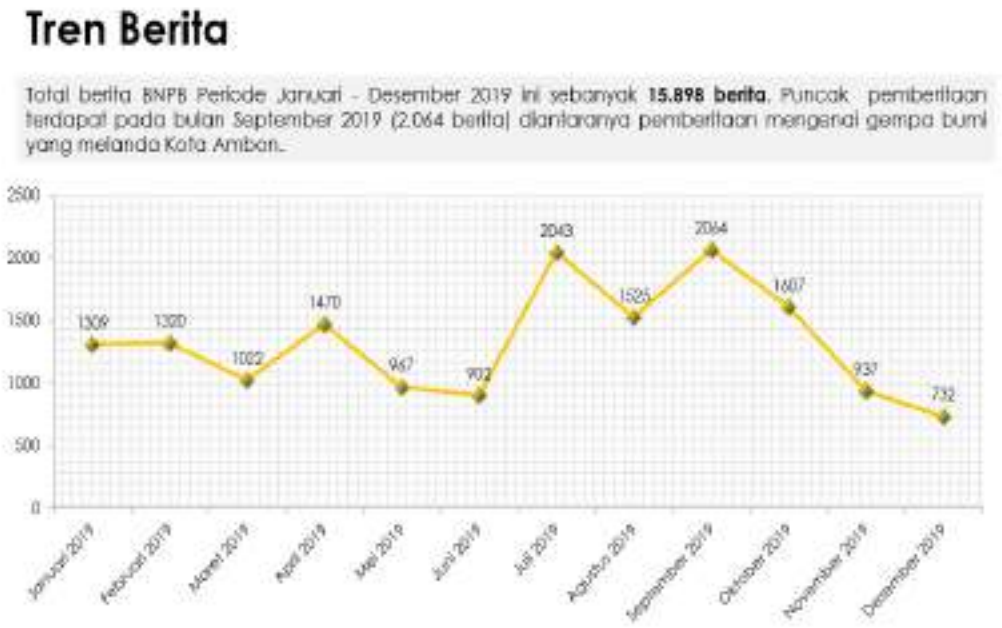

Gambar 77. Tren Berita BNPB Tahun 2019

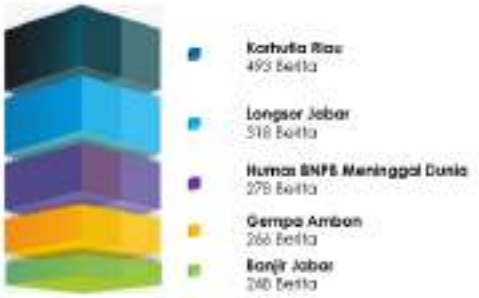

Top Isu

Lima top isu yang dominan adalah Karhutla Riau (493 berita), Longsor Jabar (316 berita) Humas BNPB Meninggal Dunia (278 berita), Gempa Ambon (266 berita), Banjir Jabar (248 berita).

Sebaran Isu Di Media

Selama periode Januari - Desember 2019, isu mengenai Karhutla Riau terbanyak diberitakan di **Tribunnews.com** (30 berita) dari total 493 berita terkait isu tersebut.

Narasumber Internal yang banyak dikutip media yaitu Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2.183 berita).

Narasumber Eksternal yang banyak dikutip media yaitu Joko Widodo, Presiden RI (438 berita).

Jenis Dan Sebaran Media

MEDIA ONLINE mendominasi berita BNPB dengan jumlah 10.893 berita (69%), televisi 2.714 berita (17%), cetak 2.152 berita (14%), dan radio 139 berita (1%).

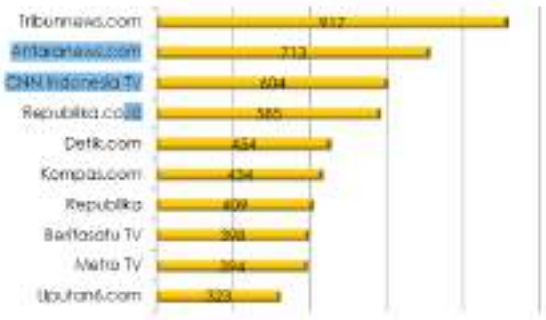

Tribunnews.com menjadi media terbanyak yang memberitakan terkait BNPB dengan total 917 berita, diikuti **Antaranews.com** (713 berita), dan **CNN Indonesia Tv** (604 berita).

Pemetaan Berita Bencana

Lokasi yang dominan dengan pemberitaan bencana yaitu Kota Jakarta Timur (1.745 berita), Kota Jakarta Pusat (1.481 berita), dan Kota Pekanbaru (912 berita).

Tabel 32. Pemberitaan Berdasarkan Topik Berita

Topik Berita	Jumlah
Kebakaran Hutan & Lahan	3593
Banjir	1975
Pencegahan & Kesiapsiagaan	1795
BNPB	1507
Gempa Bumi	1477
Tanah Longsor	962
Letusan Gunung Api	898
Kekeringan	865
Bencana	447
Tanggap Darurat	434
Angin Puting Beliung	427
Rehabilitasi & Rekonstruksi	384
Logistik & Peralatan	317

Topik Berita	Jumlah
Mitigasi Bencana	261
Pengurangan Risiko Bencana	215
Gelombang Pasang	72
Budaya Sadar Bencana	51
Sekolah/Madrasah Aman Bencana	43
Abrasi	37
Tsunami	22
Kemanusiaan	16
Kebakaran Hutan Dan Lahan	12
Kecelakaan Transportasi	11
Siap Untuk Selamat	10
Kenali Bahayanya Kurangi Risikonya	9
Kebakaran Hutan & Lahan	4
Kecelakaan Industri	2

c. Diorama Edukasi Bencana

BNPB tidak hanya melakukan penyebaran data dan informasi ke publik pada konteks kejadian bencana, tetapi juga penyebaran informasi prabencana. Kegiatan unggulan yang saat ini menjadi trending topik yaitu diorama edukasi bencana. Diorama edukasi bencana merupakan media untuk meningkatkan pemahaman kepada publik terkait risiko dan penanggulangan bencana di Indonesia. Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB mencatat kelompok pengunjung sangat beragam, mulai dari Playgroup/TK, siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), mahasiswa, para menteri, delegasi asing dan mitra kerja BNPB, nasional dan internasional.

Sepanjang kunjungan diorama BNPB untuk pelayanan publik dalam edukasi bencana kepada masyarakat luas. Pusdatinmas menerima telah menerima 46 kunjungan dari berbagai sekolah/universitas/instansi dengan jumlah 2.327 peserta kunjungan yang telah teredukasi di tahun 2019. Angka tersebut mengalami kenaikan 150 orang dibandingkan tahun 2018 sejumlah 2.177 pengunjung. Kunjungan tahun 2019 terdiri dari 1.326 pelajar, 576 mahasiswa, dan 425 orang dari kalangan umum.

Gambar 78. Kunjungan Diorama Edukasi Bencana

d. Penyebaran Informasi Kebencanaan Melalui Radio

Kegiatan Layanan Budaya Sadar Bencana dalam menyelenggarakan Budaya Sadar Bencana di 82 lokasi Indonesia. Strategi yang dilakukan adalah ILM Budaya Sadar Bencana melalui media radio, yakni sandiwara radio, iklan layanan masyarakat, dan talkshow. Selain itu menggunakan kesenian tradisional menggunakan wayang di lima daerah, antara lain Pekalongan, Pandeglang, Kabupaten Bogor, Gresik, dan Bali.

Penayangan ILM dan Sandiwara Radio antara lain:

Provinsi Papua (1) Merauke, (2) Jayapura, (3) Sarmi, (4) Kepulauan Yapen. Provinsi Papua Barat : (5) Kota Sorong, (6) Manokwari, (7) Raja Ampat, (8) Telok Wondana, (9) Teluk Bintuni. Provinsi Maluku : (10) Kota Ambon, (11) Seram Bagian Barat, (12) Seram Bagian Timur, (13) Maluku Tengah, (14) Maluku Tenggara, (15) Buru. Provinsi Maluku Utara : (16) Kota Ternate, (17) Pulau Morotai, (18) Halmahera Utara, (19) Tidore Kepulauan, (20) Kepulauan Sula. Provinsi Nusa Tenggara Timur : (21) Kota Kupang, (22) Ngada, (23) Ende, (24) Sikka, (25) Manggarai, (26) Alor, (27) Belu. Provinsi Gorontalo : (28) Gorontalo, (29) Kota Gorontalo, (30) Gorontalo Utara, (31) Boalemo. Provinsi Sulawesi Barat : (32) Mamuju, (33) Polaweli Mandar. Provinsi Sulawesi Selatan (34) Maros, (35) takalar, (36) Gowa, (37) Luwu Timur, (38) Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Tengah : (39) Sigi, (40) Donggala, (41) Poso, (42) Parigi Moutong, (43) Morowali, (44) Kota Palu. Provinsi Sulawesi TenggaraL (45) Kolaka, (46) Konawe, (47) Kota Kendari. Provinsi Sulawesi Utara : (48) Kota Bitung, (49) Minahasa Utara, (50) Minahasa Selatan, (51) Sangihe, (52) Kota Manado. Provinsi Kalimantan Selatan : (53) Kota Baru. Provinsi Kalimantan Utara : (54) Tarakan, (55) Nunukan. Provinsi Kalimantan Tengah : (56) Kotawaringin Barat, (57) Kotawaringin Timur. Provinsi Kalimantan Timur : (58) Kutai Kartanegara, (59) Bontang. Provinsi Sumatera Barat : (60) Sijunjung, (61) Limapuluh Kota. Provinsi Sumatera Selatan : (62) Palembang. Provinsi Sumatera Utara (63) Kaban Jahe. Provinsi Bangka Belitung : (64) Pangkal Pinang, (65) Pulau Belitung. Provinsi Riau : (66) Pekanbaru, (67) Dumai. Provinsi Jambi : (68) Tebo. Provinsi Banten : (69) Kota Cilegon. Provinsi DKI Jakarta : (70) Jakarta. Provinsi Jawa Barat : (71) Garut.

Provinsi D.I. Yogyakarta : (72) Bantul. Provinsi Jawa Timur : (73) Kota Surabaya, (74) Ponorogo, (75) Blitar, (76) Situbondo.

Budaya Sadar Bencana melalui kesenian tradisional : (77) Pekalongan, Jawa Tengah, (78) Gresik, Jawa Timur, (79) Karangasem, Bali, (80) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (81) Pandeglang, Provinsi Banten.

Talkshow Interaktif di radio MNC 104.6 FM Trijaya, (82) Jakarta, DKI Jakarta.

e. Sosialisasi dan Edukasi Bencana melalui media cetak antara lain terdapat buku-buku bencana.

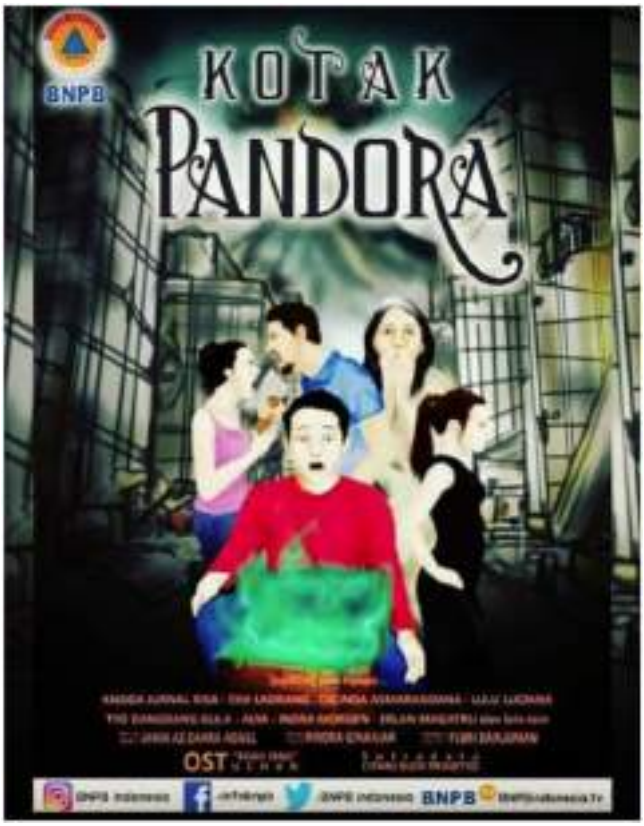

Gambar 79. Edukasi Bencana melalui buku

Gambar 80. Jurnal Dialog PB dan Majalah Gema BNPB

f. Pelayanan Perpustakaan Digital

Perpustakaan BNPB mempunyai fungsi yaitu menambah kapasitas pegawai BNPB dan mengedukasi masyarakat tentang penanggulangan bencana. Perpustakaan BNPB memiliki 3039 koleksi yang terbagi atas buku dengan subjek kebencanaan dan subjek umum. Dengan total 318 anggota terdiri dari anggota pegawai BNPB dan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman di era digital ini, perpustakaan BNPB pun mengembangkan diri menjadi perpustakaan digital dengan laman perpustakaan.bnpb.go.id. Sejak 2016 perpustakaan BNPB telah bisa diakses dengan komputer dan telepon genggam. Pengguna dapat membaca dan mengunduh buku-buku digital secara gratis dimanapun dan kapanpun.

Penghargaan Tahun 2019

1. **Peta Bencana menerima penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA)**

   Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima penghargaan United Nations Public Sector Awards 2019 pada Senin 24 Juni 2019 di Baku, Azerbaijan. BNPB mendapatkan penghargaan tersebut untuk kategori *Ensuring Integrated Approaches in Public Sector Institutions*.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin yang didampingi Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi menerima piagam dan sertifikat United Nations Public Service Awards (UNPSA) untuk pencapaian platform inovatif Petabencana.id. Under-Secretary General of DESA Liu Zhenmin menyerahkan penghargaan tersebut kepada Menteri PANRB sekaligus sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia Syafruddin. Penganugerahan ini menjadi bagian acara United Nations Public Service Forum dengan tema *'Achieving the Sustainable Development Goals through Effective Delivery of Services, Innovative Transformation and Accountable Institutions'* yang dibuka oleh Wakil Presiden Azerbaijan Mehriban Aliyeva.

United Nations Public Service Awards
Winner
Category on Ensuring Integrated Approaches in the Public Sector Institutions
This certificate is given in recognition of the contribution of
PetaBencana.id
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Republic of Indonesia
for innovation and excellence in public service supporting the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development
Liu Zhenmin
Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs
23 June 2019

Petabencana.id merupakan penghargaan yang keempat kalinya untuk kategori yang sama bagi Indonesia. Platform ini sebagai salah satu dari beberapa produk kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang dikirimkan melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

PetaBencana.id merupakan platform yang memuat peta kebencanaan banjir, di wilayah Jabodetabek, Kota Bandung, Kota Surabaya dan Kota Semarang. Tahun ini akan ekspansi ke tingkat nasional, ke seluruh Indonesia, tidak hanya terbatas pada kota-kota besar. Informasi yang dikumpulkan pun tidak terbatas bencana banjir, namun bencana yang lain juga, yaitu angin puting beliung, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi gunung api.

Petabencana.id memungkinkan para pengguna untuk aktif dalam melaporkan keadaan banjir di wilayahnya secara *realtime*. Namun laporan tersebut akan diverifikasi dan disebarkan secara langsung melalui peta publik. Pengguna media sosial dan aplikasi pesan instan kini dapat melaporkan situasi banjir di sekitar dengan mudah. Pengguna Twitter cukum mengirim cuitan ke @petabencana dengan #banjir dan BencanaBot akan otomatis memandu pengguna untuk mengisi laporan. Pengguna Telegram juga dengan mudah untuk melaporkan banjir dengan mengirim pesan “/banjir” ke @BencanaBot, yang akan membantu pengguna membuat laporan. Pengguna dapat menambahkan deskripsi, foto, tinggi banjir dan detail lokasi dalam laporan.

Selain kategori yang dimenangkan PetaBencana.id, kategori yang dilombakan yaitu *Offering inclusive and equitable services for not leave anyone behind, Developing effective and responsible public institutions, Promoting digital transformation in public sector institutions,* dan *Promoting gender-sensitive public services to achieve the SDGs*.

Penghargaan ini digagas Badan PBB untuk Masalah Ekonomi dan Sosial atau *United Nations Department of Economic and Social Affairs*. Program yang digiatkan oleh badan ini yaitu menciptakan 17 tujuan sebagai *Sustainable Development Goals*

(SDGs). Tujuan yang ditargetkan hingga 2030 ini salah satu membahas mengenai *Climate Action*. *Climate action* ini sangat terkait dengan isu perubahan iklim yang dirasakan oleh seluruh dunia. Kategori yang dimenangkan oleh PetaBencana.id ini merupakan bagian dari topik SDGs pada tujuan *Climate Action* tersebut.

2. Penghargaan Government Social Media Summit 2019

BNPB menerima penghargaan dari Government Social Media Summit 2019 (GSM Award 2019) sebagai pemenanguntuk Kategori *Best Collaboration* dengan tema kolaborasi Perubahan Iklim. Dipersembahkan Awrago bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, Perpustakaan Nasional, Jakarta *Creative Hub* dan *partner* lainnya.

3. Kepala BNPB Mendapatkan Penghargaan sebagai Tokoh Standarisasi Nasional 2019 dari BSN

Kepala BNPB Doni Monardo menerima penghargaan Tokoh Standarisasi 2019 dari Badan Standaridasi Nasional pada Kamis, (10/10/2019). Penghargaan tersebut merujuk pada kategori Pemerintah Pusat. Kepala BNPB mendapatkan medali karena berkontribusi besar dalam pengembangan dan memperjuangkan SPK melalui kebijakan pemerintah, serta berkolaborasi dengan BSN mempromosikan SNI 8357:2017.

SNI tersebut diimplementasikan pada 584 desa rawan tsunami di sepanjang selatan Pulau Jawa dan 24 kabupaten/kota melalui ekspedisi desa tangguh bencana tsunami. Selain itu, sejak 2013, BNPB telah memiliki Komtek 13-08 Penanggulangan Bencana. Kontek ini telah menghasilkan 17 SNI tentang penanggulangan bencana dan dua ISO,

yaitu ISO tentang *communities based landslide early warning system* dan ISO tentang EWS lainnya yang masuk dalam tahapan FDIS 22328-1. Keberpihakan BNPB pada standarisasi dan sertifikasi ditujukan untuk melengkapi sistem penanggulangam bencana yang makin baik di Indonesia. Standarisasi untuk ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

4. Kepala BNPB Doni Monardo menerima penghargaan "Trend Setter for Green Environment".

Kepala BNPB Doni Monardo menerima penghargaan "*Trend Setter for Green Environment*" atas kiprahnya dalam kepedulian terhadap lingkungan. Penghargaan diberikan oleh Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi dalam perhelatan Anugerah Indonesia Maju 2018-2019.

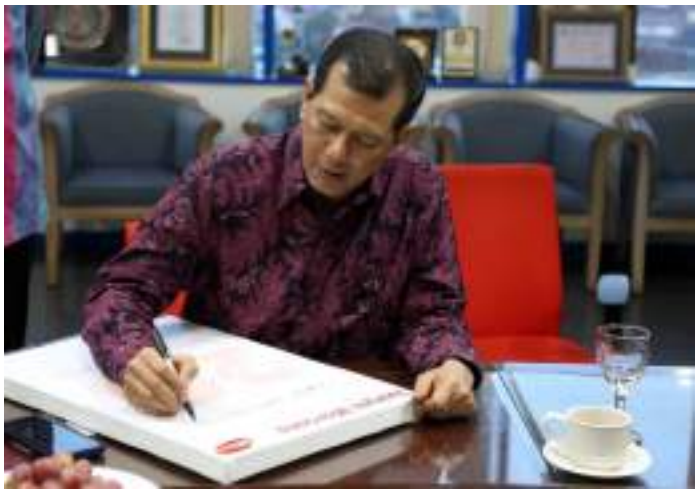

Gambar 81. Kepala BNPB Doni Monardo menerima penghargaan *"Trend Setter for Green Environment"*

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 BNPB mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.178.837.974.000,- yang terdiri atas dana rutin sebesar Rp. 614.425.671.000,-, dana siap pakai sebesar Rp. 7.326.662.053.000,- serta hibah bantuan luar negeri sebesar Rp. 237.747.250.000,- yang terbagi menjadi 3 program dengan realisasi sebagai berikut:

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	212,232,237,000	210,811,094,086	99.33%
2	Program Penanggulangan Bencana	7,955,802,737,000	7,871,090,263,230	98.94%
	2.1 Dana Rutin	391,393,434,000	382,746,812,032	97.79%
	2.2 Dana Siap Pakai (DSP)	7,326,662,053,000	7,250,236,201,198	98.96%
	2.3 Hibah Bantuan Luar Negeri	237,747,250,000	237,747,250,000	100.00%
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	10,800,000,000	10,772,301,876	99.74%
TOTAL		**8,178,834,974,000**	**8,092,673,659,192**	**98.95%**

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018, terdapat kenaikan persentase realisasi yaitu 98.92% di tahun 2018 menjadi 98.95% di tahun 2019. Beberapa hal yang mendukung peningkatan realisasi anggaran dan efisiensi anggaran diantaranya:

1. Peningkatan pemantauan secara berkala pelaksanaan program dan anggaran pada masing-masing unit kerja eselon II.
2. Percepatan pelaksanaan pengeluaran belanja melalui penetapan pedoman dan surat edaran oleh Sekretaris Utama selaku KPA:
    a. Nota dinas Sekretaris Utama Nomor 175/SU/PR.04.02/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang batas akhir revisi RKA-K/L tahun 2019.
    b. Surat edaran Sekretaris Utama Nomor SE-24/BNPB/9/2019 tentang Percepatan Penyelesaian Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan BNPB.
    c. Surat edaran Sekretaris Utama Nomor SE-25/BNPB/10/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2019.

Disamping dana yang terdapat dalam DIPA BNPB, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan dana hibah Rehabilitasi Rekonstruksi pasca bencana atas dasar pengajuan dari BNPB sebesar Rp.3.160.228.546.000,- untuk 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.1972.459.800.000,- untuk bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di provinsi Sulawesi Tengah dan tahap kedua untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di berbagai daerah di Indonesia sebesar Rp.1.187.768.746.000,-.

BAB IV
PENUTUP

Mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana merupakan upaya bersama yang melibatkan pentahelix yaitu pemerintah, kalangan pengusaha, komunitas, media, dan akademisi. Selain itu nilai sinergitas dan gotong-royong merupakan nilai yang patut dijunjung tinggi di bumi nusantara. Hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana. Nilai sinergitas bermakna bahwa penanggulangan bencana di Indonesia dapat berlangsung efektif. Sedangkan gotong-royong harus diupayakan berbagai pihak sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya.

Hal ini sejalan dengan arahan presiden dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana di Sentul pada tanggal 4 Februari 2020. Beberapa arahan terkait dengan upaya penanggulangan bencana yaitu:

1. Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama bersinergi untuk upaya Pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan
2. Setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontijensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan
3. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan denganpendekatan kolaboratif, pentahelix yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat serta dukungan media massa
4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam Penanggulangan bencana
5. Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung Penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum.

Sepanjang tahun 2019, kinerja BNPB menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut akan menjadi pendorong BNPB untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih optimal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

B N P B

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Letnan Jenderal TNI Doni Monardo**

Jabatan : **Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

Pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2019

Kepala BNPB,

Doni Monardo

Letnan Jenderal TNI

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

TAHUN : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2019
1.	Meningkatnya ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah	50%
		Persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	10%
2.	Meningkatnya kemampuan BNPB dalam merespon kejadian bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani (direspon)	100%
		Persentase Kabupaten/Kota rawan bencana yang memiliki ketersediaan logistik dan peralatan serta kemampuan teknis untuk kesiapsiagaan dan darurat bencana	90%
3.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat pascabencana	Rata-rata peningkatan indeks pemulihan pascabencana	3,5%
4.	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana	3 Jam

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	Rp. 212.232.237.000
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	Rp. 10.800.000.000
3. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 7.955.802.737.000

JAKARTA, DESEMBER 2019
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Doni Monardo

Lampiran 2. Pernyataan Telah Direviu

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200
Situs: *http://www.bnpb.go.id*

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2020
Inspektur Utama

Tetty Saragih
NIP. 196304151983022001

Lampiran 3. Perbandingan capaian kinerja periode 2015-2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana	9%	9%	15%	21%	25%	26.50%
Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	1 Hari/ 24 Jam	1 Hari/ 24 Jam	1 Hari/ 24 Jam	1 Hari/ 24 Jam	1 Hari/ 24 Jam	1 Hari/ 24 Jam
Terselesaikannya pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	60%	63.75%	65%	69.49%	65%	68.09%
Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	40%	45.50%	45%	50.20%	50%	64.26%
Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana	5 Jam	3.5 Jam	4.5 Jam	2.26 Jam	4 jam	1 jam 9.5 menit

Lampiran 4. Rekapitulasi RPB Tahun 2012 - 2019

No.	Provinsi	Kabupaten	Tahun Penyusunan
1	ACEH	ACEH UTARA	2012
2	BALI	GIANYAR	2012
3	BANTEN	LEBAK	2012
4	BENGKULU	REJANG LEBONG	2012
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	2012
6	GORONTALO	KOTA GORONTALO	2012
7	JAMBI	KERINCI	2012
8	JAWA BARAT	BANDUNG	2012
9	JAWA TENGAH	KEBUMEN	2012
10	JAWA TIMUR	MALANG	2012
11	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	2012
12	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR	2012
13	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT	2012
14	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	2012
15	KEPULAUAN RIAU	BINTAN	2012
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA TANJUNG PINANG	2012
17	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	2012
18	MALUKU	BURU	2012
19	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	2012
20	NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA	2012
21	PAPUA	NABIRE	2012
22	PAPUA BARAT	MANOKWARI	2012
23	RIAU	INDRAGIRI HILIR	2012
24	SULAWESI BARAT	MAMUJU	2012
25	SULAWESI SELATAN	WAJO	2012
26	SULAWESI TENGAH	TOLI-TOLI	2012
27	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	2012
28	SUMATERA BARAT	SOLOK	2012
29	SUMATERA SELATAN	LAHAT	2012
30	SUMATERA UTARA	LANGKAT	2012

No.	Provinsi	Kabupaten	Tahun Penyusunan
31	SULAWESI UTARA	MINAHASA	2012
32	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	2012
33	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	2012
34	ACEH	ACEH JAYA	2013
35	ACEH	PIDIE	2013
36	ACEH	ACEH BESAR	2013
37	BALI	BADUNG	2013
38	BALI	KOTA DENPASAR	2013
39	BANTEN	PANDEGLANG	2013
40	BENGKULU	BENGKULU UTARA	2013
41	BENGKULU	MUKOMUKO	2013
42	BENGKULU	KOTA BENGKULU	2013
43	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KULON PROGO	2013
44	JAWA TENGAH	CILACAP	2013
45	JAWA TENGAH	PURWOREJO	2013
46	JAWA TIMUR	PACITAN	2013
47	JAWA TIMUR	SUMENEP	2013
48	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	2013
49	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	2013
50	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	2013
51	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	2013
52	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	2013
53	SUMATERA BARAT	AGAM	2013
54	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	2013
55	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT	2013
56	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	2013
57	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	2013
58	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI	2013
59	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	2013
60	SUMATERA UTARA	NIAS	2013
61	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	2013

No.	Provinsi	Kabupaten	Tahun Penyusunan
62	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	2013
63	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	2013
64	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	2013
65	SULAWESI UTARA	KOTA MOBAGU	2013
66	SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	2013
67	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN	2013
68	SULAWESI UTARA	MINAHASA TENGGARA	2013
69	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW	2013
70	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW UTARA	2013
71	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	2013
72	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2013
73	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SITARO	2013
74	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE	2013
75	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD	2013
76	NTB	LOMBOK TENGAH	2014
77	NTB	LOMBOK TIMUR	2014
78	NTB	LOMBOK BARAT	2014
79	NTB	SUMBAWA	2014
80	NTB	SUMBAWA BARAT	2014
81	NTB	DOMPU	2014
82	NTB	KOTA BIMA	2014
83	NTB	BIMA	2014
84	BALI	TABANAN	2016
85	BANTEN	KOTA CILEGON	2016
86	GORONTALO	GORONTALO	2016
87	JAWA TENGAH	DEMAK	2016
88	JAWA TENGAH	KENDAL	2016
89	JAWA TIMUR	GRESIK	2016
90	JAWA TIMUR	LAMONGAN	2016
91	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	2016
92	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	2016

No.	Provinsi	Kabupaten	Tahun Penyusunan
93	PAPUA	SARMI	2016
94	SULAWESI SELATAN	GOWA	2016
95	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	2016
96	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	2016
97	SULAWESI TENGAH	DONGGALA	2016
98	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	2016
99	BALI	BULELENG	2017
100	BANTEN	TANGERANG	2017
101	BENGKULU	SELUMA	2017
102	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SLEMAN	2017
103	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	2017
104	JAMBI	SAROLANGUN	2017
105	JAWA BARAT	PANGANDARAN	2017
106	JAWA BARAT	CIAMIS	2017
107	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	2017
108	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	2017
109	JAWA TENGAH	MAGELANG	2017
110	JAWA TIMUR	JEMBER	2017
111	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	2017
112	JAWA TIMUR	BOJONEGORO	2017
113	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	2017
114	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	2017
115	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	2017
116	KALIMANTAN BARAT	SINTANG	2017
117	KALIMANTAN BARAT	LANDAK	2017
118	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	2017
119	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BARU	2017
120	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS	2017
121	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA	2017
122	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	2017
123	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	2017

No.	Provinsi	Kabupaten	Tahun Penyusunan
124	LAMPUNG	TANGGAMUS	2017
125	MALUKU	KOTA AMBON	2017
126	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA	2017
127	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	2017
128	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	2017
129	NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE	2017
130	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI	2017
131	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	2017
132	PAPUA BARAT	KOTA SORONG	2017
133	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR	2017
134	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	2017
135	SULAWESI TENGAH	MOROWALI	2017
136	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	2017
137	SULAWESI TENGAH	POSO	2017
138	SULAWESI TENGAH	SIGI	2017
139	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA	2017
140	SULAWESI TENGGARA	KONAWE	2017
141	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	2017
142	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN	2017
143	SUMATERA UTARA	DAIRI	2017
144	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN	2017
145	JAWA BARAT	CIREBON	2018
146	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	2018
147	JAWA TIMUR	LUMAJANG	2018
148	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	2018
149	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA	2018
150	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	2018
151	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	2018
152	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	2018
153	MALUKU	MALUKU TENGGARA	2018
154	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR	2018
155	MALUKU UTARA	HALMAHERA TIMUR	2018

No.	Provinsi	Kabupaten	Tahun Penyusunan
156	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	2018
157	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR	2018
158	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	2018
159	PAPUA	MERAUKE	2018
160	PAPUA	BIAK NUMFOR	2018
161	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	2018
162	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT	2018
163	PAPUA BARAT	SORONG	2018
164	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA	2018
165	SULAWESI SELATAN	BANTAENG	2018
166	SULAWESI SELATAN	MAROS	2018
167	SULAWESI SELATAN	TAKALAR	2018
168	ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	2018
169	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	2018
170	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	2018
171	SUMATERA UTARA	KARO	2018
172	SUMATERA UTARA	DAIRI	2018
173	KEPULAUAN RIAU	LINGGA	2018
174	ACEH	NAGAN RAYA	2019
175	SUMATERA UTARA	GUNUNG SITOLI	2019
176	JAWA BARAT	SUKABUMI	2019
177	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	2019
178	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT	2019
179	SULAWESI BARAT	MAJENE	2019
180	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	2019
181	SUMATERA BARAT	PADANG PARIAMAN	2019

Lampiran 5. Rekapitulasi Destana Tahun 2012-2019

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	2012	Aceh	Nagan Raya	Kuala Trang
2	2012	Aceh	Nagan Raya	Suak Puntong
3	2012	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Gunung Manaon
4	2012	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Manyabar Jahe
5	2012	Sumatera Barat	Agam	Desa Tiku V Jorong
6	2012	Sumatera Barat	Agam	Tiku Selatan
7	2012	Lampung	Lampung Selatan	Banding
8	2012	Lampung	Lampung Selatan	Sukaraja
9	2012	Banten	Serang	Pasauran
10	2012	Banten	Serang	Sindanglaya
11	2012	Jawa Barat	Ciamis	Pananjung
12	2012	Jawa Barat	Ciamis	Pangandaran
13	2012	Jawa Tengah	Cilacap	Bunton
14	2012	Jawa Tengah	Cilacap	Widarapayung Wetan
15	2012	Jawa Timur	Pacitan	Kembang
16	2012	Jawa Timur	Pacitan	Sirnoboyo
17	2012	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	Poncosari
18	2012	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	Gadingsari
19	2012	Bali	Badung	Kuta
20	2012	Bali	Badung	Tanjung Benoa
21	2012	NTB	Lombok Utara	Gili Indah
22	2012	NTB	Lombok Utara	Pemenang Barat
23	2012	NTT	Ende	Tanjung
24	2012	NTT	Ende	Paupanda
25	2012	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Ranoiapo
26	2012	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Uwuran I
27	2012	Gorontalo	Gorontalo Utara	Kota Jin
28	2012	Gorontalo	Gorontalo Utara	Ipilo
29	2012	Sulawesi Barat	Majene	Tubo Poang
30	2012	Sulawesi Barat	Majene	Adolang Dhua

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
31	2012	Sulawesi Tengah	Donggala	Batusuya
32	2012	Sulawesi Tengah	Donggala	Labean
33	2012	Maluku	Buru	Ubung
34	2012	Maluku	Buru	Sawa
35	2012	Maluku Utara	Pulau Morotai	Juangan
36	2012	Maluku Utara	Pulau Morotai	Pandanga
37	2012	Papua	Sarmi	Bagaisewar
38	2012	Papua	Sarmi	Sawar
39	2012	Papua Barat	Manokwari	Masni
40	2012	Papua Barat	Manokwari	Arowi
41	2013	Aceh	Aceh Utara	Ulee Matang
42	2013	Aceh	Aceh Utara	Bukit Linteung
43	2013	Sumatera Utara	Langkat	Ara Condong
44	2013	Sumatera Utara	Langkat	Pantai Gemi
45	2013	Riau	Indragiri Hilir	Pulau Palas
46	2013	Riau	Indragiri Hilir	Sialang Panjang
47	2013	Kepulauan Riau	Bintan	Teluk Bakau
48	2013	Kepulauan Riau	Bintan	Malang
49	2013	Sumatera Barat	Solok	Nagari batu Janjang
50	2013	Sumatera Barat	Solok	Nagari Saloyo
51	2013	Lampung	Lampung Barat	Tugu Sari
52	2013	Lampung	Lampung Barat	Pekon Simpang Sari
53	2013	Jambi	Kerinci	Sungai Kering
54	2013	Jambi	Kerinci	Gunung Labu
55	2013	Bengkulu	Rejang Lebong	Teluk Sepang
56	2013	Bengkulu	Rejang Lebong	Kuala Lempuing
57	2013	Sumatera Selatan	Banyuasin	Teluk Kijing
58	2013	Sumatera Selatan	Banyuasin	Lebung
59	2013	Banten	Lebak	Cipedang
60	2013	Banten	Lebak	Muara
61	2013	Jawa Barat	Ciamis	Masawah
62	2013	Jawa Barat	Ciamis	Legok Jawa
63	2013	Jawa Tengah	Kebumen	Balorejo
64	2013	Jawa Tengah	Kebumen	Sidobunder
65	2013	Jawa Timur	Lamongan	Blawi

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
66	2013	Jawa Timur	Bojonegoro	Pilangsari
67	2013	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	Tirtoharjo
68	2013	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	Gadingharjo
69	2013	Bali	Gianyar	Lebih
70	2013	Bali	Gianyar	Medahan
71	2013	NTB	Lombok Barat	Lembar Selatan
72	2013	NTB	Lombok Barat	Labuan Tereng
73	2013	Kalimantan Barat	Mempawah	Sungai Bakau Besar Laut
74	2013	Kalimantan Barat	Mempawah	Sejegi
75	2013	Kalimantan Tengah	Kota Waringin Timur	Parit
76	2013	Kalimantan Tengah	Kota Waringin Timur	Kota Besi Hilir
77	2013	Kalimantan Selatan	Banjar	Lawiran
78	2013	Kalimantan Selatan	Banjar	Lumpangi
79	2013	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Sei Piring
80	2013	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Lempake
81	2013	Sulawesi Utara	Minahasa	Sarani Matani
82	2013	Sulawesi Utara	Minahasa	Ranowangko
83	2013	Gorontalo	Gorontalo	Ipilo
84	2013	Gorontalo	Gorontalo	Dembe 2
85	2013	Sulawesi Barat	Mamuju	Pasabu
86	2013	Sulawesi Barat	Mamuju	Ranga-ranga
87	2013	Sulawesi Tengah	Toli-toli	Kalangkangan
88	2013	Sulawesi Tengah	Toli-toli	Tuweley
89	2013	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Lepo-lepo
90	2013	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Salo
91	2013	Sulawesi Selatan	Wajo	Lowa
92	2013	Sulawesi Selatan	Wajo	Mappadaelo
93	2013	Maluku	Maluku Tengah	Illang
94	2013	Maluku	Maluku Tengah	Negeri Lima
95	2013	Maluku Utara	Pulau Morotai	Juangan

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
96	2013	Maluku Utara	Pulau Morotai	Pandanga
97	2013	Papua	Kepulauan Yapen	Yapan
98	2013	Papua	Kepulauan Yapen	Banawa
99	2013	Papua Barat	Manokwari	Masni
100	2013	Papua Barat	Manokwari	Arowi
101	2014	Aceh	Aceh Besar	Kajhu
102	2014	Aceh	Aceh Besar	Paya Tieng
103	2014	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	Sijago-Jago
104	2014	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	Gabungan Hasang
105	2014	Riau	Kampar	Sahilan
106	2014	Riau	Kampar	Buluh Cina
107	2014	Kepulauan Riau	Lingga	Pangkat Laut
108	2014	Kepulauan Riau	Lingga	Nerekeh
109	2014	Sumatera Barat	Kota Padang	Nagari Lolong Belanti
110	2014	Sumatera Barat	Kota Padang	Nagari Bungus Selatan
111	2014	Sumatera Barat	Pasaman Barat	Nagari Mandiangin
112	2014	Sumatera Barat	Pasaman Barat	Nagari Parik Koto Balingka
113	2014	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Maileppet
114	2014	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Muara Siberut
115	2014	Lampung	Lampung Selatan	Rajabasa
116	2014	Lampung	Lampung Selatan	Ketapang
117	2014	Jambi	Bungo	Jaya Setia
118	2014	Jambi	Bungo	Taman Bungo Agung
119	2014	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kelurahan Teluk Sepang
120	2014	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kelurahan Padang Serai
121	2014	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	Sungai Rambutan
122	2014	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	Tanjung Pering
123	2014	Banten	Pandeglang	Labuan
124	2014	Banten	Pandeglang	Caringin
125	2014	Jawa Barat	Pangandaran	Ciliang
126	2014	Jawa Barat	Pangandaran	Batukaras
127	2014	Jawa Barat	Sukabumi	Tegalbuleud
128	2014	Jawa Barat	Sukabumi	Buniasih

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
129	2014	Jawa Tengah	Cilacap	Tegalkamulyan
130	2014	Jawa Tengah	Cilacap	Sidakaya
131	2014	Jawa Tengah	Kebumen	Munggu
132	2014	Jawa Tengah	Kebumen	Karanggadung
133	2014	Jawa Timur	Jember	Puger Kulon
134	2014	Jawa Timur	Jember	Sumber Rejo
135	2014	Jawa Timur	Banyuwangi	Sumberagung
136	2014	Jawa Timur	Banyuwangi	Pesanggaran
137	2014	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	Srigading
138	2014	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	Parangtritis
139	2014	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kulonprogo	Jangkaran
140	2014	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kulonprogo	Karangwuni
141	2014	Bali	Buleleng	Lemukih
142	2014	Bali	Buleleng	Galungan
143	2014	NTB	Bima	Sangeang
144	2014	NTB	Bima	Tadewa
145	2014	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kubu Padi
146	2014	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Arang Limbung
147	2014	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Pilangsari
148	2014	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Tanjung Taruna
149	2014	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	Maju Makmur
150	2014	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	Maju Bersama
151	2014	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara	Purwajaya
152	2014	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara	Jahab
153	2014	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Kema II
154	2014	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Kema III
155	2014	Gorontalo	Bone Bolango	Longungo
156	2014	Gorontalo	Bone Bolango	Segitiga
157	2014	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Muhajir

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
158	2014	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Tobadak 4
159	2014	Sulawesi Tengah	Sigi	Bolapapu
160	2014	Sulawesi Tengah	Sigi	Mataue
161	2014	Sulawesi Tenggara	Kolaka	Latambaga
162	2014	Sulawesi Tenggara	Kolaka	Lamokato
163	2014	Sulawesi Selatan	Barru	Lampoko
164	2014	Sulawesi Selatan	Barru	Lawallu
165	2014	Maluku	Kota Ambon	Latuhalat
166	2014	Maluku	Kota Ambon	Kukurila
167	2014	Papua	Kota Jayapura	Koya tImur
168	2014	Papua	Kota Jayapura	Bayangkara
169	2015	Aceh	Pidie	Peunalom
170	2015	Aceh	Pidie	Ranto Panyang
171	2015	Aceh	Aceh Selatan	Cot Bayu
172	2015	Aceh	Aceh Selatan	Titi Poben
173	2015	Sumatera Utara	Kota Padang Sidempuan	Goti
174	2015	Sumatera Utara	Kota Padang Sidempuan	Manegen
175	2015	Riau	Pelalawan	Air Hitam
176	2015	Riau	Pelalawan	Petodaan
177	2015	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	Penyengat
178	2015	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	Tanjung Unggat
179	2015	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Kambang Barat
180	2015	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Air Haji Barat
181	2015	Sumatera Barat	Solok Selatan	Pasir Talang Selatan
182	2015	Sumatera Barat	Solok Selatan	Pakan Rabaa
183	2015	Lampung	Tanggamus	Pasar Madang
184	2015	Lampung	Tanggamus	Baros
185	2015	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Rantau Makmur
186	2015	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Rawasari
187	2015	Bengkulu	Seluma	Rawa Indah

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
188	2015	Bengkulu	Seluma	Sumber Makmur
189	2015	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Riding
190	2015	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Cahaya Makmur
191	2015	Jawa Barat	Tasikmalaya	Cimanuk
192	2015	Jawa Barat	Tasikmalaya	Mandalajaya
193	2015	Jawa Barat	Tasikmalaya	Ciandum
194	2015	Jawa Barat	Sukabumi	Citepus
195	2015	Jawa Barat	Sukabumi	Jayanti
196	2015	Jawa Barat	Sukabumi	Pelabuhan Ratu
197	2015	Jawa Barat	Garut	Pesawahan
198	2015	Jawa Barat	Garut	Mekarjaya
199	2015	Jawa Barat	Garut	Sukahurp
200	2015	Jawa Tengah	Magelang	Margoyoso
201	2015	Jawa Tengah	Magelang	Sirahan
202	2015	Jawa Tengah	Magelang	Ngargomulyo
203	2015	Jawa Tengah	Temanggung	Getas
204	2015	Jawa Tengah	Temanggung	Karangwuni
205	2015	Jawa Tengah	Temanggung	Muncar
206	2015	Jawa Tengah	Purworejo	Jatikontai
207	2015	Jawa Tengah	Purworejo	Gedangan
208	2015	Jawa Tengah	Purworejo	Jati Malang
209	2015	Jawa Timur	Ngawi	Waruk Tengah
210	2015	Jawa Timur	Ngawi	Simo
211	2015	Jawa Timur	Malang	Lebak Harjo
212	2015	Jawa Timur	Malang	Tambakrejo
213	2015	Jawa Timur	Malang	Pandansari
214	2015	Jawa Timur	Lumajang	Tegalrejo
215	2015	Jawa Timur	Lumajang	Wotgalih
216	2015	Jawa Timur	Lumajang	Jatimulyo
217	2015	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sleman	Gayamharjo
218	2015	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sleman	Argomulyo
219	2015	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sleman	Kalitirto

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
220	2015	Daerah Istimewa Yogyakarta	Gunung Kidul	Kemadang
221	2015	Daerah Istimewa Yogyakarta	Gunung Kidul	Rejosari
222	2015	Daerah Istimewa Yogyakarta	Gunung Kidul	Tambakromo
223	2015	Bali	Kota Denpasar	Kelurahan Serangan
224	2015	Bali	Kota Denpasar	Sanur Kauh
225	2015	Bali	Karangasem	Ulakan
226	2015	Bali	Karangasem	Sengkidu
227	2015	NTB	Sumbawa	Lopok Beru
228	2015	NTB	Sumbawa	Berora
229	2015	NTB	Kota Bima	Kelurahan Sarae
230	2015	NTB	Kota Bima	Kelurahan Parga
231	2015	NTT	Kupang	Oiniko
232	2015	NTT	Kupang	Lelomboko
233	2015	NTT	Sumba Timur	Kadumpul
234	2015	NTT	Sumba Timur	Napu
235	2015	Kalimantan Barat	Singkawang	Condong
236	2015	Kalimantan Barat	Singkawang	Setapuk Besar
237	2015	Kalimantan Tengah	Lamandau	Nanga Palikodan
238	2015	Kalimantan Tengah	Lamandau	Sekombulan
239	2015	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	Bahandang
240	2015	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	Antasan Segara
241	2015	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Swargabara
242	2015	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Sangatta Selatan
243	2015	Kalimantan Timur	Penajam Pasir Utara	Sumbersari
244	2015	Kalimantan Timur	Penajam Pasir Utara	sepaku
245	2015	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	Tarun
246	2015	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	Bowombaru
247	2015	Gorontalo	Boalemo	Rejonegoro
248	2015	Gorontalo	Boalemo	Potanga

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
249	2015	Sulawesi Barat	Mamuju	Pokkang
250	2015	Sulawesi Barat	Mamuju	Bunda
251	2015	Sulawesi Tengah	Kota Palu	Baru
252	2015	Sulawesi Tengah	Kota Palu	Lolu Utara
253	2015	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	Kampeonaho
254	2015	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	Waliabuku
255	2015	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	Pongkeru
256	2015	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	Kasintuwu
257	2015	Maluku	Seram bagian barat	Seruawan
258	2015	Maluku	Seram bagian barat	Uraur
259	2015	Maluku utara	Halmahera Selatan	Mandaong
260	2015	Maluku utara	Halmahera Selatan	Sawadai
261	2015	Maluku utara	Kepulauan Sula	Fogi
262	2015	Maluku utara	Kepulauan Sula	Walham
263	2015	Papua	Jayapura	Meukisi
264	2015	Papua	Jayapura	Bukisi
265	2015	Papua Barat	Tambrauw	Werur
266	2015	Papua Barat	Tambrauw	Werur besar
267	2015	Papua Barat	Raja Ampat	Yenbuba
268	2015	Papua Barat	Raja Ampat	Yenbekwan
269	2016	Aceh	Kota Banda Aceh	Gampong Deah Glumpang
270	2016	Aceh	Kota Banda Aceh	Gampong Kampong Jawa
271	2016	Sumatera Utara	Deli Serdang	Paya Geli
272	2016	Sumatera Utara	Deli Serdang	Kota Rantang
273	2016	Sumatera Utara	Padang Lawas	Hulim
274	2016	Sumatera Utara	Padang Lawas	Hapung
275	2016	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	Bandar Tarutung
276	2016	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	Batu Gondang
277	2016	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Marsonja
278	2016	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Tanjung Mulia

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
279	2016	Riau	Kampar	Mentulik
280	2016	Riau	Kampar	Karya Indah
281	2016	Riau	Siak	Kampung Rawang Air Putih
282	2016	Riau	Siak	Kampung Mengkapan
283	2016	Riau	Siak	Kampung Dayun
284	2016	Sumatera Barat	Pasaman	Nagari Koto Kaciak
285	2016	Sumatera Barat	Pasaman	Nagari Panti
286	2016	Sumatera Barat	Tanah Datar	Nagari Gunung Rajo
287	2016	Sumatera Barat	Tanah Datar	Nagari Guguak Malalo
288	2016	Lampung	Kota Bandar Lampung	Kota Karang
289	2016	Lampung	Kota Bandar Lampung	Kota Karang Raya
290	2016	Jambi	Kota Jambi	Payo Selincah
291	2016	Jambi	Kota Jambi	Sejinjang
292	2016	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Rantau Karya
293	2016	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Pandan Sejahtera
294	2016	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Catur Rahayu
295	2016	Bengkulu	Kaur	Suku Tiga
296	2016	Bengkulu	Kaur	Merpas
297	2016	Sumatera Selatan	Banyuasin	Sungai Dua
298	2016	Sumatera Selatan	Banyuasin	Desa Talang Keramat
299	2016	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Warga Mulya
300	2016	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Talang Leban
301	2016	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Mekar Sari
302	2016	Banten	Pandeglang	Talagasari
303	2016	Banten	Pandeglang	Sukalangu
304	2016	Banten	Kota Cilegon	Gerem
305	2016	Banten	Kota Cilegon	Lebak Gede
306	2016	Jawa Barat	Bandung Barat	Cikahuripan
307	2016	Jawa Barat	Bandung Barat	Cinta Asih
308	2016	Jawa Barat	Cianjur	Susukan
309	2016	Jawa Barat	Cianjur	Karangnunggal
310	2016	Jawa Barat	Kota Bogor	Pasirjaya

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
311	2016	Jawa Barat	Kota Bogor	Panaragan
312	2016	Jawa Tengah	Kendal	Kebondalem
313	2016	Jawa Tengah	Kendal	Cening
314	2016	Jawa Tengah	Kendal	Tlogopayung
315	2016	Jawa Tengah	Jepara	Tempur
316	2016	Jawa Tengah	Jepara	Batukali
317	2016	Jawa Tengah	Jepara	Bungu
318	2016	Jawa Timur	Bangkalan	Blega
319	2016	Jawa Timur	Bangkalan	Tanjungbumi
320	2016	Jawa Timur	Nganjuk	Bareng
321	2016	Jawa Timur	Nganjuk	Kebonagung
322	2016	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sleman	Umbulharjo
323	2016	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sleman	Purwobinangun
324	2016	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sleman	Wonokerto
325	2016	Bali	Badung	Plaga
326	2016	Bali	Badung	Sulangai
327	2016	Bali	Tabanan	Sudimara
328	2016	Bali	Tabanan	Tibubiu
329	2016	NTB	Lombok Timur	Belanting
330	2016	NTB	Lombok Timur	Surya Wangi
331	2016	NTB	Sumbawa	Baru
332	2016	NTB	Sumbawa	Kalimango
333	2016	NTT	Rote Ndao	Namodale
334	2016	NTT	Rote Ndao	Metina
335	2016	NTT	Kota Kupang	Tuak Daun Merah
336	2016	NTT	Kota Kupang	Oesapa
337	2016	Kalimantan Barat	Kubu Raya	empening
338	2016	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Permata
339	2016	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Teluk Bakung
340	2016	Kalimantan Barat	Ketapang	Sungai Pelang
341	2016	Kalimantan Barat	Ketapang	Sungai Besar
342	2016	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Garong

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
343	2016	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Henda
344	2016	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Tumbang Nusa
345	2016	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Kelurahan Kereng Bangkirai
346	2016	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Kelurahan Petuk Katimpun
347	2016	Kalimantan Selatan	Banjar	Lok Buntar
348	2016	Kalimantan Selatan	Banjar	Tangkas
349	2016	Kalimantan Selatan	Kotabaru	Stagen
350	2016	Kalimantan Selatan	Kotabaru	Sungup Kanan
351	2016	Kalimantan Selatan	Kotabaru	Sungai
352	2016	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Makroman
353	2016	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Sungai Kapih
354	2016	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Sangatta Utara
355	2016	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Sangkima
356	2016	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Teluk Pandan
357	2016	Sulawesi Utara	Minahasa	Rumengkor
358	2016	Sulawesi Utara	Minahasa	Tateli
359	2016	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondouw	Bolangat
360	2016	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondouw	Lolanan
361	2016	Gorontalo	Gorontalo Utara	Hutakalo
362	2016	Gorontalo	Gorontalo Utara	Mokonowu
363	2016	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Sejati
364	2016	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Pangali
365	2016	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	Lemusa
366	2016	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	Gangga
367	2016	Sulawesi Tenggara	Konawe	Ambulanu
368	2016	Sulawesi Tenggara	Konawe	Lalonggotomi
369	2016	Sulawesi Selatan	Maros	Mattiro Deceng

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
370	2016	Sulawesi Selatan	Maros	Banto Tallasa
371	2016	Maluku	Kota Ambon	Hutmuri
372	2016	Maluku	Kota Ambon	Amahusu
373	2016	Maluku utara	Halmahera Utara	Roko
374	2016	Maluku utara	Halmahera Utara	Limau
375	2016	Papua	Jayapura	Kampung Tablasupa
376	2016	Papua	Jayapura	Kampung Tablanusa
377	2017	Aceh	Aceh Besar	Monikeun
378	2017	Aceh	Aceh Besar	Kruet
379	2017	Aceh	Aceh Besar	Gampong Lamrukam
380	2017	Aceh	Aceh Besar	Gampong Lamkemok
381	2017	Sumatera Utara	Kota Medan	Sei Mati
382	2017	Sumatera Utara	Kota Medan	Padang Bulan
383	2017	Sumatera Utara	Kota Medan	Aur
384	2017	Sumatera Utara	Kota Medan	Belawan Bahari
385	2017	Riau	Siak	Kampung Buatan II
386	2017	Riau	Siak	Kampung Perawang Barat
387	2017	Riau	Siak	Kampung Tuah Indra Pura
388	2017	Riau	Siak	Kampung Dosan
389	2017	Jambi	Sarolangun	Pulau Lintang
390	2017	Jambi	Sarolangun	Bukin Suban
391	2017	Jambi	Sarolangun	Taman Dewa
392	2017	Jambi	Sarolangun	Danau Serdang
393	2017	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Kuala Dasal
394	2017	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Pematang Pauh
395	2017	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Serdang Jaya
396	2017	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Muntialo
397	2017	Bengkulu	Muko-Muko	Pasar Ipuh
398	2017	Bengkulu	Muko-Muko	Teramang Jaya
399	2017	Bengkulu	Muko-Muko	Rawa Bangun
400	2017	Bengkulu	Muko-Muko	Kel. Koto Jaya
401	2017	Sumatera Selatan	Ogan Kmoering Ilir	Kotabumi

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
402	2017	Sumatera Selatan	Ogan Kmoering Ilir	Tanjung Beringi
403	2017	Sumatera Selatan	Ogan Kmoering Ilir	Cinta Jaya
404	2017	Sumatera Selatan	Ogan Kmoering Ilir	Suka Puluh
405	2017	Banten	Lebak	Ciakar
406	2017	Banten	Lebak	Panyaungan
407	2017	Jawa Barat	Bekasi	Karang Asih
408	2017	Jawa Barat	Bekasi	Ridogalih
409	2017	Jawa Barat	Bekasi	Babelan Kota
410	2017	Jawa Barat	Bekasi	Pantai Bakti
411	2017	Jawa Tengah	Kota Semarang	Kalipancur
412	2017	Jawa Tengah	Kota Semarang	Randusari
413	2017	Jawa Tengah	Kota Semarang	Gondoriyo
414	2017	Jawa Tengah	Kota Semarang	Wonosari
415	2017	Jawa Timur	Sidoarjo	Semambung
416	2017	Jawa Timur	Sidoarjo	Kupang
417	2017	Jawa Timur	Sidoarjo	Kedungpandan
418	2017	Jawa Timur	Sidoarjo	Kedungrejo
419	2017	Jawa Timur	Gresik	Bungah
420	2017	Jawa Timur	Gresik	Bedaten
421	2017	Jawa Timur	Gresik	Sukomulyo
422	2017	Jawa Timur	Gresik	Roomo
423	2017	Jawa Timur	Bojonegoro	Mojo
424	2017	Jawa Timur	Bojonegoro	Bogo
425	2017	Jawa Timur	Bojonegoro	Kedungprimpen
426	2017	Jawa Timur	Bojonegoro	Gedongarum
427	2017	Bali	Badung	Canggu
428	2017	Bali	Badung	Titubeneng
429	2017	Bali	Badung	Kutuh
430	2017	Bali	Badung	Pecatu
431	2017	Bali	Karangasem	Pempatan
432	2017	Bali	Karangasem	Besakih
433	2017	Bali	Karangasem	Duda Utara
434	2017	Bali	Karangasem	Sebudi

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
435	2017	Bali	Karangasem	Amartha Buana
436	2017	Bali	Karangasem	Buana Giri
437	2017	Bali	Karangasem	Jungutan
438	2017	Bali	Karangasem	Pidpid
439	2017	Bali	Karangasem	Nawakerti
440	2017	Bali	Karangasem	Datah
441	2017	Bali	Karangasem	Dukuh
442	2017	Bali	Karangasem	Tulamben
443	2017	Bali	Karangasem	Batu Ringgit
444	2017	Bali	Karangasem	Kubu
445	2017	Bali	Karangasem	Sukadana
446	2017	Bali	Karangasem	Ban
447	2017	NTB	Lombok Barat	Batu Layar
448	2017	NTB	Lombok Barat	Pakuan
449	2017	NTB	Lombok Barat	Kuranji Dalang
450	2017	NTB	Lombok Barat	Sekotong Tengah
451	2017	NTT	Alor	Wetabua
452	2017	NTT	Alor	Binongko
453	2017	NTT	Alor	Adang
454	2017	NTT	Alor	Pante Deere
455	2017	NTT	Sikka	Watumilok
456	2017	NTT	Sikka	Hegetegerra
457	2017	NTT	Sikka	Egon
458	2017	Kalimantan Utara	Nunukan	Atap
459	2017	Kalimantan Utara	Nunukan	Lubakan
460	2017	Kalimantan Utara	Nunukan	Tujungan
461	2017	Kalimantan Utara	Nunukan	Manuk Bungkul
462	2017	Kalimantan Barat	Landak	Simpang Kasturi
463	2017	Kalimantan Barat	Landak	Salatiga
464	2017	Kalimantan Barat	Landak	Mandor
465	2017	Kalimantan Barat	Landak	Jelimpo
466	2017	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Duri
467	2017	Kalimantan Barat	Bengkayang	Menterado
468	2017	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sekida
469	2017	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sahan

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
470	2017	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Handil Sohor
471	2017	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Bepangang
472	2017	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Tinduk
473	2017	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Kandan
474	2017	Kalimantan Tengah	Kapuas	Batuah
475	2017	Kalimantan Tengah	Kapuas	Tarung Manuah
476	2017	Kalimantan Tengah	Kapuas	Sei Ahas
477	2017	Kalimantan Tengah	Kapuas	Katunjung
478	2017	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	Simpang Arja
479	2017	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	Simpang Nungki
480	2017	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	Antar Jaya
481	2017	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	Karya Jadi
482	2017	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	Kersik Putih
483	2017	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	Gunung Tinggi
484	2017	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	Gunung Besar
485	2017	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	Sarigadung
486	2017	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Kakenturan I
487	2017	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Kakenturan II
488	2017	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Tandurusa
489	2017	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Batulubang
490	2017	Sulawesi Utara	Kota Manado	Tumumpa Dua
491	2017	Sulawesi Utara	Kota Manado	Ternate Tanjung
492	2017	Sulawesi Utara	Kota Manado	Pakowa
493	2017	Sulawesi Utara	Kota Manado	Dendengan Dalam
494	2017	Gorontalo	Gorontalo	Tualango
495	2017	Gorontalo	Gorontalo	Padengo

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
496	2017	Gorontalo	Gorontalo	Totopo
497	2017	Gorontalo	Gorontalo	Tolite
498	2017	Sulawesi Tengah	Banggai	Kamiwangi
499	2017	Sulawesi Tengah	Banggai	Sentralsari
500	2017	Sulawesi Tengah	Banggai	Kampangar
501	2017	Sulawesi Tengah	Banggai	Minangandala
502	2017	Sulawesi Tenggara	Buton	Mabulugo
503	2017	Sulawesi Tenggara	Buton	Wakalambe
504	2017	Sulawesi Tenggara	Buton	Pasarwajo
505	2017	Sulawesi Tenggara	Buton	Balimu
506	2017	Sulawesi Selatan	Bantaeng	bonto Jai
507	2017	Sulawesi Selatan	Bantaeng	Bonto Karaeng
508	2017	Sulawesi Selatan	Bantaeng	Labbo
509	2017	Sulawesi Selatan	Bantaeng	Baruga
510	2017	Sulawesi Selatan	Takalar	Mangindara
511	2017	Sulawesi Selatan	Takalar	Popo
512	2017	Sulawesi Selatan	Takalar	Canrego
513	2017	Sulawesi Selatan	Takalar	Pabundukang
514	2017	Maluku	Maluku Tenggara	Ohoililir
515	2017	Maluku	Maluku Tenggara	Ohoidertawun
516	2017	Maluku	Maluku Tenggara	Danar Sare
517	2017	Maluku	Maluku Tenggara	Garara
518	2017	Maluku	Seram Bagian Timur	Aki Jaya
519	2017	Maluku	Seram Bagian Timur	Bula
520	2017	Maluku	Seram Bagian Timur	Sesar
521	2017	Maluku	Seram Bagian Timur	Dreamland Hills
522	2017	Maluku Utara	Kota Ternate	Kulaba
523	2017	Maluku Utara	Kota Ternate	Tabam
524	2017	Maluku Utara	Kota Ternate	Tubu
525	2017	Maluku Utara	Kota Ternate	Sangaji Utara

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
526	2017	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Bale
527	2017	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Talagamori
528	2017	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Koli
529	2017	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Kosa
530	2017	Papua	Nabire	Siriwini
531	2017	Papua	Nabire	Kampung Sanoba
532	2017	Papua	Nabire	Kali Bobo
533	2017	Papua	Nabire	Kampung Waroki
534	2017	Papua Barat	Teluk Wondama	Kampung Kabouw
535	2017	Papua Barat	Teluk Wondama	Kampung Isei
536	2017	Papua Barat	Teluk Wondama	Kampung Moru
537	2017	Papua Barat	Teluk Wondama	Kampung Rado
538	2018	Jambi	Bungo	Dusun Sungai Beringin
539	2018	Jambi	Bungo	Dusun Batu Kerbau
540	2018	Jambi	Bungo	Dusun Renah Sungai Besar
541	2018	Jambi	Bungo	Dusun Laman Panjang
542	2018	Bengkulu	Rejang Lebong	Empat Suku Menanti
543	2018	Bengkulu	Rejang Lebong	Talang Blitar
544	2018	Sumatera Selatan	Lahat	Tanjung Sirih
545	2018	Sumatera Selatan	Lahat	Gunung Kembang
546	2018	Jawa Barat	Cirebon	Wanakaya
547	2018	Jawa Barat	Cirebon	Gemulung
548	2018	Jawa Tengah	Pekalongan	Desa Galangampon
549	2018	Jawa Tengah	Pekalongan	Kutorembet
550	2018	Jawa Tengah	Pekalongan	Kesesi
551	2018	Jawa Tengah	Pekalongan	Tengengwetan
552	2018	Jawa Tengah	Wonogiri	Sendang
553	2018	Jawa Tengah	Wonogiri	Sumber
554	2018	Jawa Tengah	Wonogiri	Temboro
555	2018	Jawa Timur	Pacitan	Kedungbendo
556	2018	Jawa Timur	Pacitan	Karanganyar
557	2018	Jawa Timur	Pacitan	Mangunharjo

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
558	2018	Jawa Timur	Pacitan	Klesem
559	2018	Jawa Timur	Ponorogo	Tugurejo
560	2018	Jawa Timur	Ponorogo	Maguwan
561	2018	Jawa Timur	Ponorogo	Banaran
562	2018	Jawa Timur	Ponorogo	Dayakan
563	2018	NTB	Lombok Tengah	Aik Berik
564	2018	NTB	Lombok Tengah	Karangsidemen
565	2018	NTB	Lombok Tengah	Kuta
566	2018	NTT	Manggarai	Bangka Dese
567	2018	NTT	Manggarai	Bangka Leda
568	2018	NTT	Manggarai	Mocok
569	2018	NTT	Manggarai	Pong Umpu
570	2018	NTT	Belu	Fulur
571	2018	NTT	Belu	Silawan
572	2018	NTT	Belu	Fatukei
573	2018	NTT	Ngada	Manubhara
574	2018	NTT	Ngada	Wasae
575	2018	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Sebengkok
576	2018	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Juata
577	2018	Kalimantan Barat	Sambas	Sarang Burung Danau
578	2018	Kalimantan Barat	Sambas	Buduk Sempadang
579	2018	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	Panjaratan
580	2018	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	Sungai Bakar
581	2018	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	Kali Besar
582	2018	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Desa Tumpaan
583	2018	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Wuwuk Barat
584	2018	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Wuwuk Barat
585	2018	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Teep
586	2018	Gorontalo	Kota Gorontalo	Leato Utara
587	2018	Gorontalo	Kota Gorontalo	Talumolo
588	2018	Gorontalo	Kota Gorontalo	Tanjung Kramat
589	2018	Gorontalo	Kota Gorontalo	Tenda
590	2018	Gorontalo	Bone Bolango	Oluhuta

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
591	2018	Gorontalo	Bone Bolango	Timbuwolo
592	2018	Gorontalo	Bone Bolango	Bulondala
593	2018	Sulawesi Tengah	Poso	Maranda
594	2018	Sulawesi Tengah	Poso	Kilo
595	2018	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Laronanga
596	2018	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Tapunggaya
597	2018	Sulawesi Tenggara	Buton Utama	Kotawo
598	2018	Sulawesi Tenggara	Buton Utama	Lambale
599	2018	Sulawesi Tenggara	Buton Utama	Lapandewa
600	2018	Sulawesi Selatan	Gowa	Panakukang
601	2018	Sulawesi Selatan	Gowa	Bili Bili
602	2019	Jawa Timur	Banyuwangi	Kelurahan Kampung Mandar
603	2019	Jawa Timur	Banyuwangi	Kelurahan Kampung Melayu
604	2019	Jawa Timur	Banyuwangi	Kelurahan Temenggungan
605	2019	Jawa Timur	Banyuwangi	Kelurahan Tukang Kayu
606	2019	Jawa Timur	Blitar	Gunung Gede
607	2019	Jawa Timur	Blitar	Serang
608	2019	Jawa Timur	Jember	Paseban
609	2019	Jawa Timur	Jember	Puger Kulon
610	2019	Jawa Timur	Jember	Puger Wetan
611	2019	Jawa Timur	Lumajang	Bades
612	2019	Jawa Timur	Lumajang	Gondoruso
613	2019	Jawa Timur	Lumajang	Selok Awar-Awar
614	2019	Jawa Timur	Malang	Kedungsalam
615	2019	Jawa Timur	Malang	Purwodadi
616	2019	Jawa Timur	Trenggalek	Prigi
617	2019	Jawa Timur	Trenggalek	Tasikmadu
618	2019	Jawa Timur	Tulungagung	Besole
619	2019	Jawa Timur	Tulungagung	Besuki
620	2019	Jawa Timur	Pacitan	Pager Kidul
621	2019	Jawa Timur	Pacitan	Pagerlor

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
622	2019	Jawa Timur	Pacitan	Sumberejo
623	2019	Jawa Tengah	Wonogiri	Desa Paranggupito
624	2019	Daerah Istimewa Yogyakarta	Gunung Kidul	Girikarto
625	2019	Daerah Istimewa Yogyakarta	Gunung Kidul	Giriwungu
626	2019	Daerah Istimewa Yogyakarta	Gunung Kidul	Giripurwo
627	2019	Daerah Istimewa Yogyakarta	Gunung Kidul	Girijati
628	2019	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	Gadingharjo
629	2019	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	Gadingsari
630	2019	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	Srigading
631	2019	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kulonprogo	Jangkaran
632	2019	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kulonprogo	Sindutan
633	2019	Jawa Tengah	Kebumen	Ambal Resmi
634	2019	Jawa Tengah	Kebumen	Sumber Jati
635	2019	Jawa Tengah	Kebumen	Surorejan
636	2019	Jawa Tengah	Kebumen	Entak
637	2019	Jawa Tengah	Kebumen	Kaibon Petangkuran
638	2019	Jawa Tengah	Kebumen	Kenoyojayan
639	2019	Jawa Tengah	Cilacap	Bulupayung
640	2019	Jawa Tengah	Cilacap	Kalisabuk
641	2019	Jawa Barat	Pangandaran	Putra Pinggan
642	2019	Jawa Barat	Pangandaran	Kalipucang
643	2019	Jawa Barat	Garut	Cimahi
644	2019	Jawa Barat	Garut	Purbayani
645	2019	Jawa Barat	Garut	Samudrajaya
646	2019	Jawa Barat	Cianjur	Girimukti
647	2019	Jawa Barat	Cianjur	Hegarsari
648	2019	Jawa Barat	Cianjur	Saganten
649	2019	Jawa Barat	Cianjur	Sirnagalih
650	2019	Jawa Barat	Cianjur	Talagasari
651	2019	Jawa Barat	Sukabumi	Wangunsari

No	Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
652	2019	Jawa Barat	Sukabumi	Cikangkung
653	2019	Jawa Barat	Sukabumi	Cisolok
654	2019	Jawa Barat	Sukabumi	Ujung Genteng
655	2019	Jawa Barat	Sukabumi	Purwasedar
656	2019	Jawa Barat	Sukabumi	Gunung Batu
657	2019	Jawa Barat	Tasikmalaya	Sindangkerta
658	2019	Jawa Barat	Tasikmalaya	Ciheras
659	2019	Jawa Barat	Tasikmalaya	Cipatujah
660	2019	Banten	Kota Cilegon	Suralaya
661	2019	Banten	Kota Cilegon	Warnasari
662	2019	Banten	Lebak	Bayah Timur
663	2019	Banten	Lebak	Cidikit
664	2019	Banten	Lebak	Cisuren
665	2019	Banten	Lebak	Pamubalan
666	2019	Banten	Lebak	Sawarna
667	2019	Banten	Pandeglang	Carita
668	2019	Banten	Pandeglang	Sindanglaut
669	2019	Banten	Pandeglang	Sukanagara

Lampiran 6. Perkembangan Desa Tangguh Bencana

No	Program	Pelaksana	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Desa Tangguh Bencana	BNPB	40	60	68	100	108	150	68	68
2	Desa Tangguh Bencana	BPBD Prov/Kabupaten				60	64	75	100	
3	Desa Tangguh Mandiri	BNPB dan Perguruan Tinggi						150	500	
4	Ketangguhan Masyarakat	Kementerian/lembaga						100	500	
5	Desa Tangguh Bencana	NGO Internasional				20	35	50	100	
6	Desa Tangguh Bencana	NGO Lokal/Nasional				20	32	50	100	
7	Desa Tangguh Bencana	Dunia Usaha				20	40	50	75	
	Total		40	60	68	219	279	625	1439	68

Lampiran 7. Rekapitulasi Kejadian Bencana Yang Di Respon

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
1	Tsunami	Kab. Pandeglang, Prov. Banten	1	1	Bantuan DSP
2	Puting Beliung	Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat, Supervisi
3	Gempa Bumi	Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB	1	1	Bantuan DSP
4	Banjir	Kab. Gunung Kidul	1	1	Supervisi Pembersihan Lingkungan
5	Banjir	Kab. Sleman, Prov. DIY	1	1	Supervisi Pembersihan Lingkungan
6	Tanah longsor	Kota Malang, Prov. Jawa Timur	1	1	Supervisi Pembersihan Lingkungan
7	Gempa Bumi	Prov. Banten	1	1	Supervisi Pembersihan Lingkungan
8	banjir	Kab. Bogor	1	1	Supervisi Pembersihan Lingkungan
9	Cuaca Ekstrim	Prov. Banten	1	1	Supervisi Pembersihan Lingkungan
10	karhutla	Prov. Sumatera Selatan	1	1	Bantuan DSP
11	karhutla	Kota Pekanbaru, Prov. Riau	1	1	Supervisi Pembersihan Lingkungan
12	Gempa Bumi	Kab. Lombok Utara, Prov. NTB	1	1	Bantuan DSP
13	karhutla	Prov. Jambi	1	1	Bantuan DSP
14	karhutla	Prov. Sumatera Barat	1	1	Supervisi Pembersihan Lingkungan
15	karhutla	Prov. Sumatera selatan	1	1	Supervisi Pembersihan Lingkungan
16	Banjir Longsor	kab agam Prov. Sumatera barat	1	1	Bantuan DSP
17	karhutla	kab. Bandung	1	1	Helikopter
18	Gempa Bumi	Kab Sumbawa	1	1	Bantuan DSP

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
19	karhutla	Provinsi Jambi	1	1	Supervisi Pembersihan Lingkungan
20	Gempa Bumi	Kab Sumbawa Barat	1	1	Bantuan DSP
21	Banjir	Prov. Jambi	1	1	Supervisi Pembersihan Lingkungan
22	Banjir bandang	Kab. Jayapura, Provinsi Papua	1	1	Bantuan DSP
23	Banjir	Sentani, Prov. Papua	1	1	Identifikasi PBL
24	banjir	Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat	1	1	Bantuan DSP
25	Longsor	Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat	1	1	Bantuan DSP
26	Angin Puting Beliung	Kab. Badung, Prov. Bali	1	1	Identifikasi PBL
27	kekeringan	Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah	1	1	Identifikasi PBL
28	karhutla	Prov. Riau	1	1	Bantuan DSP
29	karhutla	Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan	1	1	Identifikasi PBL
30	Erupsi Gunung Tangkuban Perahu	Kab. Bandung Barat, Prov Jawa Barat	1	1	Identifikasi PBL
31	karhutla	Prov. Jambi	1	1	Identifikasi PBL
32	Gempa	Kab. Pandeglang, Prov. Banten	1	1	Identifikasi PBL
33	angin kencang	Kab. Serang, Prov. Banten	1	1	Identifikasi PBL
34	kekeringan	Kab. Serang, Prov. Banten	1	1	Identifikasi PBL
35	longsor	Kab. Sleman, Prov. DIY	1	1	Identifikasi PBL
36	Bansor	Kota Jayapura, Prov. Papua	1	1	Bantuan DSP
37	Banjir bandang	Kab. Keerom	1	1	Verifikasi/inventarisasi
38	Karhutla	Kolaka Timur	1	1	Bantuan DSP

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
39	banjir dan tanah longsor	Kab. Tanah Toraja, Prov. Sulawesi Selatan	1	1	Bantuan DSP
40	Tanah longsor	Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat	1	1	Verifikasi/inventarisasi
41	banjir	Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan	1	1	Bantuan DSP
42	karhutla	Prov. Kalimantan Barat	1	1	Bantuan DSP
43	bansor	Kab. Gayo lues, Prov. Aceh	1	1	Bantuan DSP
44	banjir, angin puting beliung dan abrasi pantai	Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan	1	1	Bantuan DSP
45	bansor	Kab. Soppeng, Prov. Sulawesi Selatan	1	1	Bantuan DSP
46	banjir	Halmahera Tengah, Prov. Maluku	1	1	Bantuan DSP
47	kekeringan	Kab. Sumba Timur, Prov. NTT	1	1	Bantuan DSP
48	Banjir dan angin Puting beliung	Kota Bekasi	1	1	Verifikasi/inventarisasi
49	banjir	Kab. Konawe Utara	1	1	Bantuan DSP
50	banjir	Kab. Jayapura, Prov. Papua	1	1	supervisi perbaikan
51	banjir dan tanah longsor	Prov. Bengkulu	1	1	Bantuan DSP
52	gempa	Prov. NTB	1	1	Bantuan DSP
53	Karhutla	Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat	1	1	Helikopter
54	puting beliung	Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat	1	1	supervisi perbaikan
55	banjir	Kota Pangkal Pinang, Prov. Bangka Belitung	1	1	supervisi perbaikan

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
56	angin Puting beliung	kota padang, sumbar	1	1	supervisi perbaikan
57	banjir	Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu	1	1	supervisi perbaikan
58	banjir dan tanah longsor	Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan	1	1	Bantuan DSP
59	Karhutla	Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur	1	1	supervisi perbaikan
60	Banjir	Kab. Lebak, Prov. Banten	1	1	supervisi perbaikan
61	Tsunami	Kab. Lampung Selatan	1	1	Bantuan DSP
62	Angin Puting beliung dan rob	Prov Jawa Timur	1	1	Pendampingan Pendataan Pengungsi
63	Banjir	Sidoarjo	1	1	Pendampingan Pendataan Pengungsi
64	Banjir	Gowa, Sulsel	1	1	Bantuan DSP
65	Banjir	Aceh Barat	1	1	Bantuan DSP
66	Banjir	Kab. Batanghari	1	1	Pemantauan dan Evaluasi
67	Angin puting beliung	Padang	1	1	Koordinasi Penanganan Pengungsi
68	Tsunami	Lampung	1	1	Koordinasi Penanganan Pengungsi
69	Banjir dan Longsor	Probolinggo, Jawa Timur	1	1	Bantuan DSP
70	Banjir dan Longsor	Yogyakarta	1	1	Inventarisasi Cepat Kebutuhan Pengungsi
71	Karhutla	Kalimantan Timur	1	1	Koordinasi penanganan pengungsi
72	Banjir bandang	Jayapura	1	1	Inventarisasi Cepat Kebutuhan Pengungsi
73	Karhutla	Kalimantan Tengah	1	1	Bantuan DSP

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
74	Banjir bandang	Kab. Jayapura	1	1	Pendataan Pengungsi
75	Banjir	Kota Jayapura	1	1	Pendataan Pengungsi
76	Banjir	Bengkulu Utara	1	1	Pendataan Pengungsi
77	Banjir	Konawe	1	1	Bantuan DSP
78	Angin puting beliung	Boyolali	1	1	Pemantauan Penanganan Pengungsi
79	Gelombang pasang/abrasi	Banyuwangi	1	1	Pemantauan Penanganan Pengungsi
80	Banjir	Kebumen	1	1	Kaji Cepat
81	Tanah longsor	Bogor	1	1	Pemantauan dan Evaluasi
82	banjir dan tanah longsor	Padang	1	1	Inventarisasi Cepat Kebutuhan Pengungsi
83	Gerakan tanah	Banjarnegara	1	1	Kaji Cepat
84	Karhutla	Kota Banjarmasin	1	1	Koordinasi Penanganan Pengungsi
85	Gempa bumi	Kab. Sigi	1	1	Bantuan DSP
86	Banjir	Kota serang	1	1	Koordinasi
87	Gempa bumi	Donggala	1	1	Inventarisasi Cepat Kebutuhan Pengungsi
88	Karhutla	Siak	1	1	Pendampingan pendataan pengungsi
89	Banjir	Lima Puluh Kota	1	1	Pendampingan pendataan pengungsi
90	Gempa bumi	Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara	1	1	Bantuan DSP
91	Gempa bumi	Seram Bagian Barat	1	1	Bantuan DSP
92	Gempa bumi dan liquifaksi	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	1	1	Kaji Cepat Bantuan Sandang/Pangan
93	Banjir	Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan/Air Bersih

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
94	Banjir	Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan/Air Bersih
95	Banjir	Kota Pekalongan, Prov. Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan/Air Bersih
96	banjir dan tanah longsor	Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara	1	1	Bantuan DSP
97	Banjir	Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan	1	1	Kaji Cepat Bantuan Sandang/Pangan
98	Banjir	Kab Jeneponto	1	1	Bantuan DSP
99	Banjir	Kab Takalar	1	1	Kaji Cepat Bantuan Sandang/Pangan
100	Banjir	Kab Pangkajene	1	1	Kaji cepat bantuan huntara
101	Banjir	Kab Barru	1	1	Kaji cepat bantuan huntara
102	Gunung api	Kab Sitaro	1	1	Bantuan DSP
103	Karhutla	Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov Kalsel	1	1	Bantuan DSP
104	Banjir Bandang	Kab Jayapura	1	1	Kaji Cepat Bantuan Sandang Pangan
105	Angin puting	Kab. Bandung	1	1	Pendampingan Bantuan Kebutuhan Dasar
106	Angin puting	Serang, Prov Banten	1	1	Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar
107	Banjir Bandang	Kab Jayapura	1	1	Pendampingan Bantuan Kebutuhan Dasar
108	Gempa bumi	NTB	1	1	Pendampingan Bantuan Kebutuhan Dasar
109	Banjir	Mojokerto	1	1	Pendampingan Bantuan Kebutuhan Dasar
110	Banjir dan Tanah Longsor	Kota Ambon	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan/Air Bersih

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
111	Banjir dan Tanah Longsor	Seram Bagian Barat	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan/Air Bersih
112	Karhutla	Palembang	1	1	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Siaga Darurat
113	Banjir dan Tanah Longsor	Kendari	1	1	Kaji Cepat Bantuan Hunian sementara
114	Kekeringan	Kab Garut	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih
115	Kekeringan	Kota Tasikmalaya	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih
116	Kekeringan	Kab. Indramayu	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih
117	Gempa Bumi	Kota Ternate	1	1	Bantuan DSP
118	Karhutla	Palangkaraya	1	1	Pendampingan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
119	Kekeringan	Banten	1	1	Pendampingan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
120	Kekeringan	Surabaya	1	1	Pendampingan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
121	Banjir	Aceh Barat Daya	1	1	Bantuan DSP
122	Gempa bumi	Lebak	1	1	Pendampingan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
123	Gempa bumi	Banten	1	1	Pendampingan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
124	Kekeringan	Semarang	1	1	Pendampingan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
125	Kekeringan	Blora	1	1	Pendampingan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
126	Kekeringan	Grobogan	1	1	Pendampingan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
127	Kekeringan	Demak	1	1	Pendampingan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
128	Kekeringan	Yogyakarta	1	1	Pendampingan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
129	Karhutla	Kab Tanah Laut, Kalimantan Selatan	1	1	Bantuan DSP
130	Kekeringan	Pamekasan	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih
131	Kekeringan	sampang	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih
132	Kekeringan	NTB	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih
133	Banjir Bandang	Jayapura	1	1	Kaji Cepat Bantuan Hunian Sementara
134	Gempa bumi	Ambon	1	1	Bantuan DSP
135	Karhutla dan Kekeringan	Trenggalek	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih
136	Karhutla dan Kekeringan	Magetan	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih
137	Karhutla dan Kekeringan	Ngawi	1	1	Kaji Cepat Bantuan Kesehatan dan Air Bersih
138	Banjir	Aceh Selatan	1	1	Bantuan DSP
139	Puting beliung	Aceh	1	1	Kaji Cepat Bantuan Sandang Pangan
140	Karhutla	Kota Waringin Barat, Kalteng	1	1	Bantuan DSP
141	Karhutla	Palangkaraya	1	1	Pendampingan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
142	Gempa bumi	Pandeglang	1	1	Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar
143	Gempa bumi	Lebak	1	1	Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar
144	Banjir tanah longsor	Temanggung, Jawa Tengah	1	1	Bantuan DSP
145	Karhutla	Pontianak	1	1	Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar
146	Tsunami	Lampung Selatan	1	1	Kaji cepat kebutuhan dasar
147	Tsunami	lampung Tengah	1	1	Bantuan DSP
148	Gempa bumi	Donggala	1	1	Bantuan DSP
149	Gunungapi	Karo	1	1	Bantuan DSP
150	Kekeringan	Timor Tengah Utara	1	1	Kaji Cepat Bantuan KAB
151	Kekeringan	Flores timur	1	1	Kaji Cepat Bantuan KAB
152	Kekeringan	Kab Alor	1	1	Kaji Cepat Bantuan KAB
153	Gunung api	Kab Sleman	1	1	Koordinasi Bencana
154	Angin Puting	Bantul	1	1	Pemantauan dan Evaluasi
155	Banjir	Solok Selatan	1	1	Kaji Cepat Bantuan KAB
156	Banjir	Aceh Utara	1	1	Bantuan DSP
157	Tanah longsor	Lima Puluh Kota	1	1	Bantuan DSP
158	Gempa bumi	Halmahera Selatan, Maluku Utara	1	1	Bantuan DSP
159	Banjir	Kab Tebo	1	1	Kaji Cepat Bantuan KAB
160	Banjir dan Tanah Longsor	Solok Selatan	1	1	Bantuan DSP
161	Angin Puting	Kota Bekasi	1	1	Pemantauan & Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar
162	Banjir dan Longsor	Aceh Tenggara	1	1	Bantuan DSP

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
163	Tsunami	Kabupaten Serang, Banten	1	1	Kaji Cepat
164	Banjir	Sulawesi Selatan	1	1	Kaji Cepat
165	Longsor	Kab. Sukabumi, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
166	Banjir	Kab. Kepulauan Morotai, Maluku Utara	1	1	Bantuan DSP
167	Banjir	Kota Bogor, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
168	Gunungapi	Kab. Sitaro, Sulawesi Utara	1	1	Kaji Cepat
169	Angin Puting beliung	Kab.Karawang, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
170	Gempa bumi	Prov. Sumbar	1	1	Kaji Cepat
171	Banjir	Kab. Cirebon, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
172	Angin Puting beliung	Kab. Sidoarjo, Jawa Timur	1	1	Kaji Cepat
173	Karhutla	Kota Palangkaraya, Kalteng	1	1	Bantuan DSP
174	Karhutla	Kota Pekanbaru	1	1	Kaji Cepat
175	Karhutla	Prov. Riau	1	1	Kaji Cepat
176	Tanah longsor	Kab. Brebes, Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
177	Angin Puting Beliung	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1	Kaji Cepat
178	Banjir	Kabupaten Serang, Banten	1	1	Kaji Cepat
179	Banjir	Kab. Mamuju, Sulawesi Barat	1	1	Bantuan DSP
180	Banjir Bandang	Jayapura, Papua	1	1	Kaji Cepat
181	Gempa bumi	Nusa Tenggara Barat	1	1	Kaji Cepat
182	Banjir	Kab. Dharmasraya, Sumbar	1	1	Bantuan DSP
183	Karhutla	Prov. Riau	1	1	Kaji Cepat
184	Tsunami	Prov. Banten	1	1	Kaji Cepat
185	Gunungapi	Karo, Prov. Sumatera Utara	1	1	Bantuan DSP

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
186	Banjir	Kab. Bogor, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
187	Banjir	Kota Bekasi, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
188	Tanah longsor	Kab. Bogor, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
189	Banjir	Kota Padangsidempuan, Sumatra Utara	1	1	Bantuan DSP
190	Banjir bandang	Kab. Jayapura, Papua	1	1	Kaji Cepat
191	Banjir	Kab.Bandung, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
192	Banjir	Kab. Seram Bagian Timur, Maluku	1	1	Bantuan DSP
193	Puting beliung	Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
194	Banjir dan tanah longsor	Prov. Bengkulu	1	1	Kaji Cepat
195	Banjir	Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
196	Gempa Bumi	Kab Maluku Tengah, Maluku	1	1	Bantuan DSP
197	Banjir	Kota Banjar, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
198	Banjir	Tangerang Selatan, Prov. Banten	1	1	Kaji Cepat
199	Banjir Puting beliung	Kab. Pidie Jaya, Prov. Aceh	1	1	Kaji Cepat
200	Angin Puting Beliung	Kab. Pangandaran, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
201	Banjir, tanah longsor	Kab. Garut, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
202	Puting Beliung	Kab. Pandeglang, Banten	1	1	Kaji Cepat
203	Karlahut	Padang, Sumatra Barat – Pekanbaru	1	1	Kaji Cepat
204	Angin Puting beliung	Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1	Kaji Cepat
205	Banjir	Kab. Cirebon, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
206	Tanah Longsor	Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
207	Banjir Bandang	Kab. Jayapura, Papua	1	1	Kaji Cepat
208	Gempa bumi	Provinsi Sulawesi Tengah	1	1	Bantuan DSP
209	Banjir	Provinsi Jambi	1	1	Kaji Cepat
210	Tanah longsor	Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
211	Angin Puting beliung	Kab Brebes, Prov. Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
212	Banjir	Kab.Pemalang, Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
213	Angin Puting beliung, tanah longsor	Kab. Pekalongan, Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
214	Banjir, tanah longsor	Provinsi Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
215	Kekeringan	Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	1	1	Kaji Cepat
216	Karhutla	Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	1	1	Kaji Cepat
217	Karhutla	Provinsi Riau	1	1	Kaji Cepat
218	Gempa bumi	Kab. Sarmi, Papua	1	1	Kaji Cepat
219	Banjir	Kepulauan Tanimbar, Maluku	1	1	Kaji Cepat
220	Karhutla	Provinsi Kalimantan Selatan	1	1	Bantuan DSP
221	Kekeringan	Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
222	Banjir	Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
223	Banjir	Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
224	Karhutla	Kab Balangan, Kalimantan Selatan	1	1	Bantuan DSP
225	Banjir Tanah longsor	Kab. Purworejo	1	1	Kaji Cepat
226	Banjir	Kab. Kebumen Prov. Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
227	Banjir Tanah longsor	Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
228	Tanah Longsor	Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
229	Banjir	Provinsi Jambi	1	1	Kaji Cepat

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
230	Banjir longsor angin Puting	Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
231	Tanah longsor	Kab. Bantul, Prov. DIY	1	1	Bantuan DSP
232	Banjir	Prov. Bengkulu	1	1	Kaji Cepat
233	Angin Puting	Kab. Pandeglang, Banten	1	1	Kaji Cepat
234	Karhutla	Prov. Sumatera Selatan	1	1	Kaji Cepat
235	Karhutla	Prov. Riau	1	1	Kaji Cepat
236	Gempa Bumi	Kab. Solok Selatan, Sumbar	1	1	Bantuan DSP
237	Banjir Longsor	Kab. Batang, Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
238	Banjir Longsor	Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
239	Karhutla	Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat	1	1	Bantuan DSP
240	Banjir longsor	Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
241	Banjir longsor	Kab. Subang Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
242	Banjir longsor	Kab. Sleman, Prov. DIY	1	1	Kaji Cepat
243	Banjir	Kota Bekasi, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
244	Tanah longsor	Kab. Bogor, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
245	Angin Puting beliung	Kota Kupang, NTT	1	1	Kaji Cepat
246	Gempabumi	Kab.Pangandaran, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
247	Banjir bandang	Kab. Lebak, Banten	1	1	Bantuan DSP
248	Angin Puting beliung	Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
249	Gempabumi	Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
250	Karhutla	Kab. Aceh Barat	1	1	Helikopter
251	Karhutla	Prov. Riau	1	1	Kaji Cepat
252	Karhutla	Prov. Riau	1	1	Kaji Cepat

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
253	Banjir dan tanah longsor	Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	1	1	Kaji Cepat
254	Banjir dan tanah longsor	Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda	1	1	Kaji Cepat
255	Tsunami	Kab. Pesawaran, Prov. Lampung	1	1	Kaji Cepat
256	Tsunami	Kab. Tanggamus	1	1	Kaji Cepat
257	Banjir bandang	Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
258	Tanah longsor	Kab. Mojokerto, Jawa Timur	1	1	Kaji Cepat
259	Karhutla	Prov. Riau	1	1	Kaji Cepat
260	Angin Puting beliung dan tanah longsor	Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat	1	1	Kaji Cepat
261	Banjir	Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
262	Gempa Bumi	Kota Mataram	1	1	Bantuan DSP
263	Karhutla	Provinsi Riau	1	1	Kaji Cepat
264	Karhutla	Kab. Merauke, Papua	1	1	Kaji Cepat
265	Gempa bumi	Provinsi Bali	1	1	Kaji Cepat
266	Banjir dan tanah longsor	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	1	Bantuan DSP
267	Karhutla	Provinsi RIau	1	1	Kaji Cepat
268	Banjir	Prov. Sulawesi Selatan	1	1	Kaji Cepat
269	Karhutla	Prov. Sumatera Barat dan Prov. Riau	1	1	Kaji Cepat
270	Banjir bandang	Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah	1	1	Kaji Cepat
271	Gempa bumi	Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah	1	1	Kaji Cepat
272	Banjir dan tanah longsor	Prov. Papua Barat	1	1	Kaji Cepat
273	Kekeringan	Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
274	Gerakan tanah	Kab. Lebak, Banten	1	1	Kaji Cepat

No	Jenis Bencana	Lokasi	Frekuensi Kejadian	Frekuensi Respon	Bantuan / Keterangan
275	Tanah longsor	Kab. Bandung Barat, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
276	Angin Puting beliung	Prov. Jawa Tengah	1	1	Kaji Cepat
277	Gempabumi	Provinsi Banten	1	1	Kaji Cepat
278	Banjir	Kab Maluku Barat Daya, Prov. Maluku	1	1	Bantuan DSP
279	Angin Puting beliung	Kab.Bogor, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
280	Gempa bumi	Kab Lombok Timur	1	1	Bantuan DSP
281	Gempa bumi	Kab. Mamberamo Tengah, Prov. Papua	1	1	Kaji Cepat
282	Kekeringan	Kab. Bandung Barat, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
283	Banjir	Kota Bontang, Kalimantan Timur	1	1	Kaji Cepat
284	Gunungapi	Kab. Subang Prov. Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
285	Kekeringan	Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
286	Tanah longsor	Kota Cimahi, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
287	Gempa bumi	Kab. Sukabumi, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
288	Banjir bandang	Kab. Jayapura, Papua	1	1	Kaji Cepat
289	Angin Puting beliung	Prov. Sulawesi Utara	1	1	Kaji Cepat
290	Gempa	Kab. Serang, Banten	1	1	Kaji Cepat
291	Kekeringan	Kota Bogor, Jawa Barat	1	1	Kaji Cepat
292	Kekeringan	Kota Serang	1	1	Kaji Cepat
293	Gempa Bumi	Kab Lombok Barat	1	1	Bantuan DSP
294	Banjir	Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu	1	1	Bantuan DSP

Lampiran 8. Distribusi Peralatan Tahun 2015 – 2019 di 136 Kab/Kota Prioritas

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Kota Denpasar	BALI	1			1		2
2	Buleleng	BALI	1		1	1		3
3	Badung	BALI	1					1
4	Tabanan	BALI				1		1
5	Tangerang	BANTEN	1		1	1		3
6	Kota Cilegon	BANTEN	1			1		2
7	Kota Bengkulu	BENGKULU	1		1			2
8	Rejang Lebong	BENGKULU	1			1		2
9	MukoMuko	BENGKULU	1			1		2
10	Sleman	D.I. YOGYAKARTA	1			1		2
11	Kota Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	1			1		2
12	Kota Jakarta Timur	DKI JAKARTA			1			1
13	Gorontalo	GORONTALO			1			1
14	Kota Gorontalo	GORONTALO	1			1		2
15	Kota Jambi	JAMBI	1	1				2
16	Soralangun	JAMBI	1	1	1	1		4
17	Kerinci	JAMBI	1	1		1		3
18	Bekasi	JAWA BARAT		1	1	1	1	4
19	Sukabumi	JAWA BARAT	1	1	1	1	1	5
20	Cianjur	JAWA BARAT	1			1		2
21	Tasikmalaya	JAWA BARAT		1	1	1		3
22	Bandung Barat	JAWA BARAT	1		1	1		3
23	Ciamis	JAWA BARAT	1		1	1		3
24	Kota Bogor	JAWA BARAT	1					1
25	Kota Bandung	JAWA BARAT						0
26	Cirebon	JAWA BARAT			1	1		2
27	Kota Depok	JAWA BARAT						0
28	Pangandaran	JAWA BARAT					1	1
29	Kota Semarang	JAWA TENGAH	1		1			2
30	Cilacap	JAWA TENGAH	1		1	1		3
31	Magelang	JAWA TENGAH	1					1
32	Kebumen	JAWA TENGAH	1		1	1		3
33	Demak	JAWA TENGAH	1			1		2

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
34	Kendal	JAWA TENGAH	1		1	1		3
35	Malang	JAWA TIMUR	1			1	1	3
36	Jember	JAWA TIMUR	1			1		2
37	Sidoarjo	JAWA TIMUR			1			1
38	Banyuwangi	JAWA TIMUR	1			1		2
39	Gresik	JAWA TIMUR	1		1	1		3
40	Bojonegoro	JAWA TIMUR	1			1		2
41	Lamongan	JAWA TIMUR	1		1	1		3
42	Bangkalan	JAWA TIMUR	1			1		2
43	Pacitan	JAWA TIMUR	1			1		2
44	Kota Surabaya	JAWA TIMUR						0
45	Kota Pontianak	KALIMANTAN BARAT	1			1		2
46	Sambas	KALIMANTAN BARAT					1	1
47	Ketapang	KALIMANTAN BARAT	1			1		2
48	Sintang	KALIMANTAN BARAT	1			1	1	3
49	Landak	KALIMANTAN BARAT			1	1		2
50	Kapuas Hulu	KALIMANTAN BARAT	1	1				2
51	Bengkayang	KALIMANTAN BARAT	1			1	1	3
52	Singkawang	KALIMANTAN BARAT			1	1		2
53	Tanah Laut	KALIMANTAN SELATAN	1		1			2
54	Kotabaru	KALIMANTAN SELATAN	1		1	1		3
55	Barito Kuala	KALIMANTAN SELATAN	1		1			2
56	Kapuas	KALIMANTAN TENGAH	1		1	1		3
57	Palangka Raya	KALIMANTAN TENGAH		1	1		1	3
58	Kota Samarinda	KALIMANTAN TIMUR	1			1		2
59	Kutai Kartanegara	KALIMANTAN TIMUR	1					1
60	Kota Balikpapan	KALIMANTAN TIMUR	1	1		1		3
61	Kota Tarakan	KALIMANTAN UTARA	1		1	1	1	4

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
62	Nunukan	KALIMANTAN UTARA	1			1		2
63	Kota Bandar Lampung	LAMPUNG		1		1		2
64	Tanggamus	LAMPUNG	1		1	1		3
65	Lampung Barat	LAMPUNG	1			1		2
66	Kota Ambon	MALUKU	1		1	1		3
67	Maluku Tengah	MALUKU	1		1			2
68	Seram Bagian Barat	MALUKU	1			1		2
69	Buru	MALUKU	1		1	1		3
70	Seram Bagian Timur	MALUKU	1			1		2
71	Maluku Tenggara	MALUKU	1	1				2
72	Kota Ternate	MALUKU UTARA	1		1	1		3
73	Halmahera Utara	MALUKU UTARA	1		1			2
74	Kepulauan Sula	MALUKU UTARA	1		1			2
75	Kota Tidore Kepulauan	MALUKU UTARA	1	1	1			3
76	Halmahera Timur	MALUKU UTARA	1			1		2
77	Pulau Morotai	MALUKU UTARA			1			1
78	Lombok Timur	NUSA TENGGARA BARAT	1		1	1		3
79	Lombok Tengah	NUSA TENGGARA BARAT			1			1
80	Lombok Barat	NUSA TENGGARA BARAT	1					1
81	Bima	NUSA TENGGARA BARAT	1		1			2
82	Kota Mataram	NUSA TENGGARA BARAT			1	1		2
83	Dompu	NUSA TENGGARA BARAT	1		1	1	1	4
84	Lombok Utara	NUSA TENGGARA BARAT	1			1		2
85	Kota Bima	NUSA TENGGARA BARAT		1	1	1		3
86	Kota Kupang	NUSA TENGGARA TIMUR			1	1		2

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
87	Belu	NUSA TENGGARA TIMUR	1			1		2
88	Manggarai	NUSA TENGGARA TIMUR	1					1
89	Sikka	NUSA TENGGARA TIMUR	1			1	1	3
90	Ende	NUSA TENGGARA TIMUR	1		1			2
91	Alor	NUSA TENGGARA TIMUR	1					1
92	Ngada	NUSA TENGGARA TIMUR	1		1			2
93	Merauke	PAPUA	1	1	1	1		4
94	Nabire	PAPUA	1			1		2
95	Jayapura	PAPUA	1			1		2
96	Kepulauan Yapen	PAPUA	1			1		2
97	Sarmi	PAPUA	1			1	1	3
98	Kota Sorong	PAPUA BARAT	1		1	1		3
99	Manokwari	PAPUA BARAT	1			1	1	3
100	Teluk Bintuni	PAPUA BARAT			1			1
101	Raja Ampat	PAPUA BARAT		1		1		2
102	Teluk Wondama	PAPUA BARAT	1					1
103	Kota Banda Aceh	PEMERINTAH ACEH	1		1			2
104	Kota Lhokseumawe	PEMERINTAH ACEH	1			1	1	3
105	Polewali Mandar	SULAWESI BARAT	1		1	1		3
106	Mamuju	SULAWESI BARAT	1			1	1	3
107	Kota Makassar	SULAWESI SELATAN	1					1
108	Gowa	SULAWESI SELATAN	1		1	1		3
109	Maros	SULAWESI SELATAN	1			1	1	3
110	Takalar	SULAWESI SELATAN	1		1			2
111	Luwu Timur	SULAWESI SELATAN	1					1

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
112	Bantaeng	SULAWESI SELATAN	1			1		2
113	Parigi Moutong	SULAWESI TENGAH	1		1			2
114	Kota Palu	SULAWESI TENGAH	1		1	1		3
115	Donggala	SULAWESI TENGAH	1			1		2
116	Poso	SULAWESI TENGAH	1			1		2
117	Morowali	SULAWESI TENGAH	1			1		2
118	Sigi	SULAWESI TENGAH	1					1
119	Kolaka	SULAWESI TENGGARA	1		1	1		3
120	Kota Kendari	SULAWESI TENGGARA	1		1	1		3
121	Konawe	SULAWESI TENGGARA	1		1			2
122	Kota Manado	SULAWESI UTARA	1			1		2
123	Kota Bitung	SULAWESI UTARA	1			1		2
124	Minahasa Selatan	SULAWESI UTARA	1			1		2
125	Minahasa Utara	SULAWESI UTARA	1			1		2
126	Kepulauan Sangihe	SULAWESI UTARA	1		1		1	3
127	Kota Padang	SUMATERA BARAT	1	1		1		3
128	Padang Pariaman	SUMATERA BARAT	1		1	1		3
129	Kepulauan Mentawai	SUMATERA BARAT	1		1	1		3
130	Banyuasin	SUMATERA SELATAN	1		1	1		3
131	Lahat	SUMATERA SELATAN	1		1			2
132	Kota Medan	SUMATERA UTARA		1	1	1		3
133	Deli Serdang	SUMATERA UTARA			1	1	1	3
134	Langkat	SUMATERA UTARA	1		1	1	1	4
135	Simalungun	SUMATERA UTARA	1			1		2
136	Karo	SUMATERA UTARA	1			1		2

Tidak Ada BPBD

Lampiran 9. Distribusi Logistik di 136 Kab/Kota Prioritas

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Papua Barat	Manokwari
2	Papua Barat	Teluk Wondama
3	Papua Barat	Teluk Bintuni
4	Maluku	Seram Bagian Barat
5	Maluku	Seram Bagian Timur
6	Maluku	Buru
7	Maluku Utara	Kota Ternate
8	Maluku Utara	Pulau Morotai
9	Maluku Utara	Halmahera Timur
10	NTB	Kota Mataram
11	NTB	Lombok Barat
12	NTB	Lombok Timur
13	NTB	Lombok Utara
14	NTB	Kota Bima
15	NTB	Dompu
16	NTB	Bima
17	NTT	Kota Kupang
18	NTT	Ngada
19	NTT	Ende
20	NTT	Sikka
21	NTT	Manggarai
22	NTT	Alor
23	NTT	Belu
24	Gorontalo	Gorontalo
25	Gorontalo	Kota Gorontalo
26	Sulawesi Barat	Mamuju
27	Sulawesi Barat	Polewali Mandar
28	Sulawesi Selatan	Maros
29	Sulawesi Selatan	Takalar
30	Sulawesi Selatan	Gowa
31	Sulawesi Selatan	Luwu Timur
32	Sulawesi Selatan	Kota Makassar
33	Sulawesi Selatan	Bantaeng
34	Sulawesi Tengah	Sigi
35	Sulawesi Tengah	Kab. Poso

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
36	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong
37	Sulawesi Tengah	Morowali
38	Sulawesi Tenggara	Kolaka
39	Sulawesi Tenggara	Konawe
40	Sulawesi Utara	Kota Bitung
41	Sulawesi Utara	Minahasa Utara
42	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
43	Sulawesi Utara	Kota Manado
44	Kalimantan Barat	Kota Pontianak
45	Kalimantan Barat	Kota Singkawang
46	Kalimantan Barat	Bengkayang
47	Kalimantan Barat	Sambas
48	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu
49	Kalimantan Barat	Ketapang
50	Kalimantan Barat	Landak
51	Kalimantan Selatan	Kotabaru
52	Kalimantan Selatan	Barito Kuala
53	Kalimantan Selatan	Tanah Laut
54	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
55	Kalimantan Tengah	Kapuas
56	Kalimantan Timur	Kota Samarinda
57	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan
58	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara
59	Kalimantan Utara	Kota Tarakan
60	Kalimantan Utara	Nunukan
61	Bali	Kota Denpasar
62	Bali	Badung
63	Bali	Tabanan
64	Bali	Buleleng
65	D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta
66	D.I. Yogyakarta	Sleman
67	DKI Jakarta	DKI Jakarta
68	Jawa Barat	Kota Bogor
69	Jawa Barat	Bekasi
70	Jawa Barat	Cianjur
71	Jawa Barat	Bandung Barat
72	Jawa Barat	Cirebon

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
73	Jawa Barat	Sukabumi
74	Jawa Barat	Tasikmalaya
75	Jawa Barat	Ciamis
76	Jawa Barat	Pangandaran
77	Jawa Tengah	Kota Semarang
78	Jawa Tengah	Kendal
79	Jawa Tengah	Demak
80	Jawa Tengah	Cilacap
81	Jawa Tengah	Kebumen
82	Jawa Tengah	Magelang
83	Jawa Timur	Malang
84	Jawa Timur	Gresik
85	Jawa Timur	Bangkalan
86	Jawa Timur	Sidoarjo
87	Jawa Timur	Lamongan
88	Jawa Timur	Bojonegoro
89	Jawa Timur	Pacitan
90	Jawa Timur	Banyuwangi
91	Jawa Timur	Jember
92	Aceh	Kota Lhokseumawe
93	Aceh	Kota Banda Aceh
94	Bengkulu	Kota Bengkulu
95	Bengkulu	Mukomuko
96	Bengkulu	Rejang Lebong
97	Jambi	Sarolangun
98	Jambi	Kerinci
99	Lampung	Kota Bandar Lampung
100	Lampung	Lampung Barat
101	Lampung	Tanggamus
102	Sumatera Barat	Kota Padang
103	Sumatera Barat	Padang Pariaman
104	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai
105	Sumatera Selatan	Banyuasin
106	Sumatera Selatan	Lahat
107	Sumatera Utara	Kota Medan
108	Sumatera Utara	Langkat
109	Sumatera Utara	Deli Serdang

BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
BNPB